



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, serta RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, dan HM. Mukmin Faisyal, HP, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 55);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2017.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
- b. Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; dan
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017
- BAB VI. Penutup

- (2) Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2017, yang disusun akibat perubahan asumsi-asumsi dari perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2016

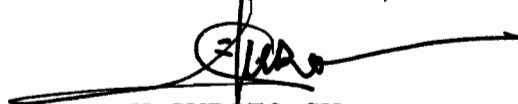
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur sudah memasuki *middle period* dimana pelaksanaan RKPD 2015 telah selesai dilaksanakan dan RKPD 2016 mulai diimplementasikan dalam pembangunan daerah. Berbagai hasil pembangunan yang merupakan target pembangunan jangka menengah telah dirasakan oleh masyarakat mulai pemenuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga peningkatan taraf perekonomian makro dan mikro. Oleh karena itu, untuk meneruskan estafet pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, perlu dirumuskan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pelaksanaan tahun 2017 sebagai salah satu langkah menjujupencapaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018.

Rumusan RKPD 2017 ini memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah mengingat dalam penyusunannya akan memasukkan berbagai kebijakan baru maupun hasil revisi dari dokumen pemerintahan pemerintah baik pusat maupun provinsi. Dengan terpilihnya presiden baru yakni Ir. Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah disusun dan ditetapkan pada periode sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur memiliki periode pelaksanaan tahun 2013 hingga 2018 sehingga dengan adanya Ir. Joko Widodo sebagai presiden baru (kebijakan pembangunan nasional baru melalui NAWACITA) maka pola dan rumusan pembangunan jangka menengah daerah mengalami perubahan maupun penajaman.

Perubahan berbagai kebijakan tersebut otomatis akan menyebabkan beberapa penyesuaian baik sasaran pembangunan, arah kebijakan, hingga program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk mencapai target pembangunan nasional melalui



kebijakan-kebijakan baru. Oleh karena itu, pada penyusunan RKPD 2017 ini akan mengintegrasikan berbagai dokumen revisi pembangunan daerah terutama revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen pembangunan nasional baru sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan utamanya dalam pengintegrasian dengan program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nawa Cita di bawah kepemimpinan presiden Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan (utamanya kebijakan daerah) sangat ditentukan oleh evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pembelajaran dari kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing - masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah pada tahun 2017 ini memiliki prioritas dalam perwujudan perekonomian yang berkualitas dan optimal. Hal ini terlihat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki fokus/tema pembangunan di tahun 2017 yakni, "Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas". Tema ini merupakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2017 yang mengindikasikan sebuah harapan untuk meningkatkan nilai tambah produksi unggulan daerah agar memiliki daya saing dan daya beli. Prioritas pembangunan pada tahun 2017 sudah mengimplementasikan dimensi pembangunan sektor unggulan pada strategi pembangunan nasional dan juga secara langsung sinkron dengan agenda prioritas



nasional yakni “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki satu tahun periode pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Dalam RKPD juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana evaluasi ini akan digunakan sebagai pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan lanjutan agar dapat lebih baik dan optimal pelaksanaannya.

RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapan tahunannya. Dengan demikian, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Dalam pelaksanaan RKPD 2017, perlu memperhatikan :

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional;
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJMD tahun keempat, maka RKPD tahun 2017 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2017 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD



(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2017. Selain itu, RKPD tahun 2017 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu evaluasi pembangunan Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

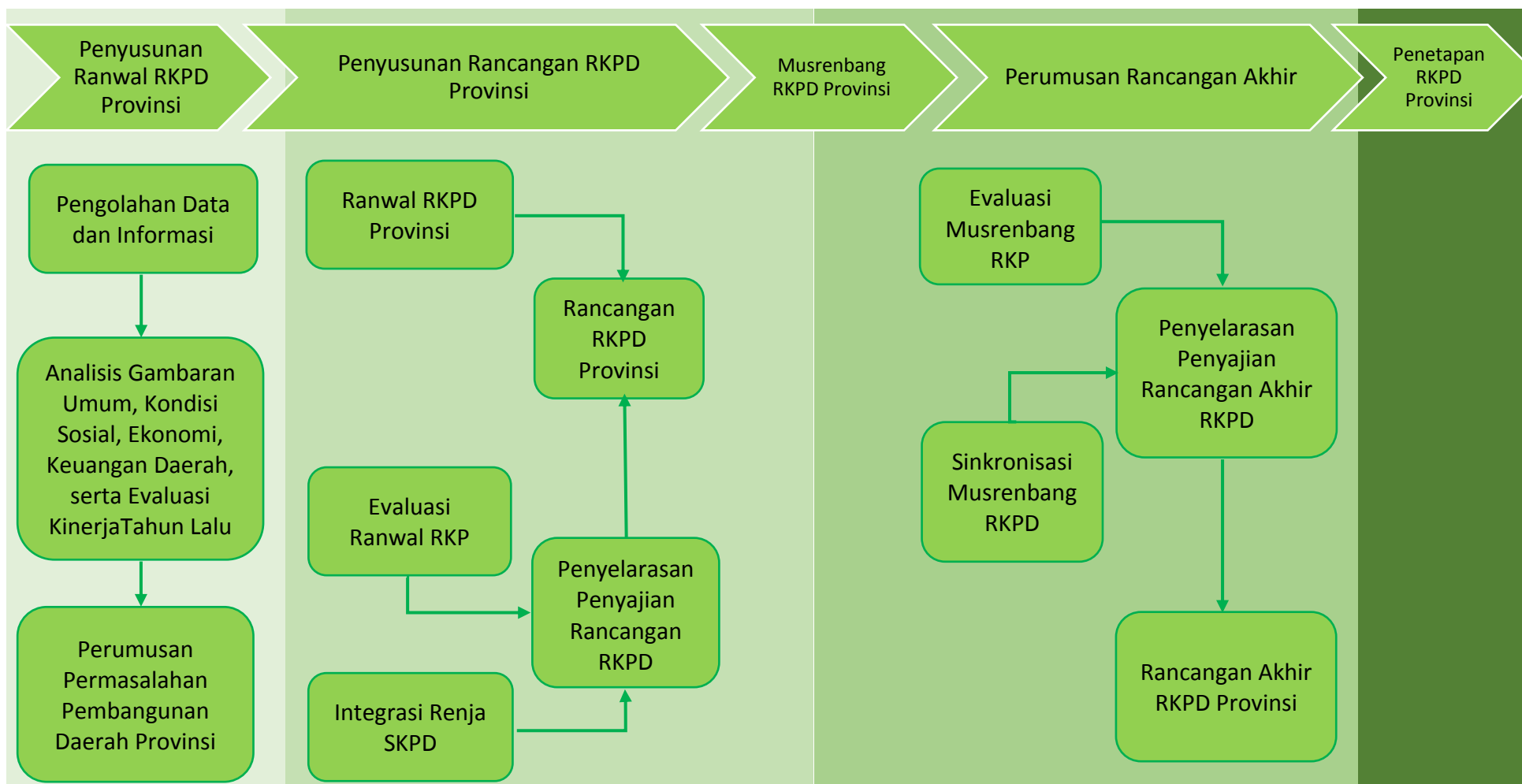
Dalam penyusunan RKPD perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 6) Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Keenam tahapan tersebut di atas digambarkan pada bagan sederhana seperti gambar 1.1.



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur





Sesuai dengan tahapan tersebut, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 telah ditetapkan yaitu dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2016 pada tanggal 16 Mei Tahun 2016. Dan dengan ketetapan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendali Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Demikian juga, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Point Kedua segera melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan adanya penyesuaian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
3. Tren ekonomi global menurun, berdampak pada kapasitas fiskal daerah
4. Rasionalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 sesuai dengan penyesuaian Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/159/Perda-V/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Rasionalisasi Pendapatan Tahun 2017.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 memiliki landasan hukum yang dalam bentuk Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); serta
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; serta
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP No 18 Th 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 66);

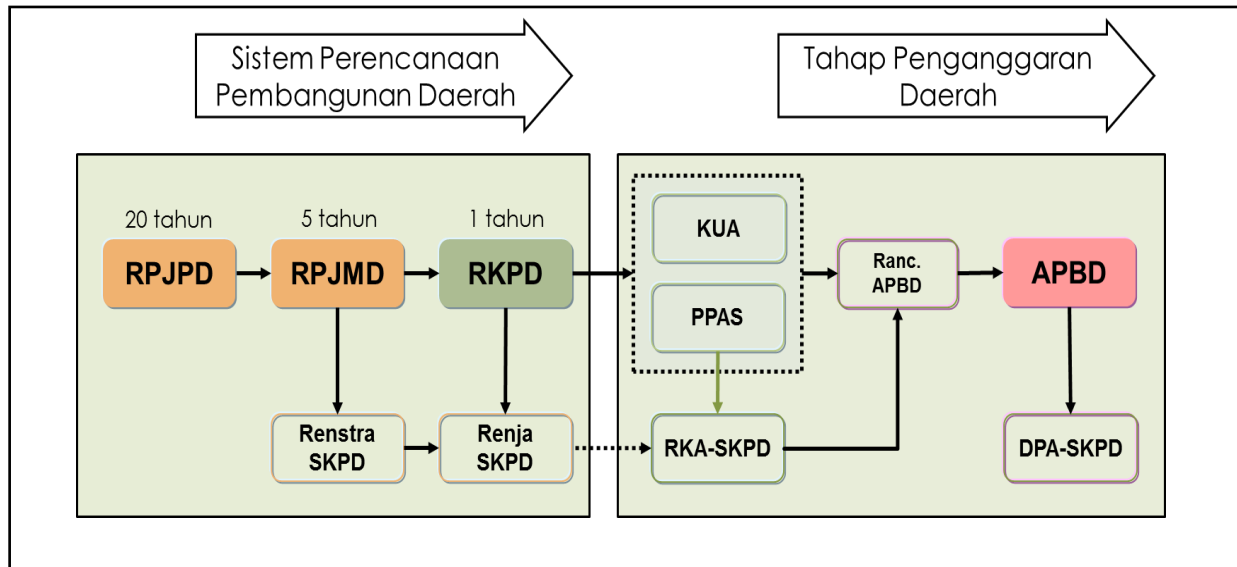
1.3 Hubungan AntarDokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Dari gambar 1.2. tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.



- BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;** memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.
- BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;** memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).
- BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;** mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;** mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- BAB VI. Penutup;** mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyesuaian penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2017 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Tujuan yang ingin dicapai dari penyesuaian penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, yaitu:

- a. Pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing - masing Daerah, sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien
- b. Perubahan/ restrukturisasi Program/Kegiatan pada Tahun 2017 melakukan perbaikan **indikator kinerja yang lebih SMART** dan **penyesuaian target kinerja** dengan memperhatikan pencapaian kinerja 2015 serta alokasi pendanaan terkait pada tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018.
- c. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017;
- e. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
- f. Operasionalisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun keempat (tahun 2017).
- g. Menyesuaikan program/kegiatan beserta alokasi pendanaan dengan memperhatikan peralihan kewenangan sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian timur yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam melimpah. Keanekaragaman sumber daya alam terutama mineral tersebut menjadikan kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap perkembangan perekonomian nasional diperhitungkan hingga saat ini. Selain itu, wilayahnya yang luas dan berkembang menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kesempatan dalam menggali potensi menuju daya saing daerah maupun nasional. Meskipun begitu, pengelolaan yang terstruktur dan bijaksana terutama dalam penggalan potensi sumber daya alam tak terbaharui menjadi fokus utama dalam menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan yang merupakan isu strategis internasional dalam menghadapi *global warming*.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah karena letak geografisnya di wilayah tropis. Begitu pula Provinsi Kalimantan Timur, provinsi yang terletak di perbatasan wilayah tengah dan timur Indonesia ini memiliki beranekaragam sumber daya hayati yang tumbuh dalam bentangan alam yang luas. Selain itu, wilayahnya yang berbatasan darat dengan Negara Malaysia menjadi ciri khas tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola administrasi kewilayahan maupun kependudukannya.

Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai lebih dari segi geografis dibandingkan dengan provinsi lain termasuk perhatian dari pemerintah pusat. Selain itu, letak geografis Provinsi Kalimantan Timur berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang memiliki potensi strategis sebagai pendukung perekonomian wilayah. Hal tersebut dikarenakan ALKI berperan dalam



memperlancar transportasi kapal-kapal dagang (baik dalam maupun luar negeri) yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki daratan cukup luas di Negara Indonesia. Luas wilayah yang mencapai **12.734.692** ha yang terdiri dari daratan seluas 12.638.893 ha dan perairan darat seluas 95.799 ha, menjadikan Provinsi Kalimantan Timur lebih memiliki peluang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sedangkan dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Adapun pembagian wilayah administratif pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	136
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Provinsi Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.033

Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015

Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;



2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Dari sisi klimatologi, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pengukuran iklim melalui tiga stasiun bandara yakni di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Berikut statistik klimatologi yang terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

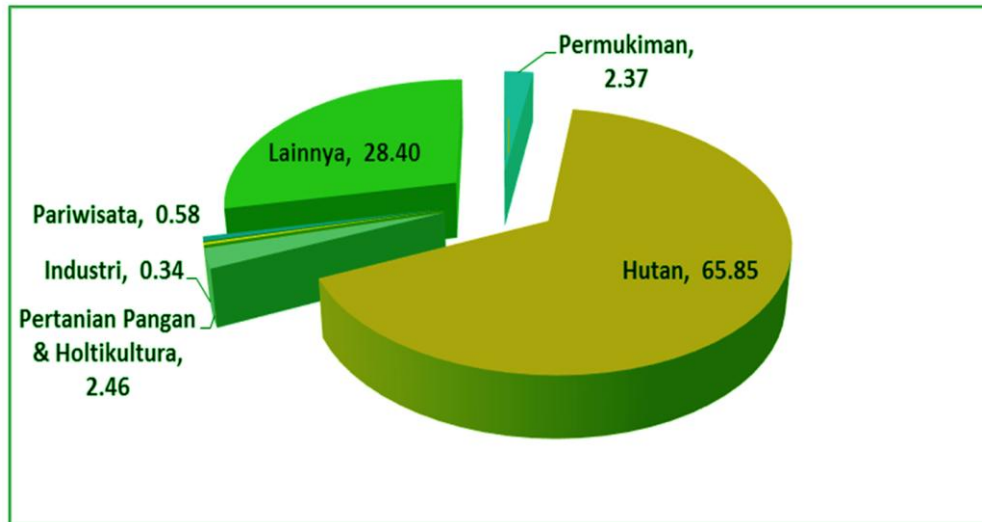
NO	URAIAN	STASIUN		
		SAMARINDA	BALIKPAPAN	TANJUNG REDEB
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	22,20	22,30	22,30
	- Maksimum	35,20	33,80	34,40
2	Kelembaban (%)	82	84	82
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012,9	1.011,7	1.010,9
4	Kecepatan Angin (Knot)	4	4	4
5	Curah Hujan (mm)	2.097,8	2.149,8	1.363,4
6	Penyinaran Matahari (%)	46,8	52,5	50,8

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim

Potensi sumber daya lahan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 16.732.065 ha. Secara garis besar sumber daya lahan Kalimantan Timur terbagi menjadi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Jika dilihat dari peruntukan kawasan sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur masih berupa kawasan hutan yang mencapai 65,85 persen sedangkan sisanya berupa wilayah permukiman yang hanya mencapai 2,37% (396.266 Ha), industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan holtikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2035



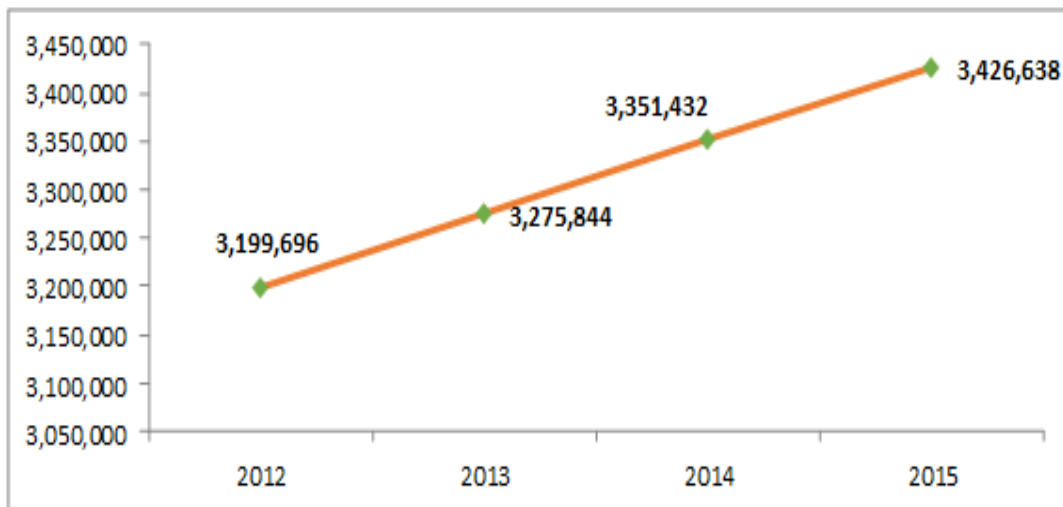
Sumber: Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

Penduduk Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini terjadi karena dua faktor yakni pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Secara statistik, banyak cara dalam menentukan jumlah penduduk suatu wilayah baik melalui estimasi survei, registrasi penduduk, proyeksi penduduk.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan ini, jumlah penduduk didekati dengan menggunakan proyeksi penduduk yang dilakukan penyesuaian kembali melalui *back casting* Susenas oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Pada penghitungan jumlah penduduk didapatkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3.426.638 jiwa dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hampir mencapai 3,28 juta jiwa pada tahun 2013 mencapai 3,35 jiwa pada tahun 2014.



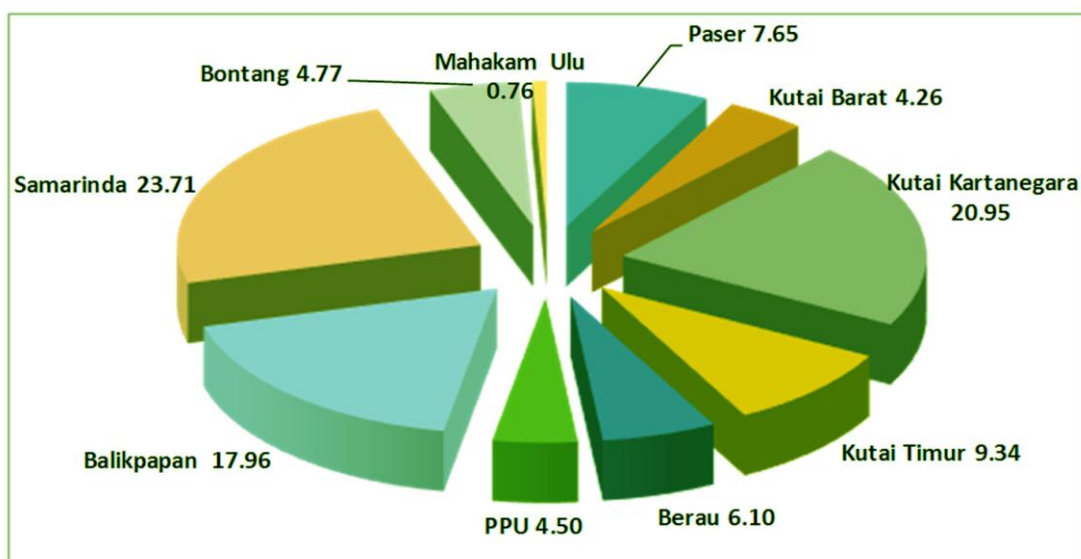
Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan baik jumlah penduduk maupun kepadatan penduduk antar kabupaten/kota. Ketimpangan sangat terlihat pada wilayah kota yang secara total hanya memiliki luas wilayah 1,09 persen namun dihuni oleh 46,45 persen penduduk, sedangkan 53,55 persen penduduk mendiami 98,91 persen luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang notabene merupakan wilayah administrasi kabupaten.

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota (%)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015





Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda yaitu sebesar 23,71 persen karena Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur, diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan persentase penduduk sebesar 20,95 persen dan Kota Balikpapan sebesar 17,96 persen. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang kurang dari 5 persen terdapat di Kota Bontang (4,77%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,50%) , Kutai Barat (4,26%) dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Hulu yang bahkan tidak mencapai 1 persen (0,76%).

Pada indikator kependudukan yang lain, penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dimana *sex ratio* mencapai 110,31 dimana mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 110-111 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.3
Sex Ratio, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

NO.	KAB/KOTA	SEX RATIO	KEPADATAN PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	Paser	113,11	24,41	2,14
2	Kutai Barat	111,89	9,48	0,33
3	Kutai Kartanegara	110,67	27,91	2,27
4	Kutai Timur	118,47	10,08	4,08
5	Berau	116,25	9,52	2,66
6	Penajam Paser Utara	109,48	49,25	1,05
7	Balikpapan	106,86	1.220,65	1,53
8	Samarinda	107,05	1.169,20	1,76
9	Bontang	109,92	1.001,38	2,10
10	Mahakam Ulu	114,88	1,7	0,39
Provinsi Kalimantan Timur		110,31	27,34	2,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

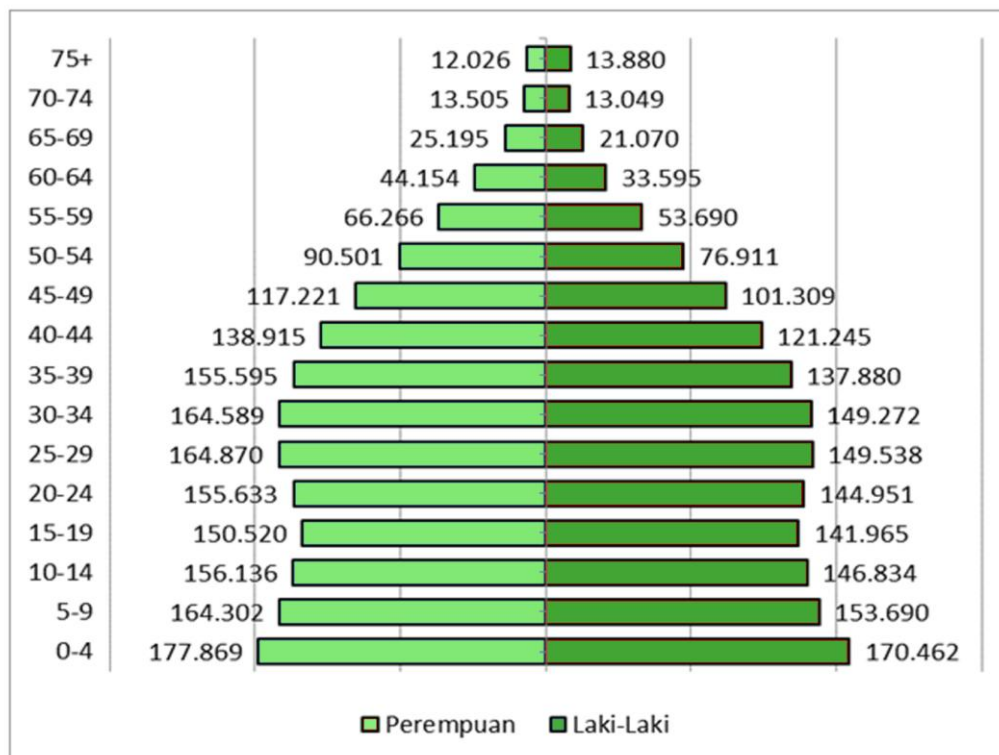
Kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebesar 27,34 jiwa/km² yang mengindikasikan bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak sebanding dengan penduduk yang tinggal di dalamnya. Analisis singkat dari kepadatan penduduk tersebut yakni setiap 27-28 jiwa penduduk menempati 1 km² wilayah di



Provinsi Kalimantan Timur. Distribusi penduduk yang tidak merata semakin memperkeruh perkembangan daerah utamanya kabupaten yang memiliki daerah pelosok karena kurang memiliki potensi sumber daya manusia untuk mengolah daerah tersebut.

Jika dilihat dari piramida penduduk di bawah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk usia muda memiliki jumlah yang cukup besar dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode ini dan akan menjadi potensi yang menunjang bagi pembangunan jika diberdayakan dengan optimal. Begitu pula dengan masyarakat usia produktif yang mendominasi jumlah penduduk sehingga potensi mereka jika dimaksimalkan akan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

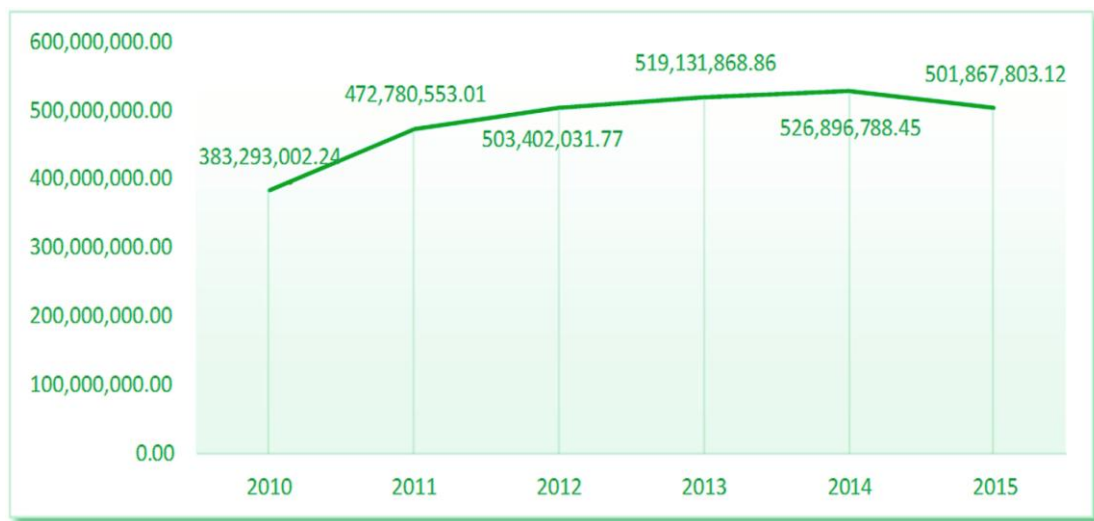
1) Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 526.896.788,45 juta rupiah atau hampir



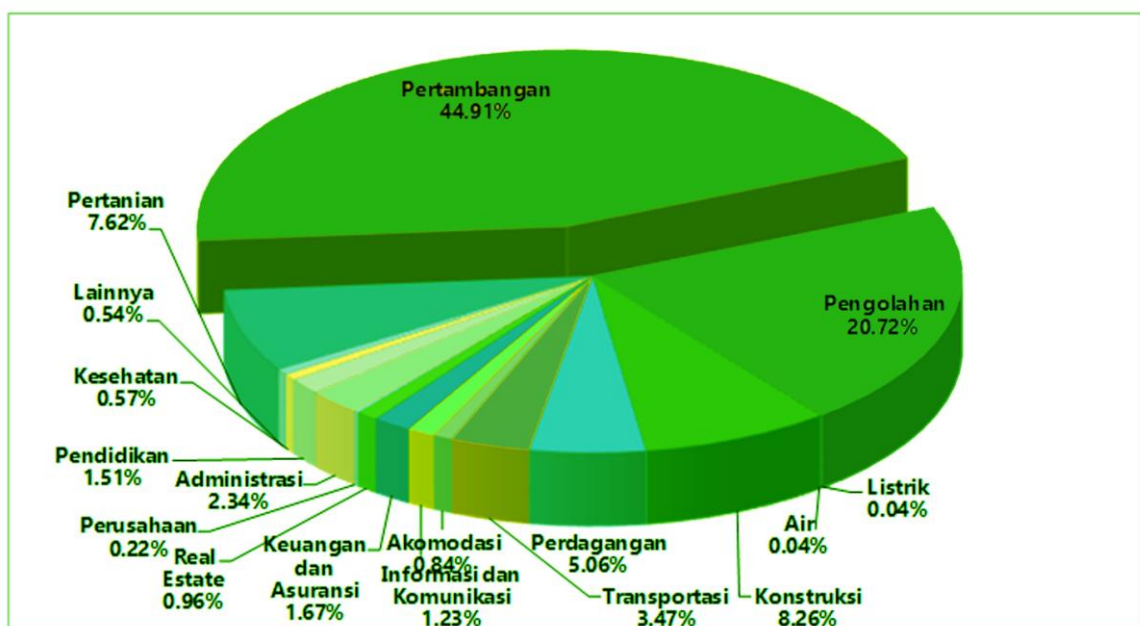
mencapai 526,9 triliun rupiah pada tahun 2014 sedangkan Tahun 2015 sampai mencapai 501,87 triliun rupiah. Nilai PDRB tahun terakhir ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 383,29 triliun rupiah dimana kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun berikutnya yakni 2011 dengan nilai PDRB mencapai 472,78 triliun rupiah.

Gambar 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Gambar 2.6
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (%)



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur



Pembentukan nilai PDRB atas Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan meskipun mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 44,91 persen terhadap PDRB total. Sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yakni mencapai 20,72 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk kontribusi sektor pertanian sebagai salah satu komoditas yang akan dijadikan sektor unggulan oleh pemerintah provinsi, pada tahun 2015 ini mencapai 7,62 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbaharui mengingat sektor pertambangan dan penggalan semakin menurun produksinya.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Besarnya PDRB Kalimantan Timur dapat menggambarkan positifnya kondisi perekonomian Kalimantan Timur secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara mikro. Meskipun nilai PDRB selalu meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi di Provinsi Kalimantan Timur terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 6,3 persen dan menurun sedikit pada tahun berikutnya 5,26 persen. Namun pada dua tahun terakhir yakni tahun 2013 dan 2014, pertumbuhan ekonomi melambat dengan drastis dimana pada tahun 2013 hanya mencapai 2,25 persen dan



melambat kembali pada tahun berikutnya menjadi sebesar 1,57 persen. Sama halnya pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi -1,28 persen.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015

KATEGORI		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,31	7,62	6,44	6,72	4,59
B	Pertambangan dan Penggalian	10,64	8,01	1,85	-0,56	-4,83
C	Industri Pengolahan	-3,77	-3,49	-1,81	0,22	2,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,62	13,27	3,56	18,74	25,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,42	2,63	6,26	4,55	2,56
F	Konstruksi	4,75	6,21	4,91	5,98	-1,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,4	5,59	3,26	4,43	0,32
H	Transportasi dan Pergudangan	9,91	7,25	6,51	7,23	2,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,21	9,68	3,34	5,18	4,89
J	Informasi dan Komunikasi	8,84	12,1	9,11	9,65	7,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,83	12,46	14,37	2,41	2,05
L	Real Estat	5,48	8,27	8,23	8,29	3,59
M,N	Jasa Perusahaan	14,35	8,54	8,22	8,29	-3,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,65	1,89	4,74	9,47	4,85
P	Jasa Pendidikan	23,03	19,09	18,74	15,28	11,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,02	10,43	5,12	10,90	12,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,24	3,66	3,24	7,38	8,81
Total		6,3	5,26	2,25	1,57	-1,28

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dipicu dengan terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalian, jasa perusahaan dan konstruksi. Meskipun sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif namun kondisi tersebut belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan sektor pertambangan memiliki andil yang cukup besar pada struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

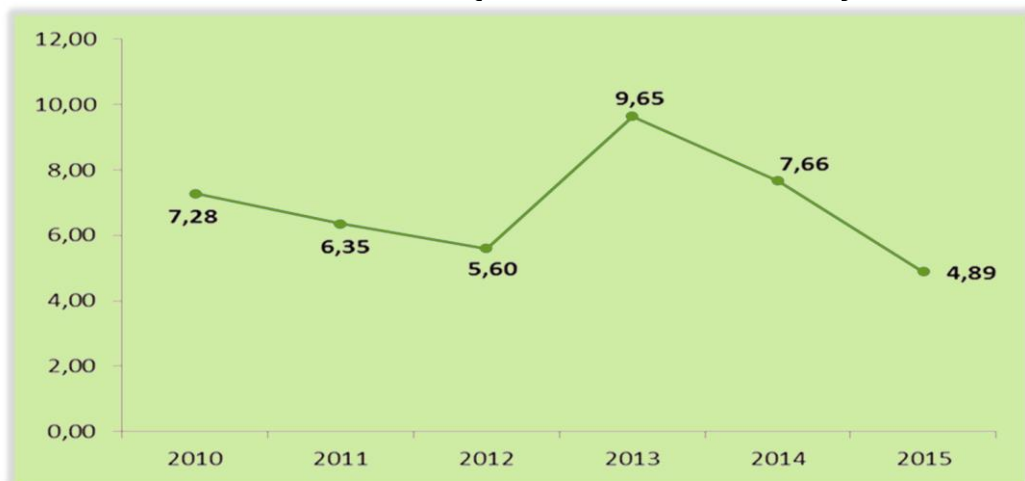


2) Laju Inflasi

Terjadinya gejolak harga akan menyebabkan stabilitas ekonomi masyarakat terganggu dan rentan menjadi masalah sosial-ekonomi terutama kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok untuk meredam terjadinya gejolak harga tersebut. Untuk mengetahui seberapa tinggi fluktuasi harga pasar yang terjadi di suatu wilayah, pemerintah daerah dapat menggunakan angka laju inflasi sebagai potret real terjadinya fluktuasi harga yang terjadi di tengah masyarakat dalam periode bulanan hingga tahunan.

Provinsi Kalimantan Timur melakukan penghitungan inflasi dibangun dari 3 kota IHK yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan. Selama tahun 2010-2012, inflasi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi stabil yang berarti stabilitas harga terjaga dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Kalimantan Timur tidak bergejolak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan hingga mencapai 9,65 pada inflasi tahunannya meskipun pada tahun selanjutnya menurun kembali hingga mencapai angka 7,66 persen pada tahun 2014 dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,89 persen.

Gambar 2.8
Nilai Inflasi Year on Year Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015 (Termasuk Kota Tarakan)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Kondisi laju inflasi yang semakin menurun ini perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk mengetahui penyebabnya apakah karena kelesuan perekonomian sehingga daya beli masyarakat menurun atau karena semakin meningkatnya pemerataan dan arus



komoditas barang kebutuhan pokok. Analisa lanjutan ini menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dari permasalahan perekonomian global yang melanda pada hampir seluruh wilayah nasional bahkan dunia internasional.

Tabel 2.5
Laju Inflasi Menurut Kota Inflasi Kalimantan Timur
dan Perbandingan dengan Inflasi Nasional, 2010-2015

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Tarakan	Kalimantan Timur	Nasional
2010	7,00	7,38	7,92	7,28	6,96
2011	6,26	6,44	6,43	6,35	3,79
2012	4,81	6,41	5,99	5,60	3,73
2013	10,37	8,56	10,35	9,65	8,38
2014	6,74	7,43	11,91	7,66	8,36
2015	4,24	6,26	3,42	4,89	3,35

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga terdapat variabel angka kemiskinan yang merupakan suatu gambaran dasar kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

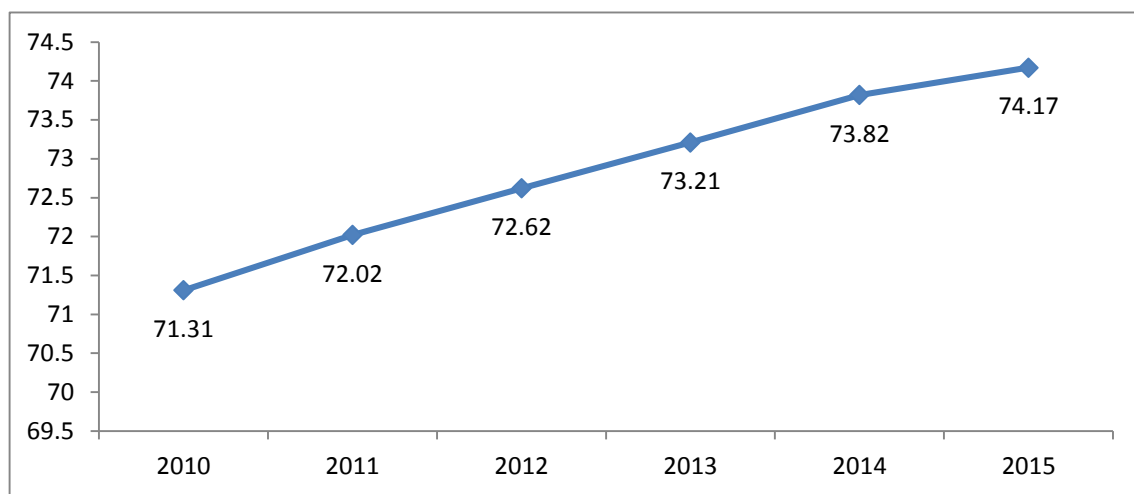
Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh



peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Indeks pembangunan manusia dihitung untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia dengan melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. IPM sendiri dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, IPM Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk kategori tinggi yang mencapai 71,31 dan sudah di atas rata-rata nasional bahkan peringkat 3 se-Indonesia. Di tahun-tahun berikutnya, IPM terus mengalami kenaikan hingga terakhir tahun 2015 angka IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai 74,17 dan menduduk peringkat 3 level nasional. Peningkatan angka IPM yang



konsisten di tiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan masing-masing komponen penyusunnya yang akan terdeskripsikan di bagian berikutnya.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010 - 2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Paser	66,54	67,11	68,18	69,61	69,87	70,30
2. Kutai Barat	65,90	66,92	67,14	68,13	68,91	69,34
3. Kutai Kartanegara	67,45	68,47	69,12	70,71	71,20	71,78
4. Kutai Timur	66,94	67,73	68,71	69,79	70,39	70,76
5. Berau	69,16	70,43	70,77	72,02	72,26	72,72
6. PPU	66,37	66,92	67,17	68,07	68,60	69,26
7. Mahakam Ulu				63,81	64,32	64,89
8. Balikpapan	75,55	76,02	76,56	77,53	77,93	78,18
9. Samarinda	75,85	77,05	77,34	77,84	78,39	78,69
10. Bontang	76,97	77,25	77,55	78,34	78,58	78,78
Provinsi Kalimantan Timur	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

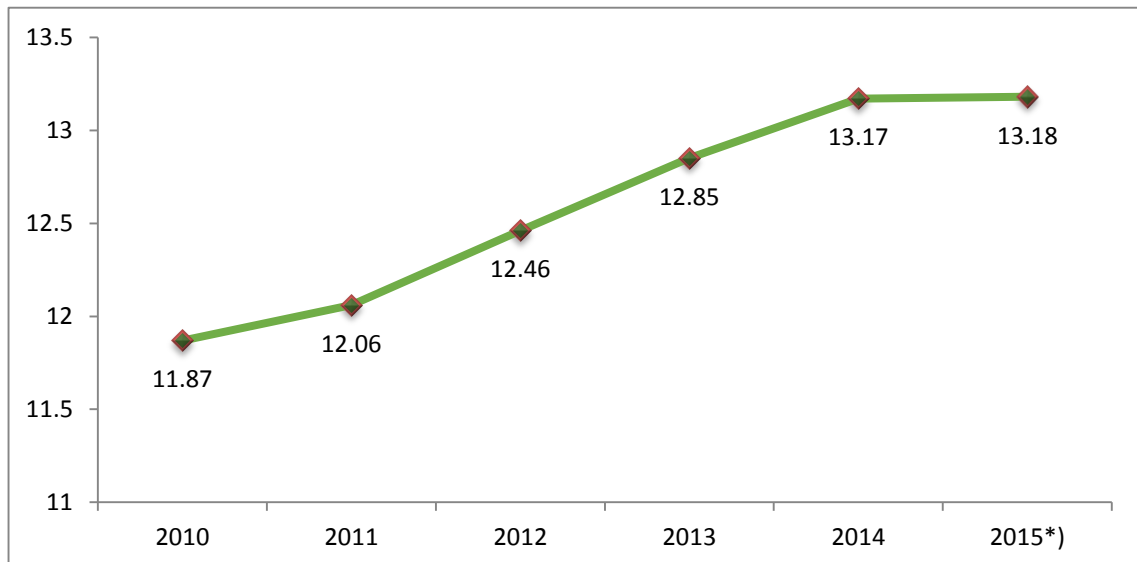
2) Angka Lama Sekolah dan Rata- Rata Lama Sekolah

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan, serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier.

Beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial adalah indikator di bidang pendidikan. Faktor pendidikan merupakan kunci peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada kesejahteraan masyarakat karena tingginya pendidikan masyarakat akan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Timur. Terkait dengan IPM, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.



Gambar 2.10
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015



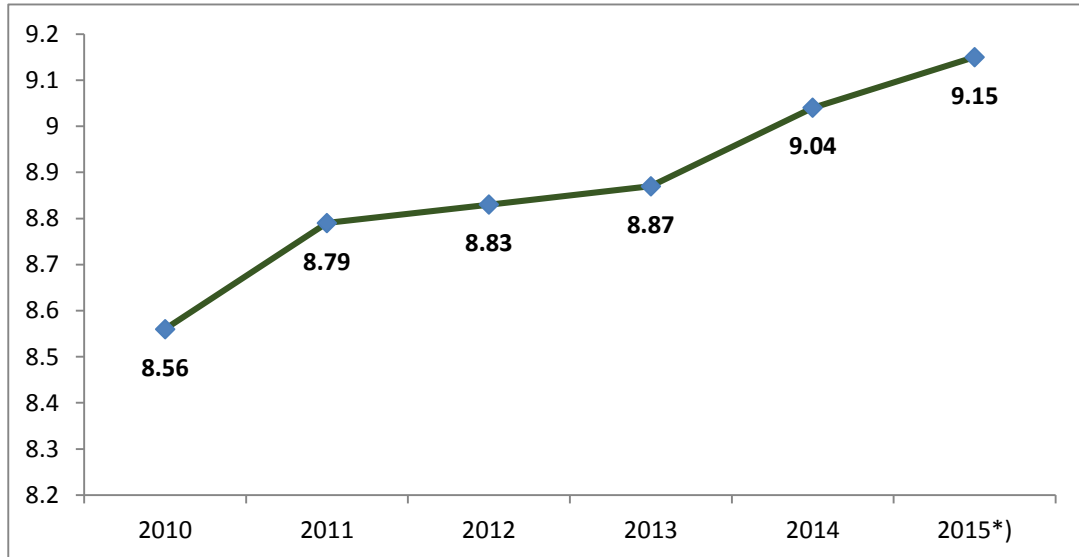
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Terlihat dengan jelas bahwa *progress* bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Trend yang meningkat di tiap tahunnya mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Hal ini akan lebih maksimal jika selain dalam segi kuantitas pendidikan juga diimbangi dari segi kualitas pendidikan sehingga output dari pendidikan bisa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Baik pada Angka Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 penduduk Provinsi Kalimantan Timur memiliki harapan mengenyam pendidikan hingga 13,18 tahun atau dapat mencapai pendidikan hingga perguruan tinggi semester ketiga. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 15 tahun ke atas adalah selama 9,15 tahun atau sudah mencapai pendidikan jenjang SMA tahun pertama.



Gambar 2.11
Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Tahun)



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015

Tabel 2.7
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2015

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Paser	10,91	11,13	11,88	12,52	12,63	12,65
2. Kutai Barat	11,01	11,54	11,57	11,58	12,14	12,30
3. Kutai Kartanegara	11,59	11,79	12,11	12,96	13,24	13,25
4. Kutai Timur	11,01	11,30	11,59	12,12	12,42	12,43
5. Berau	11,36	12,02	12,06	12,86	12,96	13,17
6. PPU	11,26	11,32	11,39	11,45	11,69	12,02
7. Mahakam Ulu	-	-	-	11,82	11,87	12,03
8. Balikpapan	12,07	12,27	12,47	13,15	13,43	13,46
9. Samarinda	13,07	13,52	13,64	13,76	14,16	14,17
10. Bontang	11,80	11,94	12,12	12,50	12,68	12,77
Provinsi Kalimantan Timur	11,87	12,06	12,46	12,85	13,17	13,18

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur



Tabel 2.8
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2015

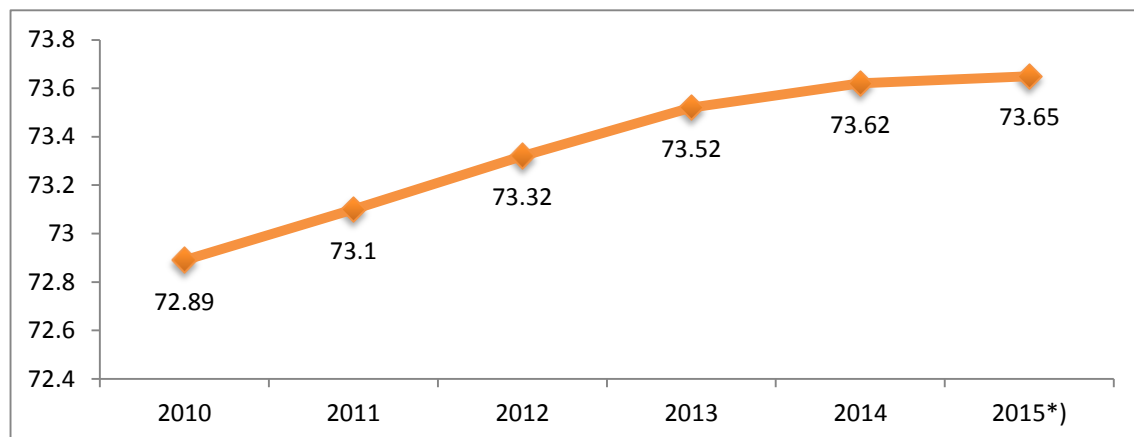
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Paser	7,48	7,60	7,78	7,96	7,99	8,12
2. Kutai Barat	7,26	7,46	7,53	7,89	7,98	8,02
3. Kutai Kartanegara	7,68	8,13	8,35	8,41	8,46	8,68
4. Kutai Timur	7,92	8,12	8,39	8,56	8,60	8,69
5. Berau	7,91	8,25	8,34	8,52	8,53	8,62
6. PPU	6,87	7,07	7,09	7,30	7,46	7,59
7. Mahakam Ulu	-	-	-	6,86	7,15	7,36
8. Balikpapan	10,02	10,16	10,29	10,39	10,41	10,44
9. Samarinda	9,42	9,97	10,00	10,20	10,26	10,31
10. Bontang	10,21	10,22	10,28	10,34	10,35	10,38
Provinsi Kalimantan Timur	8,56	8,79	8,83	8,87	9,04	9,15

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

3) Angka Harapan Hidup

Salah satu komponen penting pembentuk IPM dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan indikator di bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi baru lahir akan mencapai usia harapan hidup tertentu. Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2010, angka harapan hidup di Kalimantan Timur sebesar 72,89 tahun dan pada tahun 2015 meningkat hingga mencapai angka 73,65 tahun yang berarti bayi baru lahir pada tahun 2015 akan memiliki peluang hidup hingga usia 73-74 tahun.

Gambar 2.12
Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2015



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur



Tabel 2.9
Angka Harapan Hidup Kab/Kota (Tahun) Prov. Kaltim Tahun 2010 – 2015

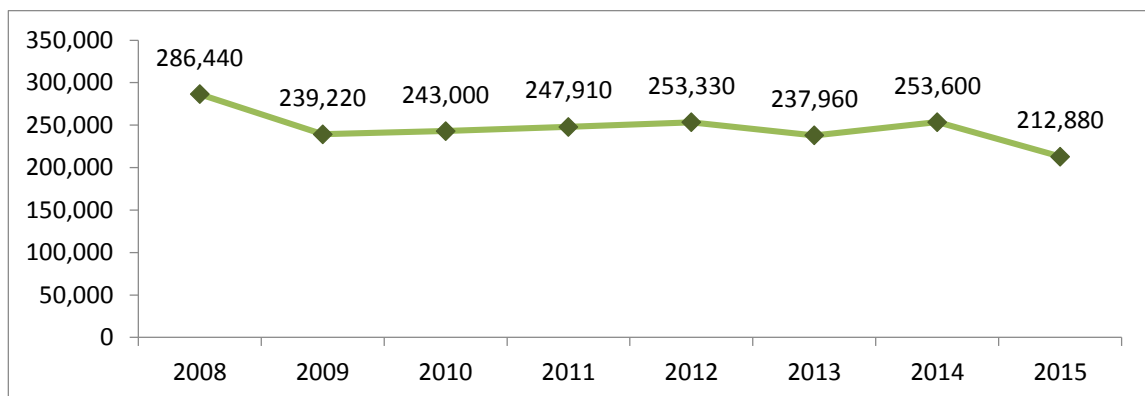
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Paser	71,80	71,83	71,85	71,86	71,88	71,98
2. Kutai Barat	71,74	71,82	71,90	71,96	72,03	72,19
3. Kutai Kartanegara	71,41	71,44	71,46	71,48	71,50	71,60
4. Kutai Timur	72,08	72,16	72,23	72,30	72,37	72,39
5. Berau	70,99	71,05	71,10	71,15	71,21	71,31
6. PPU	70,28	70,34	70,40	70,43	70,48	70,53
7. Mahakam Ulu	70,83	70,91	70,98	71,05	71,12	71,13
8. Balikpapan	73,90	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95
9. Samarinda	73,49	73,53	73,56	73,59	73,63	73,65
10. Bontang	73,63	73,65	73,66	73,67	73,68	73,69
Provinsi Kalimantan Timur	72,89	73,10	73,32	73,52	73,62	73,65

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

4) Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana pada tahun terakhir yakni 2015, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 212.880 jiwa. Fluktuatifnya jumlah penduduk miskin selain disebabkan karena peningkatan garis kemiskinan sebagai batasan kategori miskin, juga karena banyaknya penduduk yang pengeluarannya per kapitanya mendekati garis kemiskinan sehingga beberapa kondisi dalam kehidupan masyarakat dapat memberikan pengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi tersebut terutama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti inflasi, kenaikan harga BBM, hingga kebijakan-kebijakan mikro seperti program perlindungan sosial.

Gambar 2.13
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015

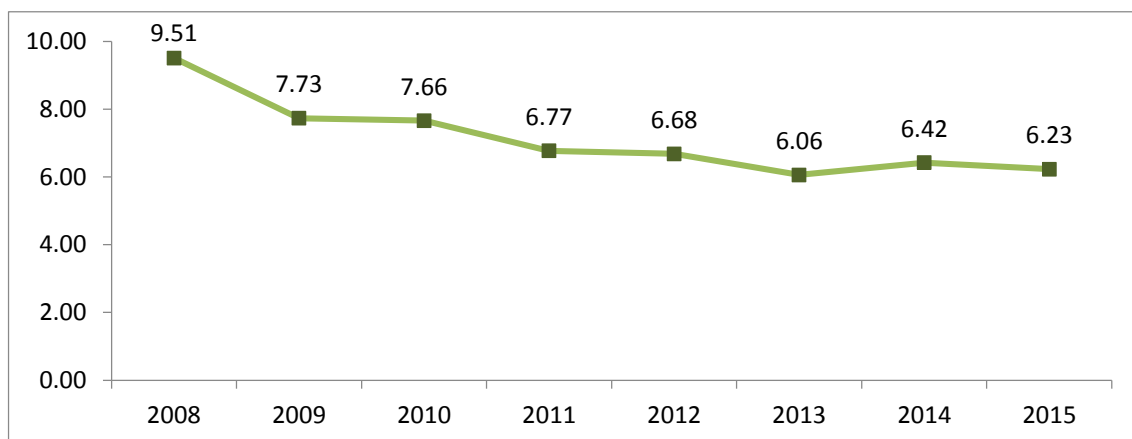


Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur



Jika dilihat dari angka kemiskinan, secara umum terjadi penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 mencapai titik terendah kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 6,06 persen. Namun pada tahun 2014 (kondisi maret) terjadi kenaikan angka kemiskinan hingga mencapai angka 6,42 persen dan kembali menurun pada tahun 2015 yakni sebesar 6,23 persen.

Gambar 2.14
Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015 (%)



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Jika dilihat angka kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, secara absolut kemiskinan paling banyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 52,5 ribu jiwa dan diikuti oleh Kota Samarinda yang mencapai 36,7 ribu jiwa. Sedangkan yang paling sedikit memiliki penduduk miskin adalah Kota Bontang yang hanya sebanyak 8,2 ribu penduduk miskin yang tinggal dan diikuti oleh kabupaten Berau dengan jumlah 9,7 ribu penduduk miskin. Namun jika dilihat berdasarkan persentase/angka kemiskinannya yang dibandingkan dengan total penduduk, maka angka kemiskinan paling besar adalah Kabupaten Kutai Timur (9,1%) dan Kabupaten Paser (7,87%).



Tabel 2.10
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota (%)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin (Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
1. Paser	348.444	20.340	7,87
2. Kutai Barat	385.008	12.920	7,53
3. Mahakam Ulu			
4. Kutai Kartanegara	371.791	52.530	7,43
5. Kutai Timur	408.224	28.300	9,10
6. Berau	404.665	9.770	4,76
7. Penajam Pasir Utara	341.499	11.580	7,56
8. Balikpapan	460.297	15.020	2,46
9. Samarinda	493.763	36.650	4,56
10. Bontang	454.392	8.210	5,10

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur di setiap jenjang usia sekolah terus mengalami trend kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat.



Tabel 2.11
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011-2015

Angka Partisipasi Sekolah					
Usia Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
7-12	98,68	99,17	99,46	99,33	99,63
13-15	92,78	96,53	96,62	97,99	97,92
16-18	67,60	71,16	73,10	80,50	80,68
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SD	104,83	107,76	107,57	111,04	112,61
SLTP	97,62	93,24	91,06	91,49	97,90
SLTA	73,00	80,08	82,21	85,54	90,31
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SD	92,23	94,37	95,91	96,70	97,00
SLTP	72,40	74,37	76,10	78,73	79,06
SLTA	54,58	59,75	62,22	67,03	67,78

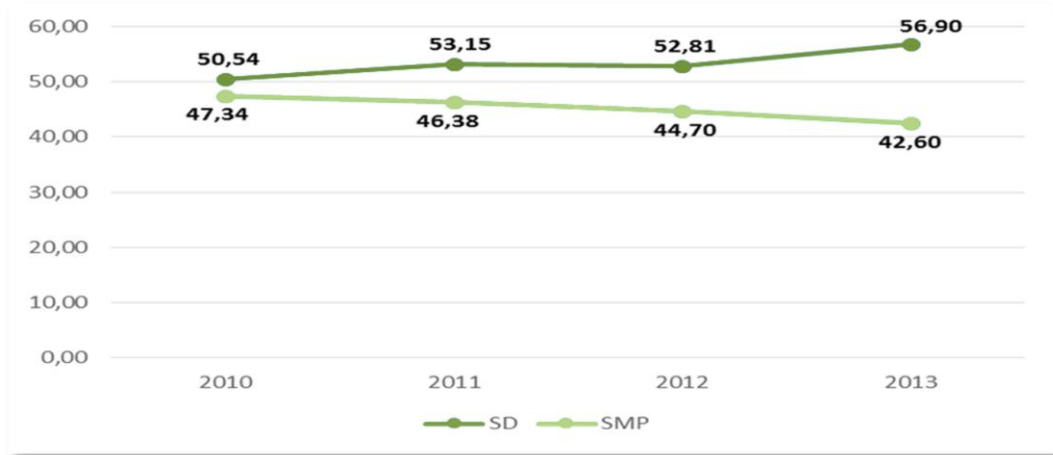
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

a) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah. Capaian ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah. Pada jenjang SD/MI meningkat dari 50,54 pada tahun 2010 menjadi 56,90 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 57 gedung sekolah SD/MI yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 47,34 pada tahun 2009 menjadi 42,60 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 43 gedung sekolah SMP/MTs yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 13-15 tahun.



Gambar 2.15
Rasio Ketersediaan Sekolah
Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
di Prov. Kaltim Tahun 2010 – 2013



Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur

b) Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah

Rasio Murid-Guru ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.12
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.648	364.304	21.945	16,60	221,06
Swasta	186	49.620	2.985	16,62	266,77
MI	114	20.888	1.593	13,11	183,23
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	408	123.944	7.505	16,51	303,78
Swasta	181	28.475	2.079	13,70	157,32
MTs	147	25.491	2.684	9,50	173,41
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	135	53.242	3.241	16,43	394,39
Swasta	75	9.157	757	12,10	122,09
MA	60	7.435	1.128	6,59	123,92



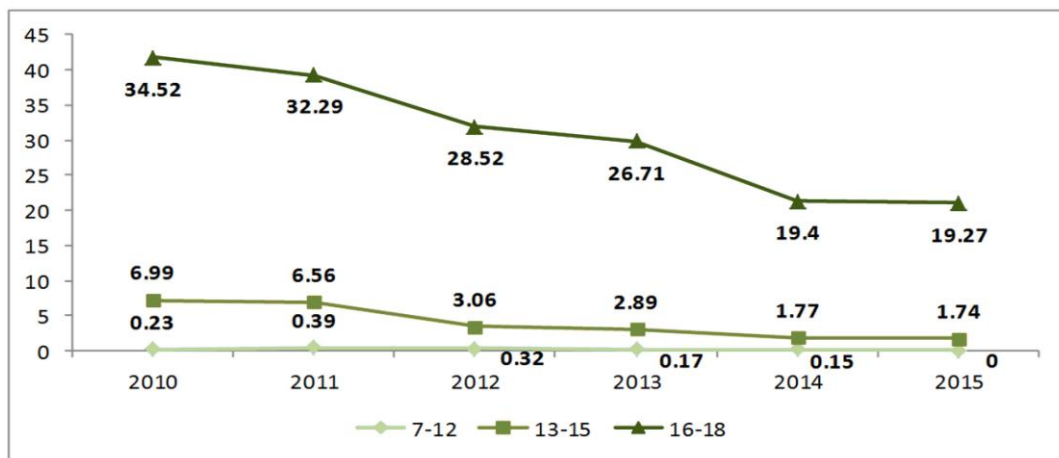
Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	82	40.499	2.532	15,99	493,89
Swasta	125	28.228	1.669	16,91	225,82

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur

c) Angka Putus Sekolah

Secara umum angka putus sekolah di semua usia pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan angka putus sekolah paling signifikan adalah angka putus sekolah pada penduduk usia sekolah 16-18 tahun (usia SMA) dimana pada tahun 2010 mencapai 34,52 persen dan menurun tajam menjadi 19,40 persen pada tahun 2014. Sedangkan secara umum, angka putus sekolah paling sedikit berada pada jenjang usia sekolah SD (7-12 tahun) yang hanya sebesar 0,15 persen saja pada tahun 2014.

Gambar 2. 16
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2015



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

2) Kesehatan

Jumlah tenaga medis dan paramedis selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perkembangan cukup signifikan bila dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain. Peningkatan jumlah dokter, tenaga medis maupun paramedis akan berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan berobat maupun konsultasi kesehatan. Secara umum, hal ini terlihat dari rasio antara dokter dan penduduk yang semakin lama semakin menurun dimana pada tahun 2014 rasio menurun hingga mencapai 2.074 penduduk per dokternya.



Peningkatan indikator kesehatan tidak hanya terjadi dalam hal peningkatan tenaga medis dan paramedis saja, masyarakat yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan terlatih juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, persentase penduduk yang mendapat pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 88,76 persen meskipun pada tahun sebelumnya sempat mencapai 90,83 persen.

Jika melihat peningkatan mutu dan pelayanan di bidang kesehatan secara keseluruhan, tidak salah jika indikator kesehatan masyarakat seperti angka usia harapan hidup meningkat dari 72,89 pada tahun 2010 menjadi 73,62 pada tahun 2014. Dari segi kesehatan masyarakat, keluhan kesehatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan hingga mencapai 22,33 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.13
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dokter Umum	665	673	794	1.007	908	1.050
2.	Dokter Spesialis	281	215	276	569	359	347
3.	Dokter Gigi	213	276	262	290	269	335
4.	Perawat	1.551	1.627	1.627	3.791	3.027	7.178
5.	Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV Lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retviral.	-	-	-	-	63.81	63.81
6.	Rasio Penduduk : Dokter	2.365	2.691	2.402	1.756	2.154	1.978
7.	Rasio Bidan (%)	-	0.52	0.52	0.79	0.78	0.83
8.	Angka Morbiditas (%)	16,88	11,74	12,19	9,18	10,65	n/a
9.	Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	87,35	88,5	90,83	92,02	92,9	n/a
10.	Penduduk dengan pengobatan sendiri	71,95	65,47	70,39	-		n/a
11.	Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	30,31	22,46	22,33	18,99	21,22	n/a
12.	Jumlah Kematian Bayi (berusia kurang 1 Tahun)	-	467	963	414	151	69
13.	Angka Kematian Balita	-	5,20	9,10	29	10	n/a
14.	Angka Kematian Ibu	110,00	150,99	161,21	177,21	157,22	n/a
15.	Usia Harapan Hidup	72,89	73,10	73,32	73,52	73,62	73,65
16.	Persentase Gizi Balita (Gizi Baik)	93,23	95,6	95,6	96,10	96,30	n/a

Sumber : Data dan Informasi Pembangunan Kalimantan Timur (dan BPS diolah)



2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Jumlah investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah investor merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga mengembangkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian. Perkembangan jumlah investor PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015

TAHUN	PMDN	PMA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	15	76	91
2011	78	53	131
2012	36	124	160
2013	236	313	549
2014	48	54	102
2015	124	36	160

Sumber: BPMPTSP Prov. Kalimantan Timur

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel. 2.15
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015

Tahun	PMDN			
	Persetujuan (Juta Rp)		Realisasi (Juta Rp)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	15	163.812,38	48	7.881.289,78
2011	78	71.229.379,88	56	16.196.330,39
2012	36	9.007.225,70	44	7.709.270,00
2013	236	34.110.240,30	103	18.441.377,30
2014	48	41.671.586,67	60	12.983.049,70
2015	124	23.935.504,40	143	9.611.313,10



PMDN				
Tahun	Persetujuan (Juta Rp)		Realisasi (Juta Rp)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
PMA				
Tahun	Persetujuan (US \$ 000)		Realisasi (US \$ 000)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2010	76	44.848.379,58	56	988.710,14
2011	53	12.876.750,92	172	1.348.060,81
2012	124	5.771.255,50	167	2.529.900,00
2013	313	7.000.052,40	331	1.324.197,42
2014	24	3.146.114,70	297	2.145.665,10
2015	36	5.396.492,70	420	2.381.442,30

Sumber: BPMPTSP Prov. Kalimantan Timur

3. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap akan melihat bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Selanjutnya rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi baik PMDN maupun PMA di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011-2015

PMDN						
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.227	50.240	31.905	9.505	24.825
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	47	38	92	60	143
3	Rasio daya serap tenaga kerja	260,15	1.322,11	346,79	158,42	173,6
PMA						
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	9.001	35.579	65.706	27.055	66.230
2	Jumlah proyek seluruh PMA	135	152	331	297	420
3	Rasio daya serap tenaga kerja	66,67	234,07	198,51	91,09	157,69

Sumber: BPMPTSP Prov. Kalimantan Timur



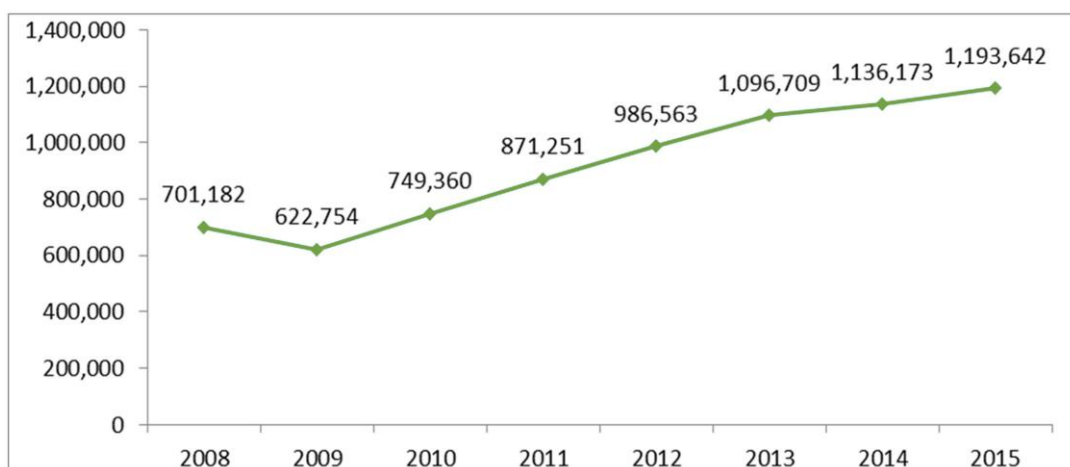
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama empat tahun terakhir hingga pada tahun 2015 mencapai angka Rp. 1.193.642,-. Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (53,98%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan (46,02%). Bergesernya fokus konsumsi penduduk dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan, mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik karena pengeluaran konsumsi sudah mulai memasuki barang sekunder dan tersier.

Gambar 2.17
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Bulan (Rp)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

2. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya. NTP di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir bergerak fluktuatif dan sulit diprediksi. Jika dilihat berdasarkan nilai tukar per sub sektornya, terdapat kenaikan pada NTP sektor Tanaman



Perkebunan Rakyat. Sedangkan terjadi penurunan pada subsektor hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan perikanan.

Nilai Tukar Petani subsektor tertinggi adalah pada tanaman perkebunan rakyat dimana mencapai 102,99, mengalami kenaikan 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP yang sangat signifikan dibandingkan subsektor lainnya yakni sebesar -3,37 persen.

Tabel 2.17
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012-2015 (2012=100)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	129,43	130,69	111,58	117
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	132,02	137,14	111,66	118,66
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,04	95,30	99,93	98,61

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Tabel 2.18
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Sub sektor,
Tahun 2013-2015 (2012=100)

No	Uraian	NTP			% Perubahan
		2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NTP Gabungan		95,30	99,93	98,61	-1,32
1	Tanaman Pangan	86,90	96,41	95,29	-1,12
2	Hortikultura	101,55	96,65	93,28	-3,37
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	104,45	102,24	102,99	0,75
4	Peternakan	114,72	104,02	102,79	-1,23
5	Perikanan	88,98	101,46	98,38	-3,07

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan). Dapat dilihat pada tabel 2.19.



Tabel 2.19
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2015

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	385.993	467.532	535.643	588.003	627.372	644.291
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	749.360	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	51,51	53,66	54,29	53,62	55,22	53,98

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Luas wilayah produktif

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11



No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
Jumlah		2.234.602	3.982.325	56,11

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

2. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.

Penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Kalimantan Timur seperti listrik dan air bersih masih belum maksimal dalam pencapaian pembangunannya. Hal ini terutama dilihat dari sisi pemerataan fasilitas air bersih dan listrik dimana daerah-daerah tertentu belum merasakan fasilitas infrastruktur dasar tersebut. Meskipun begitu, dari waktu ke waktu pemerintah terus mengupayakan pengembangan fasilitas air bersih dan listrik dimana terlihat kapasitas produksi efektif yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 6.751 liter/detik pada tahun 2014.

Tabel 2.21
Jumlah Perusahaan Air Minum dan Kapasitas Produksinya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2014

NO	URAIAN	2012	2013	2014
1	Jumlah Perusahaan Air Minum (Unit)	14	14	14
2	Kapasitas Produksi Potensial (lt/dtk)	6.549	7.083	7.264
3	Kapasitas Produksi Efektif (lt/dtk)	5.710	5.980	6.751

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur

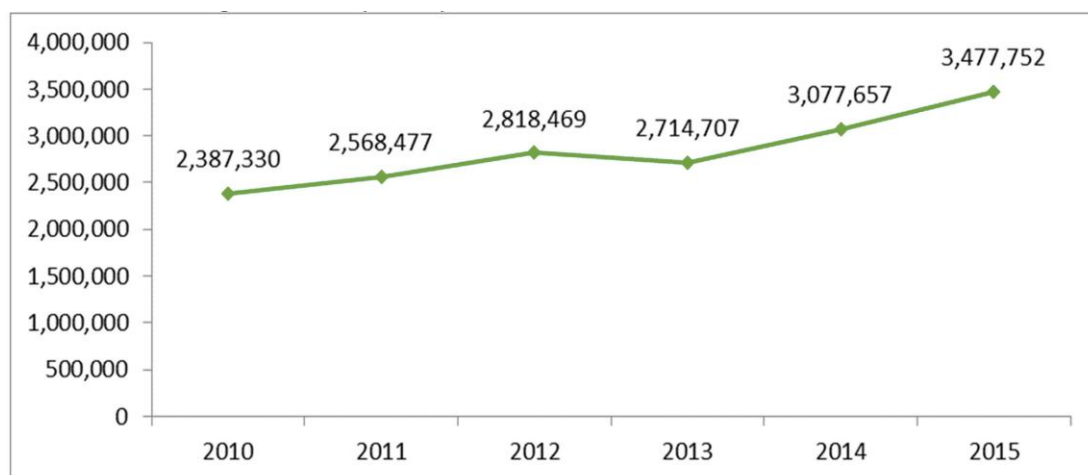
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Air Baku, peningkatan produktifitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, pemerintah sedang membangun prasarana



sumber daya air meliputi pembangunan Bendungan Marangkayu dan Muara Wain dengan kapasitas mencapai 12 juta m² (output 250 lt/dt) serta pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 23.278 Meter.

Sedangkan pada fasilitas listrik, pengembangan bidang kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif tiap tahunnya namun memiliki tren meningkat secara umum. Hal ini terlihat pada peningkatan produksi tenaga listrik yang mencapai 3.477.752 MWh pada tahun 2015. Meskipun sebagian besar pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Timur adalah rumah tangga (694.681 pelanggan rumah tangga), namun secara distribusi persebarannya masih memusat pada wilayah perkotaan sedangkan untuk daerah pelosok/terpencil belum merasakan akses listrik yang memadai.

Gambar 2.18
Produksi Tenaga Listrik (MWh)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Timur

Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat terlihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu,

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.



Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 94,87 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 94,87 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) di bawah rasio nasional yaitu 115 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki beberapa kendala seperti :

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil, serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap baik nasional maupun provinsi dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum ada kesepakatan pembiayaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

Berdasarkan data Dinas PU untuk panjang jalan baik kabupaten, provinsi, maupun nasional dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Panjang Jalan menurut status dan jenis permukaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

NO	STATUS	ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
1	Nasional	1.529,03	0,00	0,00	175,76
2	Provinsi	1.022,45	281,58	182,80	101,85
3	Kabupaten	2.543,64	1.824,48	2.804,36	1.811,10
	Total	5.095,17	2.106,06	2.987,16	2.088,71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur



sosial budaya. Hal ini dikarenakan keamanan berinvestasi akan menjamin keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berbondong-bondong menanamkan modal dan mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Angka kriminalitas di Kalimantan Timur cukup fluktuatif dimana pada tahun 2012 angka kriminalitas mencapai 31,10 yang berarti terjadi 31-32 tindak kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk, sedangkan pada tahun terakhir yakni 2015, angka kriminalitas menurun hingga 29,10 yang berarti terdapat 29 kasus kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk.

Tabel 2.23
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015
1.	Kasus Narkoba	589	761	749	1.037
2.	Kasus Pembunuhan	47	29	25	39
3.	Kejahatan Seksual	33	26	17	19
4.	Kasus Penganiayaan	271	399	829	780
5.	Kasus Pencurian	602	666	2.134	2.039
6.	Kasus Penipuan	573	623	676	477
7.	Kasus Pemalsuan uang	5	7	1	2
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun yang Dilaporkan	9.950	10.173	9.918	9.972
9.	Jumlah Penduduk	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638
10.	Angka Kriminalitas	31,10	31,05	29,59	29,10

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

2) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Pada tahun 2014 terjadi demonstrasi sebanyak 447 kali dimana terjadi kenaikan jika dibanding tahun



sebelumnya yang berjumlah 477 kali. Secara rinci, jumlah demonstrasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Demonstrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang Politik	43	6	6	20	14
2	Ekonomi	44	226	226	250	236
3	Sosial	274	156	156	207	197
Jumlah Unjuk Rasa		361	388	388	477	447

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

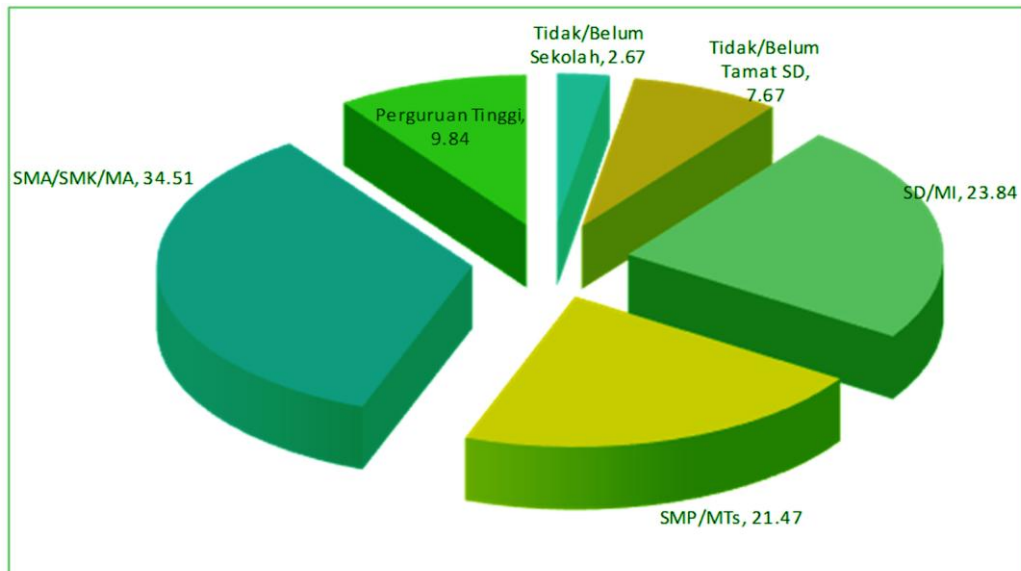
Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Kualitas Pendidikan Penduduk

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah. Berikut persentase penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 10 tahun ke atas berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.

Gambar 2.19
Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Dari gambar di atas terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,84 persen saja. Hal ini cukup mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi minimnya penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Selain itu, sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (34,51%) dan SD (23,84%) dimana hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* yang terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur.

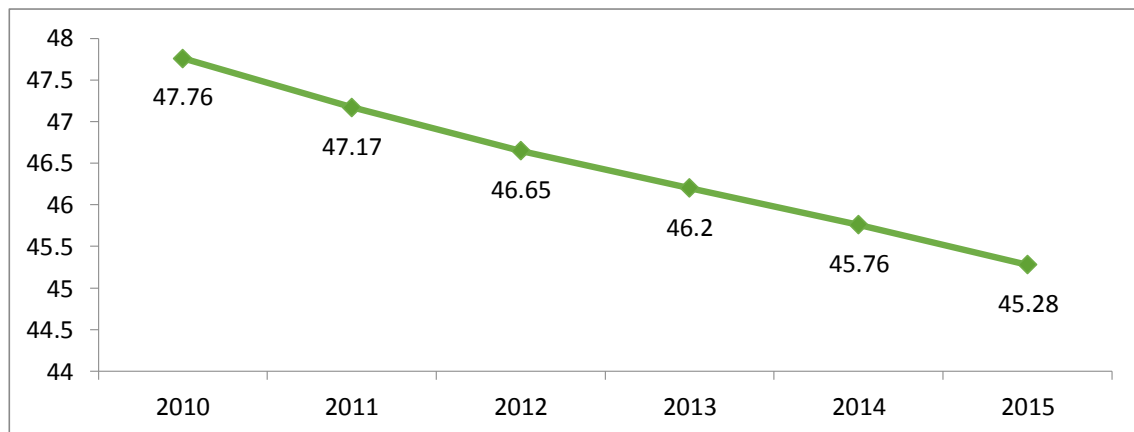
B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Selain dari kualitas pendidikan, produktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun sehingga bisa



diindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.20
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25
Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja
Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	2,25	1,57	-1,28	
1.3	Laju Inflasi	%	5,60	9,65	7,66	4,89	
1.4	Pendapatan per Kapita	Juta Rp		64,12	61,17	50,63	
1.5	Indeks Gini		0,3555	0,3341	0,3355	0,32	
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank						
	- 40% Rendah	%	18,95	19,77	19,88	n/a	
	- 40% Sedang	%	36,37	37,67	36,96	n/a	
	- 20% Tinggi	%	44,68	42,55	43,06	n/a	
1.7	Indeks Ketimpangan Kemakmuran		0,3555	0,3341	0,3355	n/a	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.8	Persentase penduduk miskin	%	6,68	6,06	6,42	6,23	
1.9	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	Kasus	6.405	6.686	6.722	4.199	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pendidikan						
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,46	12,85	13,17	13,18	
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,83	8,87	9,04	9,15	
1.3	APK SD/MI	%	107,76	107,57	111,04	112,61	
1.4	APK SMP/MTs	%	93,24	91,06	91,49	97,90	
1.5	APK SMA/SMK/ MA	%	80,08	82,21	85,54	90,31	
1.6	APM SD/ MI	%	94,37	95,91	96,70	97,00	
1.7	APM SMP/MTs	%	74,37	76,10	78,73	79,06	
1.8	APM SMA/SMK/MA	%	59,75	62,22	67,03	67,78	
2	Kesehatan						
2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,32	73,52	73,62	73,65	
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		161,21	177,21	157,22	177	
2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		9	29	10	21	
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	4,40	3,90	3,70	3,90	
3	Pertanahan						
3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan	%	-	-	-	n/a	
4	Ketenagakerjaan						
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,80	7,94	7,54	7,50	
Fokus Budaya dan Olahraga							
1	Kebudayaan						
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	622	676	735	861	
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit per 10.000 penduduk	16	17	17	17	
2	Pemuda dan Olahraga						
2.1	Jumlah Klub Olahraga	unit	1.021	1.045	1.045	1.050	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	47	47	55	97	
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib							
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Dasar						
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun	%	99,17	99,46	99,33	99,63	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.1.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SD Negeri	%	196	215,24	220,19	221,06	
	- SD Swasta	%	230	248,83	260,04	266,77	
	- MI	%	154	124,89	165,96	183,23	
1.1.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SD Negeri	%	13	14	16,48	16,60	
	- SD Swasta	%	13	14	15,95	16,62	
	- MI	%	13	14	12,33	13,11	
1.1.4	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		4.799	4.799	n/a	n/a	
1.2	Pendidikan menengah						
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah						
	- 13-15 tahun	%	96,53	96,62	97,99	97,92	
	- 16-18 tahun	%	71,16	73,10	80,32	80,68	
1.2.2	Rasio murid terhadap sekolah						
	- SMP Negeri	%	266	285,97	299,71	303,78	
	- SMP Swasta	%	141	148,51	155,96	157,32	
	- MTs	%	156	153,11	164,54	173,41	
	- SMA Negeri	%	371	371,26	370,11	394,39	
	- SMA Swasta	%	200	112,76	111,29	122,09	
	- MA	%	111	120,18	121,60	123,92	
	- SMK	%	332	264,04	291,87	332,01	
1.2.3	Rasio murid terhadap guru						
	- SMP Negeri	%	11	13	15,60	16,51	
	- SMP Swasta	%	9	11	11,23	13,70	
	- MTs	%	12	11	9,63	9,50	
	- SMA Negeri	%	13	14	13,95	16,43	
	- SMA Swasta	%	12	8	7,38	12,10	
	- MA	%	5	8	6,69	6,59	
	- SMK	%	12	12	11,21	16,36	
1.3	Angka Putus Sekolah						
	- SD/MI	%	0,32	0,17	0,15	0,16	
	- SMP/MTa	%	3,04	2,89	1,77	1,44	
	- SMA/SMK/MA	%	28,39	26,71	19,40	18,02	
1.4	Angka Kelulusan						
	- SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- SMP/MTs	%	99,74	99,72	100,00	100,00	
	- SMA/SMK/MA	%	99,64	99,63	99,96	100,00	
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	n/a	n/a	n/a	35.879	
2	Kesehatan						
2.1	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	2.402	1.756	2.154	1.978	
2.2	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Orang	4.324	4.380	4.097	4.036	
2.3	Rasio posyandu per satuan balita	%	1,22	1,20	1,19	11,2	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	27,70	27,17	33,28	58,04	
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	Kelahiran	90,83	92,02	92,9	91,26	
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	22,33	18,99	21,22	21,22	
2.7	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	12,19	9,18	10,65	9,18	
2.8	Cakupan Puskesmas	%	114,67	182,35	174,76	174,76	
3	Pekerjaan Umum						
3.1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.762,07	1.628,07	1.628,07	
3.1.1	Kondisi Mantap	%	77,67	48,65	50,08	52,67	
3.2	Proporsi kondisi jalan baik	%	41,56	50,20	54,95	55,46	
3.3	Irigasi dalam kondisi baik	m	17.470	12.825	15.839,5	9.206	
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	81,89	91,09	76,19	n/a	
3.5	Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	%	-	-	-	n/a	
4	Perumahan						
4.1	Persentase rumahtangga dengan sumber air bersih	%	82,18	80,87	85,35	n/a	
4.2	Persentase rumah tangga dengan air minum layak	%	-	-	78,48	n/a	
4.3	Persentase rumahtangga dengan sanitasi layak	%	81,89	91,09	76,19	n/a	
4.4	Persentase rumahtangga penerangan listrik	%	94,63	96,13	96,57	n/a	
4.5	Persentase rumah layak huni	%	-	-	-	n/a	
5	Penataan Ruang						
5.1	Luas lahan pemukiman		-	-	0,76	n/a	
6	Perhubungan						
6.1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	1.928.783	2.269.650	2.413.874	2.640.301	
6.2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1.185	1.094	1.041	736	
6.3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	6,04	5,12	5,00	5,39	
6.4	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	693.487	531.289	369.779	652.709	
6.5	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	571.285	494.985	290.611	342.802	
6.6	Jumlah penumpang angkutan udara yang dating	Orang	3.791.788	3.642.539	3.791.629	3.494.456	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
6.7	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3.689.629	3.593.262	3.955.136	3.693.028	
7	Lingkungan Hidup						
7.1	Persentase penduduk berakses air minum	%	82,18	80,87	85,35	n/a	
7.2	Indeks kualitas air sungai		7,15	7,59	3,04	n/a	
7.3	Penegakan hukum lingkungan	%	81,82	86,21	86,36	86,36	
7.4	Persentase sampah terangkut per hari	%	65,95	127,39	90,33	n/a	
8	Kependudukan dan Catatan Sipil						
8.1	Kepemilikan KTP	Orang		1.425.905	1.092.011	1.148.718	
8.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	1.429.810	1.351.261	695.301	1.071.135	
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
9.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan dilembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	Orang	n/a	n/a	379	379	
9.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	42,01	39,84	41,14	n/a	
9.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30.919	30.978	30.927	30.927	
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
10.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	69,78	67,46	70,29	65,51	
10.2	Banyaknya peserta baru KB	Orang	83.944	70.336	76.760	59.807	
10.3	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	%	21,59	22,81	24,02	40,80	
11	Sosial						
11.1	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	134	111	118	
11.2	Banyaknya anak yang di asuh di panti asuhan	Anak	7.938	7.368	7.296	7.296	
11.3	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4	4	
11.4	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	205	200	267	277	
12	Ketenagakerjaan						
12.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,64	63,53	63,48	62,39	
12.2	Persentase penduduk bekerja thd usia kerja	%	60,71	58,48	58,70	57,71	
13	Koperasi usaha kecil dan menengah						
13.1	Jumlah Koperasi	Unit	6.140	5.916	5.319	5.287	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
13.2	Jumlah UMKM berdasarkan skala Usaha Mikro dan Kecil	Unit	426.530	444.425	446.075	463.917	
14	Penanaman Modal						
14.1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	7.709.270,00	18.441.377,30	12.983.049,70	9.611.313,10	
14.2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	2.529.900,00	1.324.197,42	2.145.665,10	2.381.442,30	
15	Kebudayaan						
15.1	Jumlah event budaya	Event	32	32	32	54	
15.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	64	64	64	64	
15.3	Jumlah museum	Unit	8	8	11	11	
15.4	Jumlah taman budaya	Unit	2	2	2	1	
15.5	Jumlah desa kerajinan tradisional	Desa	8	6	6	12	
16	Kepemudaan						
16.1	Jumlah karang taruna	Unit	1.332	1.322	1.251	1.251	
17	Ketahanan Pangan						
17.1	Ketersediaan pangan utama	%	72,55	74,43	68,89	67,62	
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
18.1	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	Unit	810	1.018	1.145	1.146	
18.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	917	826	161		
19	Statistik						
19.1	Publikasi "Kabupaten/Kota Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Publikasi "PDRB Kabupaten/Kota"		Ada	Ada	Ada	Ada	
20	Komunikasi dan Informatika						
20.1	Website milik pemerintah daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	
20.2	Persentase penduduk menggunakan HP	%	94,74	-	96,27	n/a	
21	Perpustakaan						
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	1.622	1.743	1.810	1.830	
22	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
22.1	Jumlah PNS	Orang	7.420	7.235	7.163	7.234	
22.2	Opini BPK		WDP	WTP	WDP	WTP	
22.3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		-	68,00	72,32	76,65	
Fokus Urusan Pilihan							
1	Pertanian						
1.1	Produksi padi	Ton	424.670	439.439	426.567	408.782	
1.2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Kw	41,65	42,70	42,55	41,20	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	6,42	6,62	7,96	7,34	
1.4	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,27	0,27	0,30	0,25	
1.5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,47	2,55	3,59	3,63	
2	Kehutanan						
2.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,19	1,13	1,18	1,38	
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB	%	57,11	55,15	49,85	44,54	
4	Pariwisata						
4.1	Jumlah wisnus dan mancanegara	Orang	1.363.448	1.453.962	1.530.894	2.186.748	
4.2	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,62	0,66	0,72	0,84	
5	Kelautan dan Perikanan						
5.1	Produksi Perikanan	Ton	438.744,2	214.651,1	211.792,8	217.163	
5.2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,07	1,19	1,32	1,48	
6	Perdagangan						
6.1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,23	4,29	4,60	5,23	
6.2	Nilai ekspor	000 US	33.792.548	31.003.083	25.825.021	17.410.960	
6.3	Nilai Impor	000 US	8.143.540	9.512.101	8.471.495	5.506.160	
6.4	Neraca perdagangan luar negeri	000 US	25.649.008	21.490.982	17.353.526	11.904.800	
7	Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,60	17,96	19,49	21,05	
7.2	Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	4,83	5,96	6,31	7,34	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642	
1.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	450.920	508.706	508.801	549.351	
1.3	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	535.643	588.003	627.372	644.291	
1.4	PDRB per kapita	Juta Rp	138,74	143,92	145,86	143,25	
1.5	Pendapatan regional per kapita	Juta Rp	-	64,12	61,17	50,63	
1.6	Jumlah Koperasi	Unit	6.140	5.916	5.319	5.287	
2	Pertanian						
2.1	Nilai tukar petani	%	98,04	95,30	99,93	98,61	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Perhubungan						
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	m	6,04	5,12	5,00	5,39	
2	Penataan Ruang						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW		-	-	-	n/a	
2.2	Luas wilayah produktif		-	-	-	n/a	
2.3	Luas wilayah Industri		-	-	-	0,31	
2.4	Luas wilayah perkotaan		-	-	-	n/a	
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
3.1	Jumlah kantor perbankan	Unit	527	580	587	611	
3.2	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	420	542	349	667	
3.3	Jumlah rumah makan/ restoran	Unit	1.086	1.340	716	1.530	
4	Lingkungan Hidup						
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	82,18	80,87	85,35	87,36	
5	Komunikasi dan Informatika						
5.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2.818.468,89	2.714.707,01	3.077.657,00	n/a	
5.2	Jumlah pelanggan listrik	titik	661.386	663.582	739.134	n/a	
Fokus Iklim Berinvestasi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp	29.550.456,1	30.892.360,8	37.872.764,87	39.379.341,85	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				Ket.
			2012	2013	2014	2015	
Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,62	73,21	73,82	73,82	
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		61,84	63,12	53,74	53,74	
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		84,33	84,69	84,75	84,75	
1.4	Rasio ketergantungan		46,65	46,20	45,76	45,28	

Sumber: Gabungan dari berbagai sumber (diolah)

2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan pembuatan program dan kegiatan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya untuk menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (*outcome*). Indikator kinerja yang dimaksud merupakan suatu variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 ini, evaluasi pembangunan menggunakan evaluasi RPJMD tahun kedua yakni tahun 2015. Secara umum,



hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah. Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program dan kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan selanjutnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

2.2.1. Kinerja RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program-program dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan matriks evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 diperoleh data pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

Tabel. 2.26
Program, Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

Jumlah Program	Pagu (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		Predikat Kinerja	
			K	Rp	K	Rp
604	5.019.910.598	4.470.989.576	91,47	83,88	Sangat tinggi	Tinggi

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Pagu program dan realisasi tersebut di atas, adalah untuk belanja langsung. Secara lebih rinci, hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang dikelompokkan berdasarkan SKPD, sebagaimana pada table 2.27 berikut.



Tabel 2.27
Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RKPD		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan RKPD (%)			
				Capaian Kinerja		Predikat Kinerja	
				K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	325.693.291.818	91,43	56,69	82,03	R	T
2	Dinas Kesehatan	50.963.099.671	70,30	95,93	68,09	ST	S
3	RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda	377.431.200.657	92,68	93,85	82,73	ST	T
4	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	267.537.951.791	98,32	112,01	86,63	ST	T
5	RSUD Tarakan	131.565.482.859	71,93	91,82	84,89	ST	T
6	RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam	38.085.524.831	93,87	92,58	90,19	ST	T
7	Dinas Pekerjaan Umum	1.707.428.224.625	82,19	85,74	84,56	T	T
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.638.226.845	84,42	90,84	83,03	T	T
9	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	15.744.250.304	92,63	99,93	86,28	ST	T
10	Dinas Perhubungan	281.814.383.651	93,65	94,22	84,25	ST	T
11	Badan Lingkungan Hidup	12.698.654.687	78,81	99,89	81,32	ST	T
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	8.635.687.010	90,90	92,17	90,43	ST	T
13	Dinas Sosial	27.527.420.071	76,83	74,49	84,12	S	T
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.222.926.838	83,18	91,47	78,37	ST	T
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	75.367.788.561	86,17	88,75	85,52	ST	T
16	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	13.850.537.388	89,82	92,03	86,29	ST	T
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	87.112.408.289	75,35	96,96	73,93	ST	S
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.677.823.273	93,24	93,00	85,77	ST	T
19	Satuan Polisi Pamong Praja	8.876.653.598	97,84	135,04	96,50	ST	ST
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.054.697.942	78,68	93,43	79,32	ST	T
21	Biro Umum	52.185.667.872	82,76	84,49	72,77	T	S
22	Biro Humas dan Protokol	11.255.315.486	72,10	71,64	64,93	S	R
23	Biro Hukum	5.044.888.778	88,71	100,00	86,28	ST	T
24	Biro Organisasi	5.554.954.814	83,65	71,38	71,12	T	T
25	Biro Pemerintahan Umum	5.820.811.095	94,08	100,00	91,61	ST	ST
26	Biro Sosial	5.920.047.930	89,70	85,13	68,17	ST	T
27	Biro Perekonomian	4.008.496.733	79,11	84,41	79,70	T	T
28	Biro Keuangan	17.695.359.075	78,52	74,12	73,36	S	S



No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RKPD		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan RKPD (%)			
				Capaian Kinerja		Predikat Kinerja	
				K	Rp	K	Rp
29	Biro Pembangunan Daerah	7.458.648.000	93,78	91,67	93,84	ST	ST
30	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	7.078.383.385	96,63	131,41	97,19	ST	ST
31	Biro Perlengkapan	13.473.618.454	59,93	96,24	83,00	ST	T
32	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	8.154.125.678	83,66	92,24	86,26	ST	T
33	Sekretariat DPRD	79.942.805.493	90,40	95,24	86,30	T	T
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.991.736.717	82,13	88,34	79,70	T	T
35	Inspektorat	11.599.910.650	89,24	98,05	89,63	ST	T
36	Kantor Penghubung	8.680.654.251	88,96	90,44	85,60	T	T
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	19.415.109.028	80,68	100,28	81,37	ST	T
38	Badan Kepegawaian Daerah	27.193.993.372	89,92	83,97	81,96	T	T
39	Dinas Pendapatan Daerah	49.194.938.145	79,87	77,64	73,75	T	S
40	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	21.182.567.305	87,70	95,77	86,64	ST	T
41	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	18.640.407.911	95,19	96,18	96,14	ST	ST
42	Badan Arsip Daerah	6.501.098.293	75,89	93,84	76,64	ST	T
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.698.349.574	91,94	102,30	90,53	ST	T
44	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	2.754.069.300	89,53	100,00	83,57	ST	T
45	Badan Perpustakaan Daerah	10.363.373.592	93,91	99,28	89,84	ST	T
46	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	99.532.471.677	92,45	98,97	92,38	ST	ST
47	Dinas Perkebunan	32.232.051.689	77,51	77,29	83,66	T	T
48	Dinas Peternakan	47.110.220.988	70,32	92,87	84,28	ST	T
49	Dinas Kehutanan	21.469.802.608	93,52	95,25	94,74	ST	ST
50	Dinas Pertambangan dan Energi	49.957.521.495	91,63	94,54	87,01	ST	T
51	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24.302.352.455	91,60	92,18	88,31	ST	T
52	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.349.570.328	92,01	101,88	92,54	ST	ST
JUMLAH		4.287.689.556.879	85,41				

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Keterangan:

- Kolom (1) adalah nomor urut SKPD;
Kolom (2) adalah nama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
Kolom (3) adalah realisasi anggaran RKPD pada setiap SKPD;
Kolom (4) adalah persentase realisasi anggaran pada setiap SKPD (realisasi/pagu x 100);
Kolom (5) adalah rata-rata capaian kinerja kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD;
Kolom (6) adalah rata-rata realisasi anggaran kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD;
Kolom (7) adalah predikat untuk pencapaian kinerja sesuai dengan rata-rata capaian kinerja pada kolom 5;



Kolom (8) adalah predikat untuk pencapaian anggaran sesuai dengan rata-rata realisasi anggaran pada kolom 6.

ST : Sangat Tinggi	(91,00% ≤ 100%)
T : Tinggi	(76,00% ≤ 90,99%)
S : Sedang	(66,00% ≤ 75,99%)
R : Rendah	(51,00% ≤ 65,99%)
SR : Sangat Rendah	(≤ 50,99%)

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Total realisasi anggaran RKPD yang dilaksanakan oleh 52 SKPD adalah Rp.4.287.689.556.879 atau 85,41% (total pagu anggaran sebagaimana diuraikan pada Bab II laporan ini). Realisasi anggaran terendah adalah Dinas Kesehatan yaitu 70,30%, sedangkan yang tertinggi adalah RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yaitu 98,32%.
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan SKPD berkisar antara 56,69% pada Dinas Pendidikan sampai dengan 135,04% pada Satuan Polisi Pamong Praja. Rendahnya rata-rata capaian kinerja pada Dinas Pendidikan adalah karena banyak realisasi kinerja yang tidak dimuat dalam laporan hasil evaluasi Renja SKPD Dinas Pendidikan yang disampaikan kepada Bappeda.
3. Rata-rata capaian kinerja anggaran yang paling rendah adalah Dinas Kesehatan yaitu 68,09%, sedangkan yang tertinggi adalah Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama yaitu 97,19%.
4. Tingkat capaian rata-rata kinerja maupun anggaran sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan setiap kegiatan dalam setiap program. Oleh karena itu, suatu SKPD yang tinggi daya serap anggarannya, belum tentu memperoleh capaian rata-rata kinerja anggaran yang tinggi bila pelaksanaan seluruh kegiatan tidak konsisten.
5. Predikat kinerja masing-masing SKPD, baik untuk capaian kinerja maupun anggaran tergambar pada kolom 7 dan kolom 8. Predikat kinerja ini diberikan berdasarkan capaian kinerja pada kolom 5 dan kolom 6. Rincian capaian kinerja masing-masing SKPD sesuai predikat kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut pada tabel 2.28.



Tabel 2.28
Predikat Kinerja SKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Predikat Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. RSUD. A. Wahab Syahrani 3. RSUD. Kanujoso Djatiwibowo 4. RSUD Tarakan 5. RSKD Atma Husada Mahakam 6. Badan Pengelolaan KPPDT 7. Dinas Perhubungan 8. Badan Lingkungan Hidup 9. Badan PP dan KB 10. Disnakertrans 11. Disperindagkop 12. Badan Perijinan dan PMD 13. Dinas Pemuda dan Olah Raga 14. Badan Kesbangpol 15. Satuan Polisi Pamong Praja 16. Badan PBD 17. Biro Hukum 18. Biro Pemerintahan Umum 19. Biro Sosial 20. Biro Pembangunan Daerah 21. Biro PPWK 22. Biro Perlengkapan 23. Sekretariat DP KORPRI 24. Inspektorat 25. Badan Diklat 26. Badan Ketahanan Pangan 27. Badan PMPD 28. Badan Arsip Daerah 29. Dinas Kominfo 30. Sekretariat KPID 31. Badan Perpustakaan Daerah 32. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 33. Dinas Peternakan 34. Dinas Kehutanan 35. Dinas Pertambangan dan Energi 36. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 37. Dinas Kelautan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Biro Pemerintahan Umum 3. Biro Pembangunan Daerah 4. Biro PPWK 5. Badan PMPD 6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 7. Dinas Kehutanan 8. Dinas Kelautan dan Perikanan
Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Bappeda 3. Biro Umum 4. Biro Organisasi 5. Biro Perekonomian 6. Sekretariat DPRD 7. Badan Litbangda 8. Kantor Penghubung 9. Badan Kepegawaian Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. RSUD. A. Wahab Syahrani 3. RSUD. Kanujoso Djatiwibowo 4. RSUD Tarakan 5. RSKD Atma Husada Mahakam 6. Dinas Pekerjaan Umum 7. Bappeda 8. Badan Pengelolaan KPPDT 9. Dinas Perhubungan



Predikat Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
	10. Dinas Pendapatan Daerah 11. Dinas Perkebunan	10. Badan Lingkungan Hidup 11. Badan PP dan KB 12. Dinas Sosial 13. Disnakertrans 14. Disperindagkop 15. Badan Perijinan dan PMD 16. Badan Kesbangpol 17. Badan PBD 18. Biro Hukum 19. Biro Organisasi 20. Biro Sosial 21. Biro Perekonomian 22. Biro Perlengkapan 23. Sekretariat DP KORPRI 24. Sekretariat DPRD 25. Badan Litbangda 26. Inspektorat 27. Kantor Penghubung 28. Badan Diklat 29. Badan Kepegawaian Daerah 30. Badan Ketahanan Pangan 31. Badan Arsip Daerah 32. Dinas Kominfo 33. Sekretariat KPID 34. Badan Perpustakaan Daerah 35. Dinas Perkebunan 36. Dinas Peternakan 37. Dinas Pertambangan dan Energi 38. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sedang	1. Dinas Sosial 2. Biro Humas dan Protokol 3. Biro Keuangan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 3. Biro Umum 4. Biro Keuangan 5. Dinas Pendapatan Daerah
Rendah	1. Dinas Pendidikan	1. Biro Humas dan Protokol
Sangat Rendah		

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.28 diperoleh gambaran:

1. Terdapat 37 SKPD atau 71,15% yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” untuk capaian kinerja dan 8 SKPD atau 15,38% untuk realisasi anggaran.
2. Terdapat 11 SKPD atau 21,15% yang memperoleh predikat kinerja “tinggi” untuk capaian kinerja dan 38 SKPD atau 73,08% untuk realisasi anggaran.



3. Terdapat 3 SKPD atau 5,77% yang memperoleh predikat kinerja “sedang” untuk capaian kinerja dan 5 SKPD atau 9,62% untuk realisasi anggaran.
4. Dinas Pendidikan memperoleh predikat kinerja “rendah” untuk capaian kinerja dan Biro Humas dan Protokol memperoleh predikat kinerja “rendah” untuk realisasi anggaran.
5. Terdapat 8 (delapan) SKPD atau 15,38% yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” untuk capaian kinerja maupun anggaran, yaitu:
 - 1) Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2) Biro Pemerintahan Umum
 - 3) Biro Pembangunan Daerah
 - 4) Biro PPWK
 - 5) Badan PPMD
 - 6) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 - 7) Dinas Kehutanan
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan

Hasil pengendalian dan evaluasi ini menjadi bahan masukan dalam perbaikan kinerja SKPD pada masa yang akan datang.

2.2.2 Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2015

RKPD merupakan penjabaran RPJMD, oleh karena itu pengendalian dan evaluasi RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Berdasarkan RKPD tahun 2014.

Tabel 2.29.
Hasil Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2015

No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Selisih Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 thdp RPJMD	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Renstra SKPD (%)	
		Rp.	%		K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan	727.848.790.540	35,17	-	28,63	29,17
2	Dinas Kesehatan	112.463.764.671	33,51	483.700.000	74,23	38,23



No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Selisih Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 thdp RPJMD	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Renstra SKPD (%)	
		Rp.	%		K	Rp
3	RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda	737.279.106.772	61,36	-	51,35	54,65
4	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	428.931.136.791	24,40	-	35,31	18,26
5	RSUD Tarakan	253.129.983.226	37,33	-	42,84	27,13
6	RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam	70.043.588.127	40,38	-	69,80	29,54
7	Dinas Pekerjaan Umum	3.379.663.392.191	29,15	63.938.661.660	42,37	37,83
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	94.303.922.593	43,13	-	56,97	49,65
9	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	27.037.837.389	47,39	-	41,86	43,22
10	Dinas Perhubungan	509.319.586.553	28,46	-	48,81	31,80
11	Badan Lingkungan Hidup	25.664.771.287	21,12	-	64,22	33,70
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	19.004.672.138	28,33	-	51,61	25,21
13	Dinas Sosial	71.956.537.661	34,29	-	46,19	30,54
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95.275.135.503	29,79	-	30,07	24,34
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	135.102.581.168	23,98	643.074.000	73,54	42,98
16	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	29.274.939.122	26,10	-	40,59	28,89
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	205.204.010.239	33,42	-	45,82	36,50
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.954.076.694	26,25	-	49,30	24,95
19	Satuan Polisi Pamong Praja	16.746.223.685	48,24	-	46,92	49,94
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.195.961.950	27,80	-	40,38	25,74
21	Biro Umum	130.761.295.308	43,56	-	81,14	35,80
22	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	27.046.941.004	35,33	-	63,52	27,05
23	Biro Hukum	11.449.951.278	41,43	-	100,00	39,24
24	Biro Organisasi	11.100.603.007	35,02	-	66,98	30,83
25	Biro Pemerintahan Umum	11.118.565.551	37,58	-	100,00	37,23
26	Biro Sosial	11.521.931.930	33,67	-	41,47	28,12
27	Biro Perekonomian	9.886.696.733	35,35	-	85,80	41,28
28	Biro Keuangan	35.814.512.642	31,99	-	31,95	25,48
29	Biro Pembangunan Daerah	22.954.962.908	47,44	-	57,75	57,28
30	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	17.463.792.878	37,34	-	78,97	40,25
31	Biro Perlengkapan	28.166.057.544	20,31	-	93,38	28,18
32	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	17.074.654.678	31,41	-	98,59	26,52
33	Sekretariat DPRD	166.898.226.651	32,87	-	82,72	25,16



No.	Nama SKPD	Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Selisih Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 thdp RPJMD	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Renstra SKPD (%)	
		Rp.	%		K	Rp
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.028.417.717	30,57	-	41,22	26,78
35	Inspektorat	22.236.957.740	38,98	-	55,06	40,25
36	Kantor Penghubung	25.864.350.651	31,13	-	70,88	30,29
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	55.935.620.245	28,04	-	35,92	24,25
38	Badan Kepegawaian Daerah	74.833.506.372	33,27	-	84,43	31,83
39	Dinas Pendapatan Daerah	105.127.464.619	27,33	25.726.000	48,41	31,32
40	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	54.577.172.932	32,49	-	49,98	29,47
41	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	48.993.458.671	40,57	-	36,18	39,75
42	Badan Arsip Daerah	15.849.415.703	24,33	-	70,78	26,82
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.146.149.994	32,34	-	39,70	27,94
44	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	4.991.611.800	29,69	-	36,56	26,88
45	Badan Perpustakaan Daerah	27.651.140.908	28,42	-	52,86	39,74
46	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	200.133.054.347	29,49	-	47,24	34,12
47	Dinas Perkebunan	71.282.758.260	22,75	-	41,15	30,47
48	Dinas Peternakan	98.313.578.740	25,11	-	41,92	31,09
49	Dinas Kehutanan	57.111.190.563	31,88	-	35,34	32,10
50	Dinas Pertambangan dan Energi	76.388.694.104	20,66	-	46,90	31,97
51	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	67.551.766.124	35,50	-	62,92	56,76
52	Dinas Kelautan Dan Perikanan	94.520.926.328	34,49	-	79,61	39,82
JUMLAH		8.689.195.446.230	31,41	65.091.161.660		

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Keterangan:

- Kolom (1) adalah nomor urut SKPD;
- Kolom (2) adalah nama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Kolom (3) adalah realisasi anggaran RPJMD pada setiap SKPD s/d tahun 2015 (akumulasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan tahun 2015);
- Kolom (4) adalah persentase realisasi anggaran pada setiap SKPD (realisasi/pagu x 100);
- Kolom (5) adalah selisih realisasi anggaran RKPD terhadap RPJMD (apabila terdapat kegiatan yang tidak ada dalam renstra namun ada dalam RKPD dan atau APBD);
- Kolom (6) adalah rata-rata capaian kinerja kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD;
- Kolom (7) adalah rata-rata realisasi anggaran kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD.



Berdasarkan tabel 2.29 diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran RPJMD sampai dengan tahun 2015 (tahun kedua pelaksanaan RPJMD) adalah sejumlah Rp.8.689.195.446.230,- atau 31,41%.
2. Terdapat sejumlah Rp.65.091.161.660,- atau 1,52% realisasi kegiatan Renja SKPD yang tidak terdapat dalam Renstra SKPD, yaitu 10 (sepuluh) kegiatan pada 4 SKPD.
3. Terdapat 14 SKPD yang memperoleh rata-rata capaian kinerja kegiatan diatas 70%, yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - c. Biro Umum;
 - d. Biro Hukum;
 - e. Biro Pemerintahan Umum;
 - f. Biro Perekonomian;
 - g. Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama
 - h. Biro Perlengkapan
 - i. Sekretariat DP Korpri
 - j. Sekretariat DPRD
 - k. Kantor Penghubung
 - l. Badan Kepegawaian Daerah
 - m. Badan Arsip Daerah
 - n. Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Beberapa SKPD yang memperoleh rata-rata capaian kinerja ini adalah karena target kegiatan dalam Renstra dalam bentuk persentase. Namun demikian terdapat pula pencapaian target yang sudah tinggi dari yang termuat dalam Renstra, seperti pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
5. Terdapat 3 SKPD yang memperoleh rata-rata capaian anggaran kegiatan diatas 50%, yaitu:
 - a. RSUD A. Wahab Syahrani
 - b. Biro Pembangunan Daerah
 - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Tabel 2.29 memberi gambaran terhadap pelaksanaan RPJMD dengan melihat kondisi pelaksanaan Renstra setiap SKPD. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target dan anggaran RPJMD.

2.2.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Target Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2015

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, terdapat 119 program pembangunan yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur. Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dan laporan yang disampaikan SKPD, diperoleh gambaran realisasi kinerja kegiatan pada masing-masing program dan capaian target atas 119 sasaran RPJMD s/d Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.30
Target dan Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf	98,40	52,27	67,02	98,64	100,24	Dinas Pendidikan
2	Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	APK PAUD	60,00	33,33	90,52	49,77	82,95	Dinas Pendidikan
3	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	97,86	25,00	90,74	97,68	99,82	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	113,80			112,61	98,95	
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	90,10			79,60	88,34	
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	97,90			97,90	100	
4	Program pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	76,64	47,77	87,50	74,24	96,87	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	88,20			87,90	99,66	
5	Program Peningkatan Pendidikan dan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	16,46	2,00	99,83	25,91	157,41	Dinas Pendidikan



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia							
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	55,00	40,11	87,99	65,30	118,73	Dinas Pendidikan
7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)	1/4	100,00	96,69	1/3	75,00	Badan Perpustakaan
8	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Proporsi anak yang kembali bersekolah	29	40,48	96,27	5	17,24	BPPKB
9	Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,00	-	-	9,18	321,62	Dinas Kesehatan
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,00	93,93	86,70	9,18	321,62	Dinas Kesehatan, RS Atma Husada, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,00	66,06	59,92	9,18	321,62	Dinas Kesehatan, RS Atma Husada
12	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	89%	100,00	87,39	89	100	Dinas Kesehatan
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV/AIDS	<1	99,50	71,89	0,090	100,00	Dinas Kesehatan
		Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	98,20			63,81	64,97	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
		Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	1,4			0,20	100,00	Dinas Kesehatan
		tingkat kematian akibat malaria	5,2			-	-	Dinas Kesehatan, RSUD AWS,



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
								RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
		PrevalensiTuberklos is (TB) per 100.000 penduduk	223			56,00	25,11	Dinas Kesehatan
		Persentase keberhasilan pengobatan TB	87			56,70	65,17	Dinas Kesehatan
		Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	30			19,70	65.66	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, & Tarakan
14	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	20	87,10	79,51	21,00	105	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
		Angka Kematian Balita per 1000 KH	29			31	106.8	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	146			57	100,00	Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	70	78,96	38,46	100	142.8	Dinas Kesehatan
16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran UMP	UMP = KHL	88,83	91,40	UMP = KHL	-	Disnakertrans
17	Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan yang menerapkanperatur an ketenagakerjaan	80,00	74,33	73,66	78.41	98.01	Disnakertrans
18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IPG	62,00	83,33	97,20	62,93	101,50	BPPKB



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
19	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	70,00	0,00	97,90	16,00	100,00	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	1,35			2,87	212.5	
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	26,00			26,64	102.46	
20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)	70,00	98,00	62,15	0	-	Dinas Kesehatan
21	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan)	1,19	67,02	96,64	0.904	75.96	Dinas Sosial
22	Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum	100	100,00	93,55	76,71	76,71	Biro Ekonomi
23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya dan melakukan usaha ekonomi (jiwa)	3.888	81,07	99,84	3.88	100	BPM-PD
24	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	46,88	25,00	92,15	46.05	98.22	Dinas Sosial
25	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	11,80	76,92	98,49	9,00	76,27	BPP-KB
26	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk miskin yang terserap di duniakerja	400	100,00	67,79	9.907	2.476,75	Disnakertrans
27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu	14	100,00	98,10	7	50,00	Dinas Kehutanan



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
28	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian	-	100,00	97,72	-	-	Dinas Pertanian
		Demplot kawasan usaha agribisnis terpadu (Demplot)	15			5	33,33	
29	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Jumlah KK yang dilatih budidaya peternakan	75	50,00	34,63	75	100,00	Dinas Peternakan
30	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	18,48	100,00	77,28	4,11	22,24	Badan Penanggulangan Bencana
31	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan prasarana dasar rumah sederhana sehat	27,50	100,00	86,67	27,50	100,00	Dinas PU (Cipta Karya)
32	Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa konstruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)	Jumlah tenaga terampil bidang jasa konstruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)	320	-	-	0	-	Disnakertrans
33	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	100	91,58	84,64	55	55,00	Disnakertrans
34	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	130	98,00	90,87	245	188,46	Disperindagkop
35	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah	jumlah wirausaha baru (WUB)	2.000	63,13	82,97	1.000	50,00	Disperindagkop
36	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unggulan (koperasi)	10	94,00	77,85	17	170,00	Disperindagkop



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
37	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	0,03	96,63	79,06	0,03	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
38	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru	12,00	38,57	88,22	2,00	16,67	Disnakertrans
39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	31,00	94,94	66,91	23,83	76,87	Disnakertrans
40	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri	15,00	76,19	99,84	2,00	13,33	Dinas Sosial
41	Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	83,83	100,00	77,94	87,86	104,80	Bappeda
42	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	rasio pasar per 10.000 penduduk	0,97	88,33	91,17	0,96	98,97	Disperindagkop
43	Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya	4,00	68,17	65,28	3,39	84,75	Biro Ekonomi
44	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	35,00	125,86	91,58	39,38	112,38	BPPMD
45	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	37,5	87,58	91,60	21,34	56,9	BPPMD
46	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	3	37,50	72,16	3	100	BPPMD
47	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah	4	-	-	0	-	Disperindagkop
48	Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)	140	77,78	80,37	19	13,57	Disperindagkop



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
49	Program Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,30	40,40	41,33	1,19	91,21	Dinas Perkebunan
50	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	5	108,33	90,22	20	400,00	Disperindagkop
51	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	84	108,33	99,44	4	4,76	Dinas Peternakan
52	Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah	Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	3	-	-	5	166,67	Dinas Perkebunan
53	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	6	100,00	95,91	2	33,33	Disperindagkop
54	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara (Juta US\$)	7	97,37	93,76	4	57,14	Disperindagkop
55	Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)	70.000	96,53	86,11	45.865	65,52	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
56	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan (juta orang)	1,02	100,00	99,36	2,18	213,16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
57	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas) (Ha)	143.156	40,93	86,14	160.139	111,86	Dinas Perkebunan
58	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan	5	100,00	96,59	6	120,00	Dinas Peternakan
59	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)	15,30	137,29	94,68	15,10	98,69	Dinas Perikanan dan Kelautan
60	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB (Triliun)	26,00	100,00	84,80	60.00	230.76	Disperindagkop, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
61	Program Peningkatan Produksi pertanian	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	519.315	88,65	89,54	463.070	89,17	Dinas Pertanian
62	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	4,50	97,92	93,33	4,75	105,56	Dinas Pertanian
63	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas	931	93,57	91,69	803	86,25	BKPP
64	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL Perikanan Berkualitas	89	-	-	33	37,07	BKPP
65	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	117	100,00	91,46	88	75,21	BKPP
66	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi	2	75,00	73,26	0	-	Disnakertrans
67	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	5.350	93,56	94,11	4.922	92,00	Dinas PU
68	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Daerah (%)	86,81	98,96	79,61	80,66	92,92	BKPP
69	Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan	jumlah produksi daging (ton)	53.630,90	78,50	72,29	52.915,05	98,67	Dinas Peternakan
70	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	232.639	103,00	94,70	194.192	83,47	Dinas kelautan dan perikanan
71	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	148.091	97,30	84,54	98.659	66,62	Dinas kelautan dan perikanan
72	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian	42	100,00	94,78	42,00	100,00	Dinas Pertanian



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
73	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	96,70	100,00	98,09	98,54	101,90	Dinas Pertanian
74	Program Diversifikasi Energi	% Bauran Energi Baru Terbarukan	1,00	65,71	93,74	0,65	65,00	Distamben & PLN dan Swasta
75	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Instalasi Biogas (unit)	105	93,03	96,79	105	100,00	Dinas Peternakan
76	Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	0,73	100,00	92,58	0,76	104,11	Dinas Pertambangan dan Energi
77	Program pengembangan listrik pedesaan	Persentase desa berlistrik (%)	90,00	50,00	86,07	95,50	106,11	Dinas Pertambangan dan Energi
78	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)	12,30	89,47	89,66	4,11	33,41	Dinas PU
79	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	74,02	100,00	94,62	52,20	70,52	Dinas PU
80	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	89,76	44,67	70,51	34,11	38,00	Dinas PU
81	Program pembangunan jalan tol	Ketersediaan jalan tol (%)	25,00	2,40	96,89	0	0	Dinas PU
82	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas (ton)	326.000.000	100,00	91,17	699.580.433	214,60	Dinas Perhubungan
		Kuantitas Penumpang (orang)	13.500.000			833.731	6,18	
83	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi	10	67,50	79,16	13,00	130,00	Dinas PU
84	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyeberangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	11	100,00	88,50	10	90,91	Dinas Perhubungan



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
85	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	3	100,00	97,22	2	66,67	Dinas Perhubungan
86	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)	65,00	100,00	96,04	100,00	153,85	Diskominfo
87	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (lt/detik)	520	83,33	78,91	0	0	Dinas PU
88	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	Cakupan Layanan Air Minum (%)	41	83,33	93,77	42	102,44	Dinas PU
89	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	10,00	100,00	88,40	0	0	Dinas PU
90	Program pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	430	100,00	91,33	450	104,6	Dinas PU
91	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis (DAS)	34	-	-	35	102,94	Dinas PU
92	Program penguatan kelembagaan PTSP	Menurunnya tingkat korupsi	5,7	0,00	0,00	5,5	96,49	Biro Organisasi
93	Program pengembangan zona integritas	jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	2	100,00	87,70	2	100,00	Inspektorat
94	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Menurunnya kasus KKN	4	72,22	72,01	0	-	Inspektorat
95	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini laporan keuangan pemerintah provinsi	WTP	97,69	84,63	WTP	100,00	Biro Keuangan
96	Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP	20,00	-	-	20,00	100,00	Biro Keuangan
97	Program peningkatan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	75,00	100,00	80,73	76,55	102,07	Biro Organisasi



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
98	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur (%)	95,00	87,49	93,02	48,07	50,60	BKD
99	Program integrasi aplikasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	6	100,00	97,13	0	-	Diskominfo
100	Pengembangan data statistik dan spasial	Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan	88	100,00	79,22	84	95,45	Bappeda
101	Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	B+ (74)	100,00	95,34	BB(75.14)	100	Biro Organisasi
102	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	100,00	91,38	Tinggi	100	Biro Pemerintahan
		% Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan	50			55,00	110,00	Inspektorat
103	Program Pendidikan politik masyarakat	Indeks demokrasi	70,00	100,00	93,61	68,13	97,33	Kesbangpol
104	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH (unit)	3	100,00	91,26	8	266,67	Dinas Kehutanan
105	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	45.000	100,00	97,73	181.125	402.5	Dinas Kehutanan
106	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggaraan tata ruang	67,83	96,67	89,26	61,17	90,18	Dinas PU
107	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman mangrove (ha)	150	100,00	99,37	20	13,33	Dinas Kehutanan
108	Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Jumlah HCV dikawasan hutan	2	-	-	0	-	Dinas Kehutanan
109	Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang	% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	35,00	100,00	99,84	44,30	126,57	Dinas Pertambangan dan Energi



No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Target RPJMD Tahun 2015	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%)		Realisasi Capaian Kinerja (2015)		SKPD Penanggung Jawab Program
				Kinerja	Anggaran	Capaian	%	
110	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi yang diturunkan (CO2E)	218,75	64,76	84,22	250	114,67	Dinas Perkebunan
111	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	143	100,00	67,50	193	134,97	BLH
112	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	78,29	100,00	88,69	81.97	104.7	BLH
113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat adipura	4	100,00	91,99	4	100,00	BLH
114	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata	282	100,00	99,22	285	101.06	BLH
115	Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH	PPLHD (orang)	76	100,00	75,11	6	100	BLH
		PPNS (orang)	24			24	100	
116	Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Perda/Pergub	3	91,67	80,39	3	100	BLH
117	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)	1	65,00	85,27	1	100	Bappeda
118	Program perlindungan atmosfer dan perubahan iklim	Intensitas emisi (ton/1 jt US\$)	1.450	119,86	63,37	1.738	119.86	BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Distamben
119	Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Ketersediaan dan pelaporandata level emisi yang terukur sertadapat di verifikasi (kali PEP/tahun)	2	100,00	84,87	2	50,00	BLH



Berdasarkan tabel 2.30 di atas, terlihat bahwa seluruh SKPD sangat konsisten melaksanakan RKPD untuk mewujudkan pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Realisasi kinerja yang belum dapat dimuat adalah karena SKPD yang bersangkutan belum memperoleh angka terbaru atas outcome sebagaimana yang tercantum.

2.2.4 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Faktor pendorong keberhasilan kinerja yang dihimpun dari seluruh SKPD sesuai dengan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. RSUD. A. Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A dengan sertifikat pengakuan RS telah memenuhi klasifikasi RS berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No.340/Menkes/Per/III/2010, Tentang Klasifikasi RS.
2. Rumah Sakit telah mendapat sertifikat dengan pengakuan bahwa RS telah memenuhi Standar Akreditasi RS dan dinyatakan Lulus Tingkat Madya berlaku 3 Desember s.d. 2 Desember 2016, pada tanggal 19 Januari 2015 oleh Komisaris Akreditasi RS.
3. Sebagai RS Rujukan Nasional berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/Menkes/390/2014. yang menjadi Rujukan Lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4 (empat) Provinsi.
4. Sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan Kemenkes RI Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, yaitu sebagai RS Rujukan Regional sebagai pengampu Rujukan Medik dari RS Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
5. RS telah bersertifikat berstandar Internasional yaitu ISO 9001/2008 Oleh MS CERT.
6. Mendapat penghargaan di tahun 2014 Yaitu : 1. Penghargaan SKPD Terbaik I tahun 2014 dalam Rangka HUT 58 Provinsi Kaltim.2. terbaik VI Pengelolaan Barang Milik Negara. 3.Terbaik II Pengelolaan Kepegawaian. 4 SKPD Terbaik Inovatif tahun 2014. 5. Mendapat Predikat Kepatuhan Standar pelayanan Publik UU n0 25 Tahun 2009 Oleh Ombudsman RI.
7. Penambahan sarana fasilitas pelayanan kesehatan yaitu gedung radioterapi dan gedung bertingkat tiga untuk laboratorium klinik dan bank darah pada tahun 2014.



8. Pengadaan peralatan medis yaitu alat radioterapy, alat cathlab jantung, alat phaco untuk alat bedah mata, alat laparascopy untuk bedah, operating mikroskop alat bedah syaraf, peralatan CSSD Laundry, Alat Boiler System untuk uap panas/ air panas.
9. Sebagai rumah sakit Kelas A dan pusat rujukan sehingga mendapat dana bantuan peralatan dari dana pusat (APBN)
10. Dengan berlakunya sistem Rujukan yang mulai berjalan baik sehingga RSUD.AW.Sjahanie lebih fokus kepada pelayanan yang bersifat subspesialis dengan ini penambahan Tenaga Dokter Medis yaitu Dokter Radioterapy, dokter Bedah Plastik.
11. Keberhasilm dalam pelaksanaan bedah jantung yang pertama di kalimantan dan berjalan sukses karna berkat dukungan dari bendanaan pemerintah provinsi dan kerja keras Tim RSUD.AWS dalam pelaksanaan tersebut.
12. Rumah Sakit dalam proses menuju akreditasi bertaraf JSI yang di targetkan maju 2016, dilaksanakannya pelatihan SDM dan fasilitas pemenuhan sesuai aturan JSI dan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi serta dukungan seluruh karyawan RSUD.AWS.
13. Koordinasi SKPD yang baik dan komitmen pimpinan untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
14. Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja dilapangan
15. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
16. Bertambahnya pagu anggaran baik yang bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi) maupun melalui dana APBD (Dana Aspirasi) dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
17. Sudah adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP.
18. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.
19. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan schedule dan tepat waktu serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulannya, baik pada pelaksanaan rapat-rapat DPRD Provinsi Kalimantan Timur maupun penyelesaian Raperda serta kegiatan kedewan lainnnya termasuk kegiatan pendukung.
20. Anggaran yang disyahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat.



21. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kantor yang baik dan memadai.
22. Koordinasi yang baik antara instansi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
23. Dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terutama terhadap program yang berbasis Koperasi dan UMKM
24. Kegiatan sesuai dengan Renstra dan Renja SKPD
25. Percepatan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
26. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
27. Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan tersebut
28. Adanya jaminan bahan baku yang sah
29. Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
30. Kegiatan REDD merupakan program nasional
31. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan program prioritas
32. Adanya regulasi yang mengamanatkan untuk melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tertibnya peredaran hasil hutan.

2.2.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja SKPD antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan yang sering berubah-ubah khususnya dari segi penganggaran
2. Tenaga SDM terutama tenaga medis di RSUD A.W.Sjahranie untuk tenaga spesialis dan subspesialis sudah memenuhi tetapi dalam jumlah SDM yang perlu penambahan.
3. Rumah sakit mendapat anggaran dari dana APBD yang terbatas sehingga masih membutuhkan alokasi anggaran dari dana BLUD walaupun lebih fleksibel dan efisien tetapi ada prosedur dan aturan yang dipakai
4. Dengan perubahan organisasi menjadi rumah sakit kelas A dan sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan, sudah terakreditasi, dan jaminan mutu ISO 9001:2008 dibutuhkan dana anggaran untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.
5. Diperlukan pembangunan gedung dengan fasilitas lengkap untuk perawatan pasien kelas III.
6. Terlambatnya pengesahan anggaran SKPD



7. Pembebasan tanah tidak dapat dilaksanakan dengan cepat
8. Masalah sosial lainnya
9. Bertambahnya pagu anggaran diluar APBD murni berdampak kepada sulitnya mengukur indikator kinerja yang ingin dicapai.
10. Ketidakmampuan dan profesionalisme SDM masih terbatas terutama di dalam menjalankan tupoksinya.
11. Mekanisme perencanaan diawali dari bottom up bukan top down.
12. Terbatasnya jumlah SDM aparatur, dan yang memiliki komitmen, kapasitas, kompetensi dan keahlian bidang humas dan protokol.
13. Adanya struktur dengan beban kerja yang tidak seimbang terhadap tugas dan fungsi yang ditetapkan.
14. Belum maksimalnya pengelolaan administrasi dan ketatausaan, terkait penataan arsip/dokumen kerja, barang inventaris, pelaporan kinerja secara berkala.
15. Belum optimal dan memadainya sarana prasarana yang dibutuhkan.
16. Belum optimalnya standar pelayanan pengaturan jadwal kegiatan Pemda.
17. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
18. Kurang tersedianya alokasi dana untuk pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan pendukung sebagai akibat efesiensi dan defisit anggaran.
19. Seringnya terjadi perubahan jadwal kegiatan yang disusun yang disebabkan oleh volume dan jadwal kegiatan yang terlalu padat sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kegiatan.
20. Keluaran kegiatan yang pelaksanaannya oleh pihak ke-3 dan realisasi keuangannya dilaksanakan pada Triwulan III dan IV, berpengaruh pada penyerapan realisasi keuangan pada Triwulan I dan II.
21. Terbatasnya waktu pembahasan dan penyusunan Raperda sehingga berpengaruh terdapat capaian Raperda yang ditetapkan.
22. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya seperti kegiatan pengawasan.
23. Sulitnya mengkalkulasi aktifitas kedewanan yang kondisinya selalu berbeda setiap tahunnya.



24. Lemahnya sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
25. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur peneliti masih kurang dan kepakarannya belum sesuai dengan kebutuhan daerah.
26. Anggaran tidak tersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
27. Lemahnya koordinasi dan konsistensi masing-masing pengelola anggaran.
28. Adanya perubahan kewenangan sehubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
29. Kurangnya dunia usaha terhadap program Pemerintah dalam rangka dunia usaha di Kaltim baik sektor Industri, Perdagangan, maupun Koperasi dan UMKM
30. Adanya Sistem lelang dan ULP yang masih belum sesuai dengan biaya yang tersedia,
31. Adanya perubahan kajian dari 1 (satu) kajian menjadi 3 (tiga) kajian yang telah diselaraskan dengan renja dan dokumen pelaksanaan,
32. Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan.
33. Terpisahnya Kaltim-Kaltara yang mengakibatkan turunnya pendapatan,
34. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah
35. Masih trendahnya produktifitas beberapa komoditas perkebunan bila dibandingkan dengan potensi produksinya dan adanya mporatoprium perizinan untuk pembangunan uisaha perkebunan serta alokasi dana pemnbangunan infrastruktur pertanian yang tidak tersedia/anggaran terlalu kecil
36. Belum optimalnya personil yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
37. Kurangnya rasio antara luas ruangan dengan personil
38. Terbatasnya akses internet untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi
39. Industri yang tidak aktif
40. Masyarakat yang lambat menerima inovasi peningkatan ekonomi industri
41. Adanya musim kemarau yang menghambat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
42. Pelaksanaan REDD yang dilaksanakan oleh DDPI tidak menepati jadwal yang telah disepakati sehingga realisasi mundur dari jadwal pelaksanaan



43. Adanya IUPHHK yang masih berlaku ijinnya tetapi tidak ada kegiatan operasional dilapangan
44. Terdapat kegiatan fisik maupun non fisik yang belum memproses pencairan dana akan tetapi realisasi fisiknya sudah melebihi realisasi keuangan
45. Program / Kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan
46. Adanya revisi kegiatan

2.2.6 Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian atas factor pendorong dan factor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi proram di lingkungan Bappeda serta monitoring yang terus menerus
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan
3. Peran aktif Kepala Badan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya.
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan.
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten.
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan.
8. Perlunya melakukan review terhadap Renstra SKPD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
9. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan.
11. Mengoptimalkan tenaga fungsional peneliti yang ada dengan bekerjasama dengan tenaga ahli/peneliti dari luar perguruan tinggi dan kementerian yang ada di pusat.
12. Mempercepat pelaksanaan Program/Kegiatan
13. Meminta kepastian jadwal oleh DDPI sebagai pelaksana kegiatan REDD
14. Kegiatan RHL baru bisa dilaksanakan setelah memasuki musim hujan.



Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015

Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2015	Realisasi Kinerja 2015	% Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya IPM	IPM	79,71	77,14	73,82	95,70%
2	Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf	98,30	98,50	98,69	100,19%
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	9,60	10,50	9,04	86,09%
4	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup	71,40	71,75	73,62	102,61%
5	Meningkatnya pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita	44,65	48,65	50,63	104,06%
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	6,06	5,75	6,23	108,34%
7	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	8,90	7,00	7,50	107,14
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi	9,65	6,30±1	4,89	100%
		Paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>)	649.850	724.450	11,21	-
9	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,36	0,34	0,32	94,11%
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi (tanpa kaltara)	1,59	3,2 - 3,7	-1,26	-39,37%
		Pertumbuhan ekonomi non migas (tanpa kaltara)	5,17	7,0 - 7,3	-2,26	-32,28%
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara (tanpa kaltara)	7,47	7,7 - 8,0	-	-
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (tanpa kaltara)	6,50	7	7,3	104,28%
12	Tercapainya swasembada beras	Rasio pemenuhan beras	72,00	78,00	70,15	89,96%
13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan	0,02	1,12	1,01	90,18%
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6,00	6,21	103,50%



Sasaran		Indikator (Impact)	Kondisi Awal 2013	Target Kinerja 2015	Realisasi Kinerja 2015	% Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Indeks persepsi korupsi	5,2	5,7	5,58	97,89%
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00%
16	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	68	75	75.14	100.18%
17	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	70,75	74	74,14	100,20%
		Kinerja Pemerintahan Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100,00%
18	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	74,07	79,24	81,97	103.44%
19	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Intensitas emisi	1.500	1.458	1.738	109.20%

Sumber: Evaluasi RKPD tahun 2015

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisa evaluasi hasil capaian pembangunan dalam kerangka sasaran implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun kedua yakni tahun 2015, secara umum dapat diasumsikan memiliki pencapaian yang cukup memuaskan pada berbagai sektor maupun bidang pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang telah Direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama ini memberikan dampak pada peningkatan berbagai bidang fisik maupun non fisik utamanya dalam menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Keberhasilan pembangunan ini terlihat dari cukup mendekatinya realisasi capaian pembangunan dengan target pembangunan yang telah dirumuskan pada awal periode pembangunan jangka menengah. Data-data yang terlihat menunjukkan trend peningkatan berbagai target pembangunan melalui indikator sasaran maupun indicator kinerja program prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan ini akan menjadi modal dasar dan positif bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya sebagai estafet untuk menyempurnakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur.

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal



tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negative dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja. Oleh karena itu, setiap rumusan perencanaan pembangunan mempunyai upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai target pembangunan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut factor penghambat (permasalahan pembangunan) beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 2.32
Faktor Penghambat dan Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya IPM	Indeks Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil 2. Rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan 3. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tinggi 4. Masih rendahnya sarana dan prasarana layanan publik terhadap anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas dan anak yang bermasalah hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan pendidikan/kesehatan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa, bosda dan pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak 2. Meningkatkan kondisi pemungkin (<i>enabling condition</i>) yang mampu mendorong kesempurnaan capaian IPM 3. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau para pihak lainnya, terutama para pengusaha/pemegang izin pemanfaatan SDA di lapangan
2. Meningkatnya angka melek huruf	Angka Melek Huruf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya daerah perbatasan dan terpencil yang belum dapat mengakses pelayanan pendidikan secara merata 2. Persentase penduduk melek huruf sudah membaik, namun masih ada kesenjangan antar wilayah (akibat faktor internal dan eksternal) 3. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan (belum ada sekolah berasrama di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat dan mutu pendidikan terukur dengan melihat angka melek huruf 2. Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun 3. Infrastruktur pendidikan perlu dilengkapi, terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan 4. Mendorong partisipasi kelompok pendampingan masyarakat dan pelaku usaha dengan tanggung jawab sosial (CSR) a.l. mengubah mindset petani



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi rasio guru dan murid yang belum mendukung bagi kelancaran dan proses belajar mengajar yang berkualitas 2. Disparitas infrastruktur pendidikan, terutama gedung dan peralatan pendidikan antar kabupaten/kota 3. Persoalan putus sekolah dan/atau masih adanya kurangnya minat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya dikarenakan faktor finansial, tetapi juga pola pikir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan dan pendistribusian guru bantu serta aplikasi terhadap Program Sarjana Mendidik di wilayah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) 2. Koordinasi program dan capaian kinerja kabupaten/ kota, termasuk meminimalkan ketimpangan pendidikan antar wilayah 3. Pemberian beasiswa dan jaminan pendidikan untuk siswa miskin dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu 4. Pelaksanaan kajian dan pengembangan strategi efektif untuk menjawab akar masalah dari putus sekolah.
4. Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya program jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) 2. Kualitas pelayanan kesehatan yang belum efektif/efisien terhadap pasien 3. Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil 4. Distribusi tenaga medis belum merata 5. Belum maksimalnya kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan (termasuk pengobatan gratis) bagi masyarakat kurang mampu 2. Peningkatan jumlah dan durasi pelayanan (tidak terkecuali tenaga medisnya), khususnya di wilayah terpencil, meskipun telah tersedia 100 puskesmas 24 jam di berbagai daerah 3. Melakukan berbagai terobosan pelayanan kesehatan (a.l. Pusat Kesehatan Keliling/ Terapung puskesmas pembantu/Pusban) 4. Penyebarluasan atau penyuluhan pola hidup sehat di kalangan masyarakat serta penggalan potensi obat-obatan berbasis material lokal.
5. Meningkatnya pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu/kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah 2. UMP masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik tempat kerja 3. Kontribusi sumber penghasilan riil dari sektor dominan/pertanian di kalangan masyarakat belum signifikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM Kaltim yang memenuhi syarat dalam mengisi peluang kerja dan produktif 2. Peningkatan kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk pertanian sebagai sumber utama pendapatan masyarakat di pedesaan dan wilayah terpencil 3. Strategi peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan bonus demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi.



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
6. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju penurunan angka kemiskinan cenderung melambat 2. Masih ada angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten/Kota 3. Peningkatan pemutusan hubungan kerja sektor SDA dan terbatasnya sumber pencaharian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik yang lebih baik 2. Sinergi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan di Kaltim 3. Hilirisasi sektor primer dan pencarian sumber ekonomi alternatif
7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja masyarakat terutama yang memiliki pendidikan/keterampilan rendah 2. Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan wirausaha 3. Masih tingginya mindset bahwa bekerja itu adalah menjadi pegawai/karyawan/buruh 4. Masyarakat berpendidikan menengah atas masih memiliki idealisme harus bekerja di bidang tertentu dengan gaji tertentu 5. Belum maksimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan kesempatan kerja masyarakat 2. Memperluas lapangan usaha 3. Peningkatan daya saing manusia menjadi modal dasar penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM berkualitas.
8. Meningkatnya daya beli masyarakat	Inflasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naiknya harga barang pada hari besar dan akhir tahun 2. Tingginya harga BBM dan TDL dan berkurangnya subsidi 3. Minimnya intervensi Pemda terhadap gejolak pasar 4. Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan langkahlangkah untuk kestabilan harga 2. Memperbaiki sektor tata niaga dan pemasaran produk UMKM
9. Menurunnya Indeks Gini	Indeks gini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengembangan usaha pada sektor produktif 2. Rendahnya kualitas SDM pada masyarakat ekonomi lemah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal dan kearifan lokal
10. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi non migas non batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya hubungan pemerintah daerah terhadap iklim investasi yang kondusif 2. Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan sektor pengolahan industri migas 3. Pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat pada Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan SDA dan infrastruktur yang relatif baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan transformasi ekonomi 2. Lebih mengarahkan struktur ekonomi berbasis SDA terbarukan 3. Pembangunan ekonomi Kaltim yang saling terkait antara hulu dan hilir dengan komoditas unggulannya 4. Pengembangan perekonomian rakyat dan/atau sektor yang didukung oleh pelaku ekonomi yang lebih luas (pertanian)
11. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produk sektor pertanian 2. Kurang maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan agribisnis 2. Pertanian dengan sentra bisnis 3. Pengembangan agroindustri



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
12. Tercapainya swasembada beras	Rasio pemenuhan beras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pemberdayaan pertanian belum optimal 2. Kebijakan terkait kesejahteraan petani belum efektif 3. Ketersediaan infrastruktur pertanian masih rendah 4. Luas tanam dan luas panen yang belum optimal 5. Masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dan penerapan teknologi 2. Perbaikan tata niaga dalam mendukung pergerakan ekonomi 3. Mempertahankan dan bilamana mungkin memperluas areal tanam atau lahan pertanian masyarakat.
13. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energy baru dan terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan energi masih bergantung pada energi fosil 2. Belum berkembangnya energi bersumber non fosil 3. Kurang optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM 4. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan desa berlistrik 5. Daya mampu pembangkit listrik PLN masih kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan pemberdayaan energy yang ramah lingkungan 2. Mendorong pengembangan sumber energi alternatif, sampai pemanfaatan sampah organik menjadi bio massa
14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan jalan 2. Belum optimalnya konektivitas jaringan transportasi di pusat-pusat pelayanan wilayah (intra regional) dan antar pusat pelayanan (inter regional) 3. Daya dukung dan kapasitas prasarana untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa 4. Kualitas dan kuantitas infrastruktur perlu ditingkatkan 5. Sulitnya penyelesaian masalah sosial terhadap kebutuhan lahan infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar 2. Pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototype kawasan berkembang sekitarnya
15. Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi dan Opini BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur 2. Manajemen pengelolaan asset daerah belum efektif dan efisien 3. Minimnya perencanaan terhadap pengelolaan keuangan 4. Kesalahan mindset “menghabiskan anggaran” bukannya “mengoptimalkan anggaran” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 2. Pengendalian dan pengelolaan asset daerah 3. Memprioritaskan area perubahan seluruh aspek pemerintahan 4. Percepatan pencapaian target penyelelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
16. Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan publik di beberapa SKPD belum maksimal 2. Masih kurangnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat 3. Masih ada anggota masyarakat yang belum paham tentang persamaan hak warga dalam memperoleh pelayanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu meningkatkan pelayanan publik 2. Perlu menjadi aparatur yang berkualitas dengan tetap bekerja dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku
17. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	Predikat akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator kinerja utama SKPD belum berorientasi hasil 2. Laporan kinerja belum sepenuhnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu revisi Renstra SKPD 2. Perlu menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi yang



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
kinerja		digunakan untuk penilaian kinerja	mencapai/belum mencapai target kinerja
18. Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pendukung terkait dengan kualitas udara, air dan tutupan lahan belum lengkap tersedia/terserak pada SKPD yang berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota 2. Partisipasi parapihak di luar instansi pemerintah masih belum tinggi untuk penyerahan data 3. Semangat daerah untuk memajukan perekonomian, seringkali meninggalkan aspek pemantauan dampak lingkungan sebagai penyeimbangannya, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun data data pada titik-titik utama yang dipertimbangkan mampu merepresentasikan kualitas lingkungan hidup daerah 2. Mendorong partisipasi parapihak, khususnya pengusaha dan masyarakat, untuk terlibat aktif dalam pemantauan lingkungan 3. Memperketat ketersediaan dan implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Dokumen AMDAL sebagai syarat mutlak keamanan lingkungan akibat pembangunan
19. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat emisi gas rumah kaca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya parameter untuk menghitung intensitas emisi di kabupaten/ kota 2. Lemahnya peran serta perangkat daerah terkait pengumpulan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu komitmen kabupaten/kota untuk mengumpulkan data 2. Menyediakan pelatihan untuk menghitung intensitas emisi 3. Membentuk pokja di setiap kabupaten/kota 4. Mengembangkan jaringan kerja ke tingkat Nasional dan Global.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan sebuah perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Perencanaan tahunan ini merupakan periode keempat dari pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2018 yang memiliki tema pembangunan, "Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas". Sebagai tahapan keempat dari perencanaan pembangunan lima tahunan, RKPD tahun 2017 merupakan salah satu langkah akhir menuju pencapaian pembangunan tahun 2018 nanti. Oleh karena itu, segala persiapan dan finalisasi implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah harus direalisasikan.

Tema pembangunan daerah tahun 2017 memiliki fokus terhadap **perkembangan perekonomian daerah dimana kualitas struktur ekonomi diperhatikan secara seksama**. Hal ini tentu memiliki pengaruh terhadap berbagai kebijakan perekonomian daerah utamanya dalam mengembangkan perekonomian secara makro dan mikro. Selain itu, keuangan daerah yang merupakan modal dasar pembangunan juga memiliki peran penting sehingga perlu rumusan perencanaan perekonomian dan keuangan daerah yang saling terintegrasi untuk mencapai optimalisasi penggunaan aset negara untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pembelajaran berharga jika evaluasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembelajaran tersebut akan menjadi titik tolak perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya sudah tentu menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif maupun negatifnya hasil pembangunan tersebut



akan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan tahunan periode ini maupun ke depan baik melalui penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.

Dalam hal kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stake holder* dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi (dalam hal ini pembangunan nasional).

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah untuk peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Selanjutnya, implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut akan berimbas pada sistem penganggaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks otonomi daerah karena akan dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan produk unggulan masing-masing.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, untuk saat ini mudah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memenuhi *fiscal need*. Meskipun begitu, perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber



daya alam yang tak terbaharui sehingga suatu saat nanti jika terjadi penurunan produksi sumber daya alam tersebut maka akan mengguncangkan sistem perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh dan *massive*. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai merealisasikan perencanaan dan pelaksanaan ekonomi berkelanjutan sebagai penjamin kehidupan generasi mendatang.

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah :

1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkiraan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2017. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2017 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.



3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah melalui indikator makro ekonomi daerah apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Kebijakan Perkiraan Tahun 2016

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha sebagai berikut:



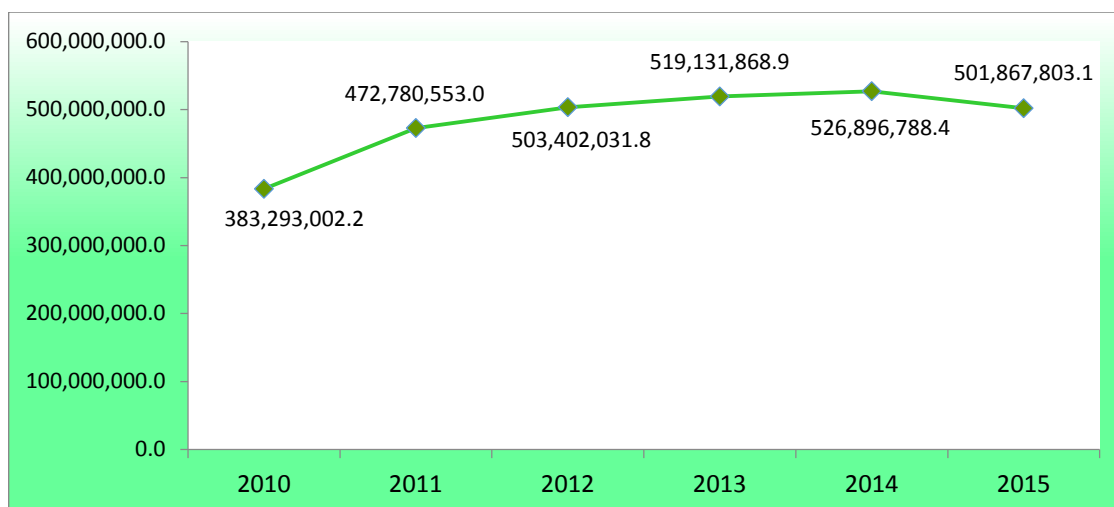
- 1) Sektor pertanian, kehutanan & perikanan;
- 2) Sektor pertambangan dan penggalian;
- 3) Sektor industri pengolahan;
- 4) Sektor pengadaan listrik, gas;
- 5) Sektor pengadaan air;
- 6) Sektor konstruksi;
- 7) Sektor perdagangan besar & eceran, Reparasi mobil & sepeda motor;
- 8) Sektor transportasi dan pergudangan;
- 9) Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- 10) Sektor informasi dan komunikasi;
- 11) Sektor jasa keuangan;
- 12) Sektor real estate;
- 13) Sektor jasa perusahaan;
- 14) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
- 15) Sektor jasa pendidikan;
- 16) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- 17) Sektor jasa lainnya.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi di daerah. Oleh karena itu, PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian dalam menata pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.



Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adh Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)

PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 519.131.868,9 juta rupiah atau hampir mencapai 519,13 triliun rupiah pada tahun 2013 dan mencapai 526,9 triliun rupiah pada tahun 2014. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011, dimana nilai PDRB mencapai 472,78 triliun rupiah. Namun, besaran peningkatan nilai PDRB tersebut cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun hingga terjadi penurunan pada tahun 2015, dimana nilai PDRB menjadi 501,87 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir perekonomian Kalimantan Timur mengalami perlambatan pada perekonomian Kalimantan Timur, dan akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2015.

B. Struktur Ekonomi Daerah

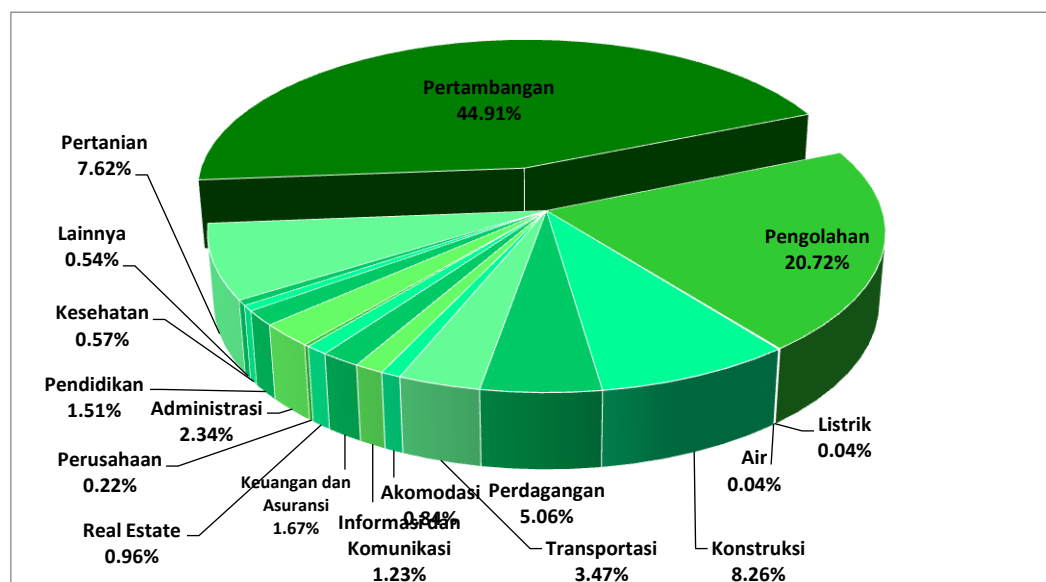
Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha tahun 2015 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 44,91 persen dan industri pengolahan sebesar 20,12 persen. Peranan Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian terus menerus menurun selama tiga tahun terakhir sebaliknya untuk industri pengolahan justru meningkat.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang akan dijadikan sebagai sektor unggulan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2015 memiliki kontribusi



perekonomian wilayah sebesar 7,62 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbaharui mengingat sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun produksinya.

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur(%)
Tahun 2015 (Tahun Dasar 2010)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (data tanpa Kaltara)

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. Indikator tersebut digunakan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah secara valid. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik dari waktu ke waktu, maupun membantu dalam mengidentifikasi sektor lapangan usaha yang potensial yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

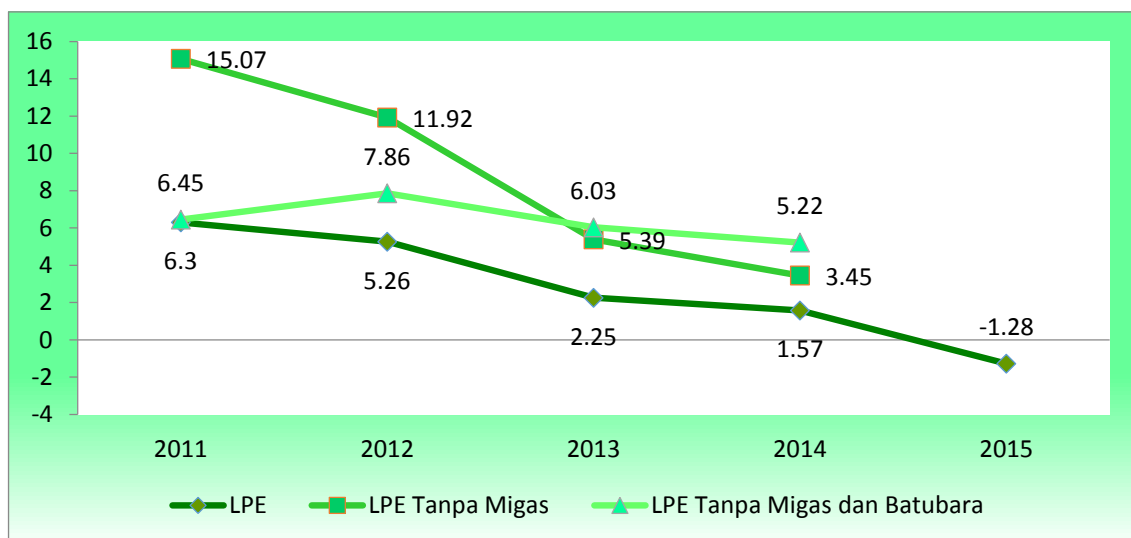
Laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dihitung dari perubahan antar waktu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan tahun dasar terbaru yakni tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan menggambarkan suatu perubahan



produksi barang dan jasa secara riil tanpa terpengaruh oleh perubahan harga pada periode analisis.

Secara umum, dalam kurun waktu empat tahun terakhir terjadi perlambatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun sejak tahun 2012. Dibandingkan tahun 2011, nilai pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 lebih kecil, yaitu sebesar 5,26 persen, sedangkan di tahun 2011 sebesar 6,3 persen. Perlambatan terus terjadi hingga pada tahun 2015 perekonomian Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,28 persen.

Gambar 3.3
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (data tanpa Kaltara)

Jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melakukan pemisahan sektor-sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kalimantan Timur, maka dapat diperoleh gambaran mengenai penyebab utama terjadinya perlambatan perekonomian Kalimantan Timur. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh adanya penurunan produksi di sektor pertambangan dan penggalian, terutama komoditas migas dan batubara. Terlihat bahwa tanpa sektor migas, perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,45 persen pada tahun 2014. Lebih lanjut, tanpa sektor migas



dan batubara, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mencapai 5,22 persen pada tahun 2014.

Uraian diatas menunjukkan bahwa perekonomian yang ditopang oleh sektor migas dan batubara cenderung tidak dapat berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya cadangan sumber daya yang tidak terbarukan, seperti migas dan batubara, yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam pengembangan ekonomi potensial melalui pemberdayaan potensi sumber daya terbarukan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016-2017

Pada tahun 2016 perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan belum mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan I 2016 yang berkontraksi sebesar -1,6% (yoy). Prospek perekonomian Kaltim hingga akhir tahun 2016 diperkirakan masih cukup berat mengingat masih terdapat beberapa risiko utama yang dihadapi seperti risiko berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok dan risiko berlanjutnya penurunan harga komoditas, termasuk harga minyak. Selain kedua risiko tersebut, kerentanan di sektor keuangan global diperkirakan perlu diwaspadai khususnya terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran -1,3% s.d -0,9% (ctc), sementara inflasi tetap diarahkan pada target inflasi nasional yaitu pada kisaran $4,0\% \pm 1\%$ (yoy).

Dengan melihat perkembangan ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan oleh perkembangan indikator PDRB Provinsi Kalimantan Timur selama beberapa periode serta dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi baik makro maupun sektoral. Dinamika perekonomian global secara signifikan memberikan pengaruh terhadap perekonomian Nasional dan juga perekonomian lokal Kalimantan Timur. Eratnya keterkaitan ekonomi lokal Kalimantan Timur dengan perekonomian global tidak terlepas dari tingginya dominasi sektor pertambangan minyak dan gas serta batubara dalam perekonomian Kalimantan Timur. Sebagian besar komoditas hasil sektor pertambangan, terutama batubara, diekspor untuk memenuhi permintaan negara lain. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi global menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan



dalam melihat posisi dan potensi perekonomian Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Globalisasi disamping menyediakan banyak peluang juga melekat berbagai tantangan dan eksekusi yang perlu dimitigasi. Integrasi ke dalam perekonomian global menyebabkan perekonomian domestik menjadi lebih terbuka terhadap berbagai guncangan eksternal. Hal ini terbukti pada kondisi perekonomian global di tahun 2014 dan 2015 yang mencerminkan adanya banyak kejutan sehingga menyebabkan kelesuan dan ketidakseimbangan perekonomian global yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian lokal.

Perbaikan kinerja ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat pasca krisis global ternyata tidak diikuti oleh pergerakan perekonomian dunia lainnya, seperti Tiongkok, yang justru mengalami perlambatan. Perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai sentra manufaktur global perlu diwaspadai karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar bagi perdagangan dunia. Akibat dari terjadinya ketimpangan perekonomian, permintaan global semakin melemah sehingga mendorong harga-harga komoditi dunia, termasuk batubara, mengalami penurunan. Namun terdapat efek positif dari melemahnya perekonomian dunia yakni semakin terbukanya kesempatan bagi Indonesia dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat bersaing dalam memperebutkan pasar ekspor global.

Berdasarkan analisis terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2017, perkembangan harga komoditas serta asesmen terhadap resiko pertumbuhan ekonomi ke depan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2017 berkisar antara -0.3% sampai dengan 0,1% (ctc) dengan tingkat inflasi berada pada kisaran 3,50%±1% (yoy).

Tabel. 3.1
Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Ekonomi	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertumbuhan ekonomi (% ,yoy)	1,57	-1,28	0,2±1	0,5±1
2	Inflasi	7,66	4,98	5±1	4±1

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (data diolah)



Besaran laju pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2014 menurut tahun dasar 2010 kembali mengalami penurunan yakni dari 2,25 persen da tahun 2013 menjadi 1,57 persen. Perlambatan ekonomi didorong oleh menurunnya kinerja sektor dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan. Selain akibat menurunnya produksi beberapa barang tambang, hal tersebut juga merupakan dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok yang menyebabkan permintaan batubara dari Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan.

Pertambangan migas juga mengalami penurunan lifting pada empat tahun terakhir, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri pengolahan migas di Provinsi Kalimantan Timur. Di tahun 2014, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, secara total pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2014 masih positif. Hal ini didorong oleh kinerja positif sektor pertanian, sektor pengadaan listrik dan gas serta perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor konstruksi. Sementara itu dari sisi permintaan, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Timur didorong oleh kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pada tahun 2015, perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif -1,28 persen. Penurunan kinerja ekonomi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kinerja yang cukup signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian hingga -4,83 persen. Selain itu, pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -1,16 persen dan -3,75 persen. Penurunan kinerja pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan merupakan imbas dari penurunan produksi di sektor pertambangan dan penggalian, karena kedua sektor tersebut sangat erat terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan positif, namun kinerja positif tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan.

I. Nilai PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha

Selama beberapa periode terakhir, kondisi perekonomian global baik regional Provinsi Kalimantan Timur, nasional, maupun internasional mengalami ketidakstabilan



yang disebabkan oleh berbagai aspek. Hingga akhir tahun 2015, kondisi perekonomian utamanya nasional, masih tidak bisa diperkirakan kemana arahnya mengingat pergantian “kursi” pemerintahan maupun beberapa sistem penunjangnya memberikan dampak yang berbeda pada setiap kebijakan yang diambil.

Kebijakan yang cukup besar dampaknya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada triwulan ke empat tahun 2014 yang memberikan dampak awal terguncangnya aktivitas ekonomi mikro hingga disusul melemahnya nilai tukar rupiah. Pergerakan pertumbuhan perekonomian nasional pun mengalami perlambatan yang menyebabkan lesunya perekonomian nasional dan disusul oleh beberapa wilayah.

Selain dampak perekonomian nasional, perekonomian global juga memberikan efek yang signifikan dalam pergerakan perekonomian Indonesia. Kondisi internasional yang tidak kalah signifikan dampaknya adalah situasi perdagangan internasional yang belum stabil (seiring dengan pelemahan harga-harga komoditas sumber energi baik migas maupun batubara) menyebabkan ekonomi global internasional mengalami masa sulit berkepanjangan.

Kondisi ketidakstabilan ekonomi tersebut telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari besaran PDRB Berlaku pada triwulan I tahun 2016, nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 116,13 triliun rupiah, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai PDRB berlaku pada periode yang sama di tahun 2015, sebesar 125,04 triliun rupiah. Besaran PDRB Tanpa Migas, sebesar 91,14 triliun rupiah, juga lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran PDRB Tanpa Migas periode yang sama pada tahun sebelumnya, sebesar 97,76 triliun rupiah. Sebaliknya, gambaran yang berbeda terlihat pada besaran nilai PDRB Tanpa Migas dan Batubara, yaitu sebesar 56,86 triliun rupiah, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2015, sebesar 54,99 triliun rupiah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penurunan kinerja ekonomi global, memberikan dampak perlambatan yang lebih besar terhadap sektor Migas dan Batubara dibandingkan sektor lainnya.

Jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi daerah, pada Tahun 2015 sektor pertambangan dan penggalan menghasilkan “kue ekonomi” terbesar yakni sebesar Rp



225,38 triliun atau 44,91 persen dari total nilai PDRB (dengan sumbangan subsektor pertambangan tanpa migas (batubara) sebanyak Rp 162,50 triliun). Selanjutnya, andil perekonomian tertinggi diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai tambah bruto (NTB) sebesar Rp 103,98 triliun (20,72%) kemudian sektor konstruksi sebesar Rp 41,45 triliun (8,26%) serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 38,23 triliun (7,62%). Sedangkan sektor-sektor lainnya memiliki nilai PDRB dibawah Rp 20 triliun.

Data dari indikator perekonomian ini memberikan sebuah gambaran bahwa perekonomian makro di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh perekonomian berbasis sumber daya tak terbarukan dimana pada kajian pengembangan perekonomian daerah Kalimantan Timur menyebutkan bahwa dalam jangka waktu produksi minyak mentah hanya berkisar 11,80 tahun, produksi gas bumi selama 13,53 tahun, dan produksi batubara selama 43,87 tahun (dengan asumsi produksi setiap tahun stabil). Oleh karena itu, tantangan pengambil kebijakan perekonomian ke depan adalah membuat suatu rumusan mendalam mengenai perekonomian Provinsi Kalimantan Timur agar pada generasi mendatang memiliki daya saing ekonomi yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai ekosistem lingkungan hidup secara madani.

Tabel 3.2
Statistik PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No	Lapangan Usaha dan Kelompok Sektor	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%) ADHK	Distribusi (%)	
		ADHB	ADHK		ADHB dengan migas	ADHB tanpa migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.230.278,7	28.501.395,1	4,59	7,62	9,83
2.	Pertambangan dan Penggalian	225.379.207,6	220.181.881,9	-4,83	44,91	46,19
3.	Industri Pengolahan	103.984.603,7	88.346.392,4	2,26	20,72	9,44
4.	Pengadaan Listrik, Gas	191.351,1	194.197,2	25,41	0,04	0,05
5.	Pengadaan Air	208.718,6	189.291,6	2,56	0,04	0,05
6.	Konstruksi	41.445.890,9	30.524.987,7	-1,16	8,26	10,66
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	25.395.701,3	21.069.663,7	0,32	5,06	6,53



No	Lapangan Usaha dan Kelompok Sektor	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%) ADHK	Distribusi (%)	
		ADHB	ADHK		ADHB dengan migas	ADHB tanpa migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Motor					
8.	Transportasi dan Pergudangan	17.432.908,1	11.992.130,1	2,57	3,47	4,48
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.227.063,5	3.143.661,7	4,89	0,84	1,09
10.	Informasi dan Komunikasi	6.160.397,3	6.118.388,6	7,98	1,23	1,58
11.	Jasa Keuangan	8.385.355,8	6.454.207,5	2,05	1,67	2,16
12.	Real Estate	4.803.758,3	3.934.654,5	3,59	0,96	1,24
13.	Jasa Perusahaan	1.085.805,2	861.219,1	-3,75	0,22	0,28
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.767.430,4	8.210.494,2	4,85	2,34	3,03
15.	Jasa Pendidikan	7.596.403,7	5.772.567,1	11,50	1,51	1,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.867.928,4	2.193.902,4	12,04	0,57	0,74
17.	Jasa Lainnya	2.705.000,6	2.027.047,1	8,81	0,54	0,70
• PDRB • PDRB Tanpa Migas • PDRB Tanpa Migas dan Batubara		501.867.803,1 388.795.164 226.297.948	439.716.082,1	-1,28	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)

ADHK: Atas Dasar Harga Konstan

ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2015 merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Turunnya pertumbuhan ekonomi sangat disebabkan oleh tiga sektor paling berpengaruh dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan dan penggalian, jasa perusahaan dan konstruksi.

Laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,28 persen ini terjadi karena penurunan PDRB pada sektor pertambangan dan penggalian, dimana sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,83 persen. Tingginya pengaruh sektor pertambangan dan penggalian dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan sektor tersebut memiliki andil terbesar dalam struktur ekonomi yakni sebanyak 44,91 persen sehingga



sedikit saja penurunannya akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Selain itu, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar -1,16 persen dan sektor Jasa Perusahaan sebesar -3,75 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2015 lebih disebabkan karena melemahnya kinerja sektor ekonomi utama yaitu pertambangan. Turunnya permintaan batubara dari negara mitra dagang utama dan rendahnya harga komoditas internasional berdampak pada kinerja sektor ini.

Sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi positif dimana sektor Pengadaan Listrik, dan Gas tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 25,41 persen, diikuti Jasa Kesehatan (12,04 persen), sektor Jasa Pendidikan (11,50 persen), dan sektor lainnya dengan pertumbuhan dibawah 9 persen.

II. Nilai PDRB dari Sisi Permintaan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang perekonomiannya mengandalkan kinerja komoditas ekspor barang terutama ekspor sektor primer seperti batubara, minyak bumi, maupun gas alam. Namun barang-barang ekspor tersebut memiliki kelemahan yakni merupakan bagian dari sumber daya alam yang tak terbarui dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksi kembali. Dengan kondisi struktur ekonomi tersebut, maka Kalimantan Timur harus memiliki kebijakan-kebijakan yang strategis untuk dapat melakukan restrukturisasi perekonomian wilayah dari dominasi sektor yang berbasis sumber daya tak terbarui menjadi ekonomi yang berbasis sektor yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2015, terjadi akibat melambatnya kinerja ekspor luar negeri yang didominasi oleh hasil sumber daya alam yang berasal dari sektor pertambangan yang tujuan ekspor ke beberapa negara maju dan negara dengan pendapatan menengah. Beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi di negara-negara tersebut adalah akibat pelemahan harga dan permintaan komoditas dunia, terutama minyak, melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan melemahnya konsumsi domestik. Adanya ketidakstabilan situasi ekonomi global di pasar internasional memberikan beberapa efek negatif terhadap situasi



perekonomian wilayah di Negara Indonesia. Meskipun demikian, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki catatan positif yakni mengalami surplus pada komponen net ekspor antar daerah sebanyak Rp 71,07 triliun. Nilai net ekspor tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 46,82 triliun. Komoditas ekspor utama Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah batubara, gas alam, minyak mentah, minyak kelapa sawit/CPO, dan pupuk. Sedangkan yang merupakan impor masuk antara lain minyak mentah, mesin, peralatan dan barang konsumsi, serta barang modal.

Tabel 3.3
PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2015 (Rp. Juta)

KATEGORI PENGGUNAAN	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73,396,421.73	80,180,286.67	86,353,223.85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,766,359.98	2,090,680.95	2,460,192.02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20,281,615.33	23,523,174.00	24,011,715.17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	129,083,647.03	139,830,347.87	145,721,483.58
5. Perubahan Inventori	9,842,941.81	12,092,354.73	3,984,274.54
6. Ekspor Luar Negeri	371,841,805.18	341,449,171.85	256,979,357.18
7. Impor Luar Negeri	110,413,720.41	119,093,437.40	88,717,185.71
8. Net Ekspor Antar Daerah	23,332,798.23	46,824,209.78	71,074,742.50
P D R B	519,131,868.87	526,896,788.45	501,867,803.13

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 80,18 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 86,35 triliun pada tahun 2015. Demikian juga pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku, terjadi peningkatan Rp. 23,52 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 24,01 triliun pada tahun 2015. Besaran nilai investasi yangunjukkan oleh nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2015 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2015, nilai PMTB sebesar Rp. 154,72 triliun, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 139,83 triliun.



Berdasarkan penggunaan, terlihat bahwa kinerja perdagangan internasional Kalimantan Timur menurun. Besaran nilai ekspor luar negeri turun dari Rp. 341,45 triliun pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 256,98 triliun. Demikian juga besaran nilai impor luar negeri dari sebesar Rp. 119,09 triliun pada tahun 2014, menjadi sebesar Rp. 88,72 triliun pada tahun 2015. Penurunan kinerja perdagangan tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan luar negeri atas komoditas ekspor utama Kalimantan Timur, seperti batubara dan minyak, akibat terdapat perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (%)

Kategori Penggunaan	2015
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.28
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	8.30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-11.64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1.50
5. Perubahan Inventori	-34.47
6. Ekspor Luar Negeri	-12.93
7. Impor Luar Negeri	3.49
8. Net Ekspor Antar Daerah	120.94
P D R B	-1.28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010

Hingga akhir tahun 2015, terdapat penguatan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing (US Dollar) masih terus terjadi. Salah satu faktor yang mempengaruhi penguatan rupiah adalah adanya kebijakan dalam memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito bagi para eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Indonesia.

Di sisi lain, penguatan rupiah juga berpotensi mengakibatkan penurunan daya saing komoditas ekspor Indonesia, dengan kata lain, komoditas ekspor Indonesia menjadi relatif lebih mahal dibandingkan komoditas yang sama dari negara lain. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan permintaan atas komoditas ekspor Indonesia. Selain itu, terdapat sentiment negatif China akibat rencana kebijakan menurunkan nilai mata



uang Yuan. Kebijakan devaluasi tersebut dapat menciptakan tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia, yang akan berdampak terhadap nilai mata uang rupiah.

Pengaruh dinamika perekonomian global, terutama Tiongkok sebagai partner dagang utama Indonesia, sangat berdampak terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Secara umum, terdapat penurunan permintaan dari Tiongkok terutama komoditi tambang, kelapa sawit dan hasil perkebunan. Sebagai perekonomian yang didominasi oleh aktivitas pada sektor tambang, maka perlambatan ekonomi Tiongkok mengakibatkan penurunan aktivitas sektor Pertambangan di wilayah Kalimantan Timur.

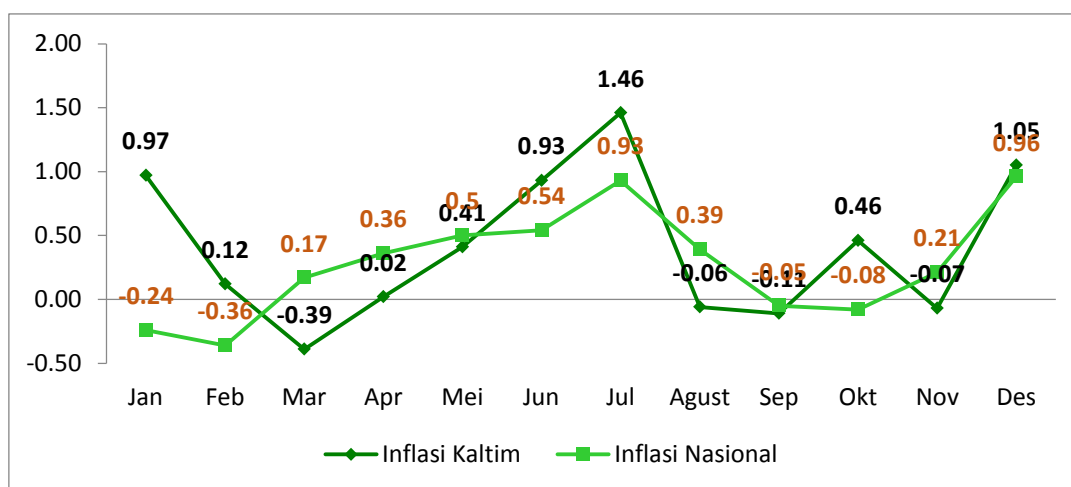
Kondisi tersebut menyebabkan situasi perdagangan khususnya produk unggulan sektor primer Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 mengalami ketidakstabilan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan nilai ekspor dan impor Kalimantan Timur antar waktu. Tercatat ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -12,93 persen, sedangkan impor mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen. Oleh karena itu, diperlukan perubahan strategi ekspor dari produk primer, yang relatif rentan terhadap perubahan harga global, menjadi produk barang jadi/konsumsi yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar.

III. Inflasi

Inflasi merupakan gambaran perubahan harga suatu wilayah yang dilihat dari sisi konsumennya. Inflasi dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menggambarkan perekonomian secara mikro suatu wilayah dengan memperhatikan perubahan harga konsumen dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil pemantauan selama bulan Januari-Desember 2015, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 4,89 persen (tahun kalender 2015). Inflasi kumulatif selama tahun 2015 ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 yaitu sebesar 9,65 persen. Jika dilihat secara rinci, 3 kota pembentuk inflasi di Provinsi Kalimantan Timur yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Tarakan, masing-masing mengalami inflasi sebesar 4,24 persen; 6,26 persen; dan 3,42 persen.



Gambar 3.4
Grafik Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional
Bulan Januari – Desember 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Pola pergerakan inflasi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2015 memiliki trend yang hampir sama dengan inflasi level nasional. Dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2015, pada bulan Januari, Februari, September dan Oktober mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,24 persen, -0,36 persen, -0,05 persen, -0,08 persen sedangkan bulan lainnya mengalami inflasi dengan capaian tertinggi pada bulan Desember sebesar 0,96 persen. Ekstrimnya inflasi pada bulan-bulan terakhir tahun 2015 ini dipicu karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi hampir di semua harga kebutuhan pokok masyarakat secara Nasional.

Selama tahun 2015, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dengan nilai inflasi paling besar berada pada kelompok bahan makanan yang mencapai 9,28 persen dan diikuti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (8,48%) serta kesehatan (5,82%). Sedangkan inflasi terendah berada pada kelompok transportasi & komunikasi yang mengalami deflasi mencapai 0,30 persen selama periode tahun 2015.



Tabel 3.5
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kalimantan Timur Tahun 2015 Menurut
Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2015	Inflasi Tahun Kalender			
		Kalimantan Timur	Samarinda	Balikpapan	Tarakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UMUM	126,42	4,89	4,24	6,26	3,42
1. Bahan Makanan	134,06	9,28	8,69	11,90	3,99
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau	134,73	8,48	10,27	6,40	7,25
3. Perumahan	121,46	3,09	1,86	5,03	2,23
4. Sandang	109,09	1,45	-0,09	3,02	2,59
5. Kesehatan	123,43	5,82	3,93	7,92	6,85
6. Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga	122,67	5,04	4,56	6,11	3,92
7. Transportasi & Komunikasi	125,50	-0,30	-1,98	1,97	-0,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

IV. Kemiskinan

Selama periode 2013-2015 (kondisi bulan maret), telah terjadi kenaikan angka kemiskinan baik secara absolut maupun persentase, dimana pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 237.960 jiwa kemudian meningkat menjadi 253.600 jiwa pada tahun 2014. Demikian pula angka kemiskinan yang meningkat menjadi 6,42 persen pada tahun 2014 dimana tahun sebelumnya tingkat kemiskinan hanya sebesar 6,06 persen. Namun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 212.890 dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,23 persen.

Jika dilihat dari klasifikasi wilayah administrasinya, jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selama periode Maret 2013-Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebanyak 7.470 ribu orang sedangkan di daerah pedesaan juga meningkat sebanyak 8.170 ribu orang. Selain itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal ini juga terlihat pada persentase penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan Maret 2014 sebesar 10,33 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,01 persen. Sedangkan



pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan menjadi 86.820 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,23 persen.

Tabel 3.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur Menurut Daerah,
Maret 2013 – Maret 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2011	92,14	155,77	247,90	4,06	11,21	6,77
Maret 2012	95,20	158,13	253,34	4,05	11,01	6,68
Maret 2013	90,42	147,54	237,96	3,71	9,90	6,06
Maret 2014	97,89	155,71	253,60	4,01	10,33	6,42
Maret 2015	86,82	126,06	212,89	4,03	9,96	6,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

1. Garis Kemiskinan Maret 2013 – Maret 2015

Garis kemiskinan merupakan suatu batasan pengeluaran per kapita penduduk dimana jika berada di bawah batasan tersebut maka penduduk dianggap memasuki kuadran miskin (tergolong penduduk miskin), begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan pada wilayah tersebut.

Garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur pada maret 2015 mencapai Rp. 473.710,- dengan jumlah penduduk miskin mencapai 212.890 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 212.890 penduduk Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengeluaran tidak lebih dari Rp. 473.710,- dalam waktu sebulan. Garis kemiskinan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014 di bulan yang sama dan peningkatannya mencapai 9,77 persen. Peningkatan garis kemiskinan yang cukup tinggi ini berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan juga tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Jika memperhatikan komponen garis kemiskinan, maka garis kemiskinan makanan lebih mendominasi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, maupun kesehatan).



Jika dilihat dari administrasi wilayah, garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan dengan garis kemiskinan pada bulan Maret 2015 di daerah perkotaan sebesar Rp 485.887,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 452.999,-. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Tabel 3.7
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Klasifikasi Wilayah, Maret 2013 - Maret 2015

Wilayah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Perkotaan</u>					
Maret 2013	285.303	115.829	401.132	90,42	3,71
Maret 2014	314.344	133.876	448.220	97,89	4,01
Maret 2015	337.970	147.917	485.887	86,82	4,03
<u>Perdesaan</u>					
Maret 2013	261.242	88.694	349.935	147,54	9,90
Maret 2014	301.084	103.470	404.554	155,71	10,33
Maret 2015	333.612	119.387	452.999	126,06	9,96
<u>Kota+Desa</u>					
Maret 2013	276.173	105.533	381.706	237,96	6,06
Maret 2014	309.285	122.275	431.560	253,60	6,42
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212,89	6,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Analisis kemiskinan memiliki berbagai kajian variabel berdasarkan survei sosial ekonomi nasional. Selain jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan, analisis terkait kemiskinan suatu wilayah harus memperhatikan tingkat kedalaman maupun tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan disparitas pengeluaran antar masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah daerah harus mampu merepresentasikan penurunan kemiskinan dengan meminimalisir kedalaman dan keparahan kemiskinan agar permasalahan kemiskinan tidak terus mengakar.



Pada periode Maret tahun 2014 hingga Maret tahun 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,077 pada keadaan Maret 2014 menjadi 0,904 pada keadaan Maret 2015. Demikian juga Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,188 menjadi 0,279 pada periode yang sama.

Jika dibandingkan antar wilayah, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan di wilayah perdesaan relatif lebih memprihatinkan dibandingkan wilayah perkotaan. Pada bulan Maret 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya sebesar 0,622 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,383. Ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih kecil dibandingkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di wilayah perkotaan. Selain itu, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,155 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,327. Hal ini berarti bahwa kesenjangan antar penduduk miskin di perdesaan lebih memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Tabel 3.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 - Maret 2015

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)</i>			
Maret 2013	0,421	1,495	0,828
Maret 2014	0,703	1,683	1,077
Maret 2015	0,622	1,383	0,904
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)</i>			
Maret 2013	0,104	0,325	0,188
Maret 2014	0,188	0,427	0,279
Maret 2015	0,155	0,327	0,219

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015



Tabel 3.9
Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Indikator Kinerja Daerah						Ket.
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.028.487	3.131.964	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638	Penduduk proyeksi
2.	Pertumbuhan Ekonomi (Th.Dasar 2010)	%	-	6.30	5.26	2.25	1.57	(1.28)	
3.	Laju Inflasi	%	7.28	6.35	5.60	9.65	7.66	4.89	Gabungan Kaltara
4.	Pendapatan per Kapita (Th. Dasar 2000)	Juta Rp	48,68	58,96	63,74	64,12	61,17	50,63	
5	Persentase penduduk miskin (Kondisi Maret)	%	7,66	6,77	6,68	6,06	6,42	6,23	
6.	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	749.360	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642	
6.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	363.367	403.719	450.920	508.706	508.801	549.351	
6.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	385.993	467.532	535.643	588.003	627.372	644.291	
7.	PDRB per kapita (Th.Dasar 2010)	Juta Rp	125,77	151,37	157,33	158,35	155,14	143,25	Tahun dasar 2010
8.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Milliar Rp & Ribu US\$	7.881,28 & 988.710,14	16.196.33 & 1.348.060,81	7.709.27 & 2.529.900,00	18.441.37 & 1.324.197,42	12.983.04 & 2.145.665,10	9.611.31 & 2.381.442,30	

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (Data diolah)

Pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi pada tahun 2015 akan berdampak terhadap perekonomian Nasional dan juga daerah. Hal ini disebabkan perekonomian Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh adanya tren penurunan harga dan permintaan komoditas global sektor mineral dan tambang berlangsung sepanjang



2015. Akibatnya, akan sulit bagi perekonomian Kalimantan Timur untuk melakukan ekspansi usaha pada sektor tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan akan terjadi perlambatan atau pertumbuhan negatif pada perekonomian Kalimantan Timur karena dominasi signifikan sektor tersebut dalam perekonomian secara total.

Selain itu, turunnya level permintaan Tiongkok masih menjadi isu terdepan dalam bisnis batubara, khususnya untuk regional Asia. Sebagai importer dan konsumen batubara terbesar di dunia, permintaan Tiongkok memainkan peranan penting dalam pembentukan harga batubara. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok menjadi penyebab utama masih akan tertahannya produksi batubara Kalimantan Timur. Pemerintah Tiongkok bahkan memberlakukan kebijakan pemotongan angka produksi sebesar 150 juta ton dan impor sejumlah 50 juta ton dalam menyikapi rendahnya harga di level domestik. Selain kebijakan tersebut efektif per 15 Oktober 2014 Pemerintah Tiongkok juga mulai memberlakukan pajak impor bagi batubara untuk memproduksi penambangan lokal.

Sama dengan Tiongkok, sentiment negatif juga masih terjadi pada pasar batubara Kalimantan Timur dengan tujuan Korea Selatan. Dalam menyikapi penerapan pajak impor yang baru yaitu US\$ 16,2/ton untuk kalori kurang dari 5.000 kc dan US\$18,2. Untuk yang lebih dari kalori tersebut, Importir Korea mulai mengalihkan review atas pajak tersebut, khususnya untuk batubara dengan kalori yang banyak dikomsumsi yakni 3.800 kc NAR. Importir mengusulkan agar khusus untuk kalori tersebut pajaknya ditambah menjadi US\$ 14,2/ton namun tampaknya review ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Perkembangan ekspor batubara Kalimantan Timur masih dapat terbantu dengan peningkatan batubara di India meskipun relatif masih terbatas.

Dari sisi migas berdasarkan hasil liaison diindikasikan bahwa sampai dengan awal 2015 penurunan lifting diperkirakan masih akan terus terjadi. Penurunan ini merupakan dampak belum adanya kepastian perpanjangan salah satu blok migas. Sentimen positif yang menjadi pendukung sedikit tertahannya kontraksi di sektor pertambangan migas terutama karena mulai berproduksinya beberapa proyek dengan total produksi sekitar 615 mmscfd.

Dari sisi fiskal penurunan harga minyak dan batubara di pasar Internasional juga berpotensi menurunkan Dana Bagi Hasil (DHB) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi



Kalimantan Timur khususnya DBH Sumber Daya Alam. Penurunan kapasitas fiskal tersebut menjadi faktor yang menghambat pemerintah dalam mempercepat infrastruktur di Kalimantan Timur.

Penurunan yang diperkirakan terjadi di sektor pertambangan dapat ditahan atau paling tidak diminimalisir dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan melalui upaya perbaikan pada sektor-sektor diluar sektor berbasis SDA. Indikator pertumbuhan ekonomi Non Migas dan Batubara menunjukkan angka positif (3,45 persen) di tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang peningkatan kinerja ekonomi melalui percepatan kinerja pada sektor berbasis non SDA. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan kinerja sektor berbasis non SDA dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Peningkatan kinerja sektor pertanian dilakukan dengan adanya program penguatan ketahanan pangan, pembangunan proyek infrastruktur strategis, dan berkembangnya industri pengolahan nonmigas. Perekonomian Kalimantan Timur juga akan didorong oleh sektor pengadaan listrik yang diperkirakan terus meningkat dalam dua tahun ke depan seiring dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam rencana usaha dan bisnis PT PLN yang akan mendirikan berbagai pembangkit listrik, dari sisi fiskal meskipun dana transfer pusat mengalami penurunan, namun pendapatan asli daerah justru semakin meningkat proporsinya.

Dari sisi harga pergerakan inflasi Kalimantan Timur 2015 diperkirakan masih mendapatkan tekanan baik dari sisi kebijakan pemerintahan maupun dari faktor non-fundamental seperti gangguan cuaca yang menyebabkan gangguan pada stok pangan dan distribusi mengingat Kalimantan Timur masih bergantung dari daerah lain. Resiko inflasi yang disebabkan oleh pangan masih cukup tinggi mengingat prognosa produksi pertanian di Kalimantan Timur masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Timur. Ketergantungan dari daerah lain masih menjadi andalan di tangan resiko cuaca ekstrim dan naik turunnya gelombang laut untuk mendukung kelancaran distribusi. Optimalisasi utilitas pelabuhan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi yang merupakan faktor penting dalam pengendalian inflasi. Selain bahan makanan, konsumsidurable goods masyarakat diperkirakan akan mengalami kenaikan di akhir tahun



sesuai dengan pola historis dimana konsumsi barang tahan lama cenderung meningkat di akhir tahun. Program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong terwujudnya swasembada pangan, serta meningkatnya *awareness* pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya inflasi akan menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Timur.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung melalui ukuran kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah sehingga memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansi. Realisasi dari penggunaan anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Biro Keuangan Sekda Prov. Kaltim dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah periode tahun-tahun sebelumnya, maka disusunlah laporan keuangan oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh Biro Keuangan.



Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Biro Keuangan.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2013 dapat dikatakan telah berhasil meskipun harus terus ditingkatkan karena hasil opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa “Wajar Tanpa Pengecualian”. Namun pada tahun 2014, opini BPK tersebut menurun kategorinya menjadi “Wajar Dengan Pengecualian” yang mengindikasikan terjadinya penurunan performa pelaporan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah perlu menjadi perhatian penting mengingat fokus utama reformasi birokrasi salah satunya adalah tertib administrasi yang mengindikasikan meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah.

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurunwaktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.10, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai -0,04 persen karena realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh penurunan hampir di seluruh unsur-unsur pendapatan daerah kecuali DAK dan Lain-lain pendapatan yang sah terutama pada Dana Penyesuaian. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama dari sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki sumbangan perekonomian terbesar di Kalimantan Timur.



Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) menurun signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,11 persen. Secara umum selama kurun waktu empat tahun terakhir, semua unsur PAD yang menunjukkan peningkatannya yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Namun pada tahun 2015 semua unsur pembentuk PAD tersebut mengalami penurunan 2,17 Trilyun rupiah. Peningkatan unsur PAD selama lima tahun terakhir ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan. Hal ini terjadi khususnya pada pajak daerah yang merupakan unsur dominan yang mampu memberikan kontribusi yang kuat terhadap PAD sekaligus menjadi indikasi tumbuhnya perekonomian daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2011 hingga tahun 2015 berada pada kisaran 40 s/d 50 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat berada pada tingkat sedang.

Penurunannya bagi hasil pajak/dan bukan pajak menggambarkan menurunnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pendapatan dari eksplorasi/eksploitasi SDA yang dibagikan kepada daerah. Sedangkan pada tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur diprediksikan tidak mendapatkan alokasi DAU disebabkan oleh adanya pelaksanaan formula DAU secara murni oleh Pemerintah Pusat. Secara menyeluruh Provinsi Kalimantan Timur dianggap mempunyai kapasitas fiskal yang cenderung lebih besar dari kebutuhan fiskalnya. Dengan demikian Provinsi Kalimantan Timur dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA).

Secara totalisasi realisasi anggaran dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata pertumbuhannya sebesar 14,12 persen. Demikian juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah terus meningkat sampai dengan tahun 2014 dan turun tajam pada tahun 2015 sebesar -44,63 persen.



Tabel. 3.10
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertum- buhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Pendapatan Daerah	9.819.128.719.766	11.904.245.269.325	11.631.697.051.829	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	(0,04)
1.	Pendapatan Asli Daerah	4.503.238.821.000	5.409.449.386.546	5.885.262.003.582	6.664.586.023.490	4.950.160.613.906	4,11
1.1	Pajak Daerah	3.679.366.875.394	4.486.404.585.941	4.929.791.598.766	5.429.125.998.687	3.753.718.935.815	2,77
1.2	Retribusi Daerah	13.699.032.146	22.495.631.489	33.676.707.132	15.494.252.850	14.722.788.428	13,74
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	215.652.586.910	207.793.800.917	291.684.072.009	310.199.925.478	230.116.057.794	4,31
1.4	Lain-lain PAD yang sah	594.520.326.548	692.755.368.197	630.109.625.673	909.765.846.475	951.602.831.867	14,12
2	Dana Perimbangan	5.298.979.487.224	6.089.860.849.779	5.335.759.149.747	4.253.320.982.625	4.503.361.198.970	(2,97)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	5.206.240.970.224	5.984.332.194.779	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	(6,67)
2.2	DAU	51.446.845.000	52.637.761.000	55.539.336.500	57.312.515.000	-	(22,25)
2.3	DAK	38.188.100.000	34.616.130	8.047.840.000	1.037.925.000	218.651.350.000	10,982
2.4	Dana Penyesuaian	3.103.572.000	389.642.906.000	394.630.725.500	352.611.956.905	479.336.143.560	3.120,31
2.5	Dana Insentif Daerah	-	18.274.764.000	-	-	-	579,75
3	Lain-Lain PAD yang sah	16.910.411.542	404.935.033.000	410.675.898.500	369.393.934.905	490.741.036.560	579,70
3.1	Pendapatan Hibah	16.910.411.542	15.292.127.000	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	(8,02)

Sumber : data diolah

3.2.1.2 Belanja Daerah

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Proporsi realisasi penggunaan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut :



Tabel 3.11
Penggunaan Anggaran Belanja Daerah

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertum- buhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.679.991.711.193	6.126.151.180.250	7.103.434.643.017	6.414.604.671.509	5.734.352.717.948	6,64
5.1.1	Belanja Pegawai	697.747.236.397	765.957.564.746	779.583.156.002	930.549.932.815	942.463.194.421	8,05
5.1.4	Belanja Hibah	683.777.651.238	856.807.352.926	1.567.763.966.225	909.317.897.000	966.801.166.000	18,15
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	130.812.760.000	7.073.500.000	3.940.000.000	4.249.500.000	4.419.500.000	(31,76)
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.863.896.580.000	2.132.835.257.000	2.692.808.046.400	2.563.201.309.381	2.440.676.447.219	7,77
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.303.592.971.058	2.354.896.681.578	2.059.339.474.390	2.005.786.032.312	1.376.558.162.630	8,53
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	165.512.500	8.580.824.000	-	1.500.000.000	3.434.245.678	1.691,47
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.462.843.739.100	5.213.614.008.923	6.676.810.264.458	4.860.027.165.524	4.470.989.576.263	10,85
5.2.1	Belanja Pegawai	279.925.761.545	493.003.243.597	568.035.668.614	494.596.159.995	525.218.903.701	21,15
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.406.715.197.264	2.221.477.609.282	2.457.692.779.178	2.154.150.620.058	1.938.639.863.065	11,55
5.2.3	Belanja Modal	1.776.202.780.290	2.499.133.156.044	3.651.081.816.665	2.211.280.385.471	2.007.130.809.495	9,53
Jumlah Belanja		8.142.835.450.293	11.339.765.189.174	13.780.244.907.476	11.274.631.837.034	10.205.342.294.212	8,28
Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)		57,47	54,02	51,55	56,89	56,19	(0,36)
Proporsi Belanja Langsung (%)		42,53	45,98	48,45	43,11	43,81	1,02

Sumber : data diolah

Secara umum, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan belanja. Sebagian besar realisasi belanja digunakan untuk belanja tidak langsung mencapai 56,19 persen pada tahun 2015 yang artinya semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat daerah. Secara umum, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung sama dengan realisasi belanja langsung yang mencapai 43,81 persen selama lima tahun terakhir. Namun yang perlu digarisbawahi adalah belanja bantuan sosial yang mengalami penurunan besaran belanja dari tahun ke tahun (bahkan rata-rata pertumbuhannya



mencapai -31,76 persen). Analisis terhadap realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dlm juta rupiah	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) dlm juta rupiah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	1.270.750	8.142.835	15.61%
2	2012	1.514.854	11.339.765	13.36%
3	2013	1.696.672	12.900.000	13.15%
4	2014	1.587.234	12.217.683	12.99%
5	2015	1.223.918	9.699.058	12,19%

Sumber : data diolah

Dari Tabel 3.12 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 15,61 persen hingga 12,19 persen pada tahun terakhir. Selain disebabkan total pengeluaran pemerintah yang meningkat tajam, penurunan ini disebabkan pula karena upaya pemerintah untuk lebih memprioritaskan belanja publik untuk memenuhi sarana dan parasarana dasar kebutuhan masyarakat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.



Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Informasi realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini. Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2011-2015 (data tahun 2015 merupakan target belanja) dapat dijelaskan antara lain:

- Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 10,15 persen. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.
- Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung adalah sebesar 7,91 persen. Dalam pengecekannya, perhitungan kenaikan ini disebabkan karena semua unsur belanja tidak langsung cenderung meningkat. Terlebih lagi unsur belanja bagi hasil yang dominan juga meningkat baik dari sisi jumlah dana maupun persentase.

Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung adalah sebesar 83,06 persen yang disebabkan karena semua unsur belanja langsung cenderung meningkat.

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Belanja Tidak Langsung	2.472.776	2.782.161	3.063.571	3.617.431	3.289.765	7,91%
1	Gaji dan Tunjangan	321.603	345.849	465.048	467.878	414.013	7,78%
2	Tambahan Penghasilan PNS	274.906	290.737	323.347	354.834	421.576	11,38%
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.370	12.740	13.621	15.268	13.482	2,58%



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Prov.up aten/Kota dan Pemerintah Desa	1.863.897	2.132.835	2.261.555	2.779.451	2.440.676	7,79%
B.	Belanja Langsung	37.833	50.749	48.227	48.227	194.396	83,06%
5	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	-		-	-	-	-
6	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	26.492	35.818	28.695	37.765	18.040	(1,33)%
7	Belanja Jasa Kantor	11.341	14.931	19.532	23.914	57.891	56,75
	- Belanja Air	4.412	5.283	4.645	4.914	4.230	(0,12)%
	- Belanja Listrik	3.540	4.445	5.302	6.281	32.730	121,10%
	- Belanja Surat Kabar/ Majalah	2.591	3.145	3.485	4.336	2.891	5,82%
	- Belanja Kawat /Faksimili/ Internet	798	2.059	6.100	14.105	6.626	108,12%
	- Belanja Sewa Gedung	-	-	-		11.414	
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-		10.574	
C.	Pembiayaan pengeluaran					50.000	
9	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-			
10	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-			
Total		2.521.950	2.847.842	3.131.330	3.665.658	3.690.318	10,15%

3.2.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA). pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman. dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran.



Tabel 3.14
Defisit Riil Anggaran

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Pendapatan	9.819.128.719.766	11.904.245.269.325	11.631.697.051.829	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	(0,04)%
Dikurangi Realisasi							
2.	Belanja Daerah	8.142.835.450.293	11.339.765.189.174	13.780.244.907.476	11.274.631.837.034	10.205.342.294.212	8,28%
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	491.006.923.000	202.800.000.000	-	25.000.000.000	50.000.000.000	(426,66)%
Defisit Riil (Realisasi)		1.185.286.346.473	361.680.080.151	(2.148.547.855.647)	(12.330.896.013)	(790.415.588.336)	1.361,77%

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi penutup defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 3.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	2.837.723.895.208	3.198.903.975.359	1.050.356.119.713	1.038.125.223.699	1.036.628.546.594	(13,94)%
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-		
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-		
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-		
4.	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	2.837.723.895.208	3.198.903.975.359	1.050.356.119.713	1.038.125.223.699	0	



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-		

Sumber :Data Diolah

SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya menunjukkan bahwa tahun 2011-2015 terjadi penurunan dengan rata-rata sebesar -13,94 persen. Hal ini dapat menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan efektifitas penggunaan anggaran terutama pada dua tahun terakhir yang sisa lebih penghitungan anggarannya menurun cukup drastis.

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir selama pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2017 sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2011-2015) maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode pembangunan tahun 2017.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini secara umum menggunakan nilai PDRB.



3.2.2.1 Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan. Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.



Tabel 3.16
Target Pendapatan Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017

URAIAN	TARGET	
	PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN	7.680.946.727.108	7,710,900,000,000
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.921.364.868.077	3.987.661.455.000
I. Pajak Daerah	2.942.500.000.000	3.034.590.000.000
II. Retribusi Daerah	16.454.410.000	23.133.125.000
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	169,428,483,076	161.561.830.000
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	792,981,975,000	768.376.500.000
B. DANA PERIMBANGAN	3.731.399.811.432	3.704.106.545.000
I. Bagi Hasil Pajak	739.882.675.667	610.168.829.716
II. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.878.590.353.533	1.310.246.812.400
III. Dana Perimbangan Lainnya		
a. Dana Alokasi Umum	65.298.295.232	649.653.898.884
b. Dana Alokasi Khusus	1.047.628.487.000	1.133.767.004.000
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.182.047.600	19.402.000.000
I. Pendapatan Hibah	23.182.047.600	11.902.000.000
II. Dana Penyesuaian Otonomi khusus	5.000.000.000	7.500.000.000

Sumber : Data Diolah

3.2.2.2 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Belanja wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan tunjangan PNS serta gaji dan tunjangan anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Belanja wajib dan mengikat adalah belanja yang harus dipenuhi sebagai kewajiban daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Rencana belanja wajib dan mengikat di 2016 sebesar Rp.5.561.020.431.500,- sedangkan proyeksi tahun 2017 menjadi Rp.5.087.978.862.945,- dilihat dari tabel 3.17



Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Tidak Langsung	4.452.440.216.500	3.694.432.468.770
	1. Belanja Pegawai	991.505.280.000	1.830.002.393.770
	2. Hibah dan Bansos Wajib	1.108.263.200.000	37.250.000.000
	3. Bantuan Keuangan Spesifik	861.149.236.500	1.553.000.000
	4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.478.522.500.000	1.825.627.075.000
2.	Belanja Langsung	1.108.580.215.000	1.393.546.394.175
	I. Belanja MYC	505.315.700.000	695.846.394.175
	1. Tol	242.679.523.324	297.335.033.234
	2. Bandara Samarinda Baru	172.064.394.150	256.087.515.833
	3. Jembatan Mahakam 4	15.109.396.000	43.417.964.000
	4. Jalan Pendekat Mahakam 4	28.735.457.000	34.300.542.287
	5. SPAM Maloy	26.267.820.000	30.978.515.720
	6. Pembangunan Sistem Air Baku Sekerat	20.459.109.526	33.726.823.101
	II. BLUD	603.264.515.000	697.700.000.000
	1. RSUD. AWS. Samarinda	378.664.515.000	470.200.000.000
	2. RSUD. Kanujoso Djatiwobowo	204.000.000.000	204.000.000.000
	3. UPTD. Lab Kes Dinas Kesehatan	3.100.000.000	3.500.000.000
	4. RSJD. Atmahusada Mahakam	17.500.000.000	20.000.000.000
	Total	5.561.020.431.500	5.087.978.862.945

Sumber : data diolah

3.2.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2017 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2017 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, regional maupun lokal serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian yang cukup berefek pada skala internasional.

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut



tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja (USK) terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Dari jumlah pendapatan daerah sebesar Rp.7.710.900.000.000,-diperkirakan dibelanjakan sebesar Rp.5.087.978.862.945,-untuk Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor,



sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2016-2017 seperti tabel berikut :

Tabel 3.18
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TARGET	
		PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan	7.680.946.727.108	7.710.900.000.000
2.	Pencairan Dana Cadangan		
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	226.826.272.891	-
	Total Penerimaan	7.907.772.999.999	7.710.900.000.000
	Dikurangi		
4.	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	5.561.020.431.500	5.087.978.862.945
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.346.752.568.499	2.622.921.137.055

Sumber: data diolah

3.2.2.4 Proyeksi Belanja

Rencana belanja tahun 2017 diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah.

Adapun rencana belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar Rp.7.710.900.000.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.677.5247.145.000,- dan Belanja Langsung Rp.3.033.372.855.000,- selanjutnya dapat dilihat tabel 3.19.

Tabel 3.19
Struktur Belanja Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017

NO	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan	7.680.946.727.108	7.710.900.000.000
2.	Belanja	8.242.773.000.000	7.710.900.000.000
2.1	Belanja Tidak Langsung	4.452.440.216.500	4.677.527.145.000
	2.1.1 Belanja Pegawai	991.505.280.000	1.830.002.393.770
	2.1.2 Belanja Subsidi	-	-



NO	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.1.3 Belanja Hibah	1.104.393.100.000	890.391.848.000
	2.1.4 Belanja Sosial	3.870.100.000	5.500.000.000
	2.1.5 Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota	1.478.522.500.000	1.825.627.075.000
	2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota	861.149.236.500	106.005.828.230
	2.1.7 Belanja Tak Terduga	13.000.000.000	20.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	3.790.332.783.500	3.033.372.855.000
	2.2.1 Belanja Pegawai	341.129.950.515	273.003.556.950
	2.2.2 Belanja Barang & Jasa	1.591.939.769.070	1.274.016.599.100
	2.2.3 Belanja Modal	1.857.263.063.915	1.486.352.698.950
	Surplus / Defisit	(561.826.272.892)	-

Sumber: data diolah

3.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam ekstensifikasi meliputi:

1. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
 - a. Menjamin kepastian hukum.
 - b. Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
2. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak.
 - b. Meningkatkan pelayanan.
 - c. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2017, terdapat beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan antara lain:

1. Bidang Pajak Daerah.

- A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan;
 - 1) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.



- 2) Menambah kantor samsat pembantu/unit pelayanan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk terutama di daerah pesisir dan daerah perbatasan.
 - 3) Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 ke bawah.
 - 4) Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
 - 5) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - 6) Membangun *counter-counter* pelayanan pada mall/pusat perbelanjaan di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang termasuk menyediakan layanan payment point dengan menggunakan jasa perbankan (BanKalimantan Timur) sampai ke tingkat pedesaan.
 - 7) Menyediakan *Speed Boat Delivery Order* yang ditempatkan di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan baru, dan Sungai Lais, dan menjangkau wajib pajak di daerah terpencil, serta sulit dilalui roda 4, juga disediakan sepeda motor *Delivery Order*.
 - 8) Dispenda sudah berkerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk menempatkan mobil Samsat Kampus.
 - 9) Meningkatkan mutu layanan berstandar ISO di seluruh kantor bersama Samsat.
 - 10) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi penerimaan.
 - 11) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - 12) Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:
- 1) Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
 - 2) Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah kepada para Dealer dan Agen Tunggal pemegang merk termasuk Badan Leasing.



- 3) Melakukan Kegiatan Penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna Alat Berat/Besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
- 4) Membuat kebijakan pemberian insentif pengurangan BBNKB bagi Wajib Pajak yang bernomor polisi luar daerah Kalimantan Timur untuk memutasikan ke Nomor Polisi Kalimantan Timur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
- 5) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis Dump Truck yang tidak menggunakan jalan umum.
- 6) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
- 7) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi.
- 8) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
- 9) Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.

C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:

- 1) Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda No.01 Tahun 2011.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
- 3) Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
- 4) Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
- 5) Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
- 6) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala



termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

D. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan kebijakan:

- 1) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
- 3) Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

2. Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan:

- A. Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
- B. Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran.
- C. Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- D. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- E. Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- F. Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

3.2.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



3. Belanja bagi hasil pada kabupaten/kota merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program-program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
7. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 119 prioritas pembangunan Tahun 2017.
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun rencana dan proyeksi struktur belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20
Rencana Struktur Belanja Daerah Tahun 2016-2017

URAIAN		JUMLAH	
		PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan	7.680.946.727.108	7.710.900.000.000
2.	Belanja	8.242.773.000.000	7.710.900.000.000
2.1.	Belanja tidak langsung	4.452.440.216.500	4.677.527.145.000
2.2.	Belanja Langsung	3.790.332.783.500	3.033.372.855.000
	Surplus / Defisit	(561.826.272.892)	0

Sumber : data diolah



Belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, akan meliputi:

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 persen anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 (sepertiga) untuk upaya kuratif dan 2/3 (dua per tiga) untuk upaya preventif;
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja dan Penyediaan insfrastruktur dasar bagi masyarakat miskin;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dengan Peningkatan kualitas tenaga kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga dan efesiensi distribusi barang, peningkatan investasi sektor UMKM, mmperbaiki tata niaga dan pamesaran produk UMKM danpengarusutamaan gender serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga;
6. Percepatan transformasi ekonomi dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan investasi daerah degan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, peningkatan ekspor produk olahan dan pengembangan zonasi kawasan agroindustri hilirisasi sumber daya mineral, gas, dan batubara;
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan dengan peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dan peningkatan rasio elektrifikasi;
8. Pengembangan Agrobisnisdengan meningkatkan ekspor produk olahan unggulan, konektivitas insfratraktur dasar menuju setra agribisnis, penyediaan SDM pendukung yang berkualitas dan penerapan inovasi teknologi agribisnis;
9. Peningkatan produksi pangan dengan peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan insfrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas pertanian dan penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian;



10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan dan peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan;
11. Reformasi birokrasi dan layanan publik dengan standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas focus dan peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur; dan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup Penurunan emisi gas rumah kaca, Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi, perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan, Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas udara dan lingkungan hidup perkotaan, serta penegakan hukum lingkungan.

3.2.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerapan anggaran defisit dalam RKPD tahun 2017 sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan untuk stimulasi ekonomi melalui tambahan belanja infrastruktur dalam APBD. Adapun defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp. 0 milyar, seperti pada tabel 3.20 selanjutnya akan dipenuhi melalui sumber Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 0 Milyar.

Penentuan besaran pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan adanya sisa lebih penyerapan anggaran tahun anggaran 2017.



Tabel 3.21
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 dan Rencana 2017

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENETAPAN TAHUN 2016	RENCANA RPJMD TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	800.000.000.000	
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)	-	-
2.	Pencairan dana cadangan	-	-
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	100.000.000.0000	-
3.	Pembayaran pokok utang	-	-
4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	800.000.000.000	-

Sumber: Data diolah

Ke depannya, untuk lebih mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam **menggal sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada**, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih di kaji untuk dikembangkan di Kalimantan Timur adalah pelaksanaan program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) atau selanjutnya disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu terus mendapat



dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA melimpah, serta dengan keberadaan jumlah perusahaan Internasional maupun nasional yang cukup banyak, maka potensi dana CSR merupakan salah satu poin yang perlu diperhatikan kemanfaatannya.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah administrasi di Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas Pulau Kalimantan yakni potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini akan menjadi modal dasar untuk mengembangkan setiap gerak langkah pembangunan daerah dengan tujuan menyejahterakan masyarakat secara merata. Hal inilah yang menjadi kunci dari prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sehingga layak untuk dirumuskan perencanaan pembangunan secara seksama.

Kondisi riil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada era sekarang memiliki berbagai tantangan dan kendala serta faktor penghambat yang memberikan efek negative dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kurang optimalnya implementasi dan realisasi perencanaan pembangunan daerah menyebabkan masih terdapat kesenjangan antara target capaian kinerja pemerintah dengan realita kondisi pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pada perencanaan pembangunan selanjutnya perlu menekankan dan fokus pada beberapa permasalahan mendasar pembangunan daerah melalui berbagai kajian dan analisis sektoral sehingga hasil yang didapatkan cukup relevan untuk merumuskan perencanaan pembangunan ke depan.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Jangka Menengah Tahun 2013-2018 hampir memasuki klimaks periodik dimana pelaksanaan pembangunan telah berada pada tahun 2016 dan perumusan perencanaan pembangunan tahun 2017 telah disusun. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan baik nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sendiri.



Penting adanya penjabaran secara umum namun relevan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional era Presiden Ir. Joko Widodo untuk menyusun berbagai kebijakan dalam RKPD 2017. Hal ini akan mencerminkan sebuah integrasi baru antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen perencanaan jangka menengah nasional melalui hirarki revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2017 ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan revisi perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi untuk mengakomodir perubahan kebijakan level nasional utamanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam bab ini akan membahas prioritas pembangunan yang merupakan kebijakan berupa program dan kegiatan unggulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan skala prioritas paling tinggi (*output & outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian akan dapat diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal maka langkah selanjutnya menyusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan, penyempurnaan kebijakan, hingga revisi kebijakan agar dalam pembangunan nasional selalu mengalami peningkatan capaian kinerja. Perubahan kebijakan ini semakin nyata terlihat ketika pergantian presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia dimana setiap visi dan misi yang diembannya memiliki beberapa perbedaan dengan pendahulunya.

Perbedaan pandangan kebijakan ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan selama masih mengacu pada pokok pembangunan jangka panjang nasional utamanya sesuai



peraturan perundang-undangan nasional yang masih berlaku. Meskipun begitu, dampak perubahan kebijakan ini memiliki berbagai sisi negatif maupun positif ketika dihierarki vertikal ke bawah yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karenanya, perlu adanya kajian dan analisa kembali terhadap kebijakan nasional sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam merevisi dan merumuskan kembali berbagai dokumen perencanaan pembangunan.

Pada periode saat ini, Pemerintahan Republik Indonesia berada pada periode 2015-2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan nasional yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

TRISAKTI:

1. Kedaulatan dalam politik
2. Berdikari dalam ekonomi
3. Kepribadian dalam kebudayaan

Dimana Trisakti merupakan modal dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara professional, konsekuen, dan berkesinambungan. Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan nasional, **TRISAKTI** dijabarkan menjadi berbagai prioritas utama pada realisasi pembangunan nasional yang diuraikan secara umum sebagai berikut :

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4 prioritas utama)
2. Memperkuat sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama)
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama)
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama)
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama)
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama)



8. Memberdayakan Desa (8 prioritas utama)
9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama)
10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama)
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas utama)
12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5 prioritas utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (1 prioritas utama)
2. Membangun kedaulatan Pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan (4 prioritas utama)
3. Dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional (9 prioritas utama)
4. Penguasaan sumber daya alam (7 prioritas utama)
5. Membangun pemberdayaan Buruh (10 prioritas utama)
6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional (4 prioritas utama)
7. Penguatan investasi sumber domestik (10 prioritas utama)
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara (8 prioritas utama)
9. Penguatan infrastruktur (40 prioritas utama)
10. Pembangunan ekonomi maritim (9 prioritas utama)
11. Melakukan penguatan sektor kehutanan (14 prioritas utama)
12. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutan (7 prioritas utama)
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan (13 prioritas utama)
14. Membangun karakter dan potensi pariwisata (4 prioritas utama)
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional (8 prioritas utama)
16. Pengembangan industri manufaktur (7 prioritas utama)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa (10 prioritas utama)
2. Memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial (5 prioritas utama)
3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga (10 prioritas utama)



Ketiga Trisakti ini secara terintegrasi akan memberikan suatu motivasi utuh kepada setiap pelaksana sektoral pemerintahan pusat maupun daerah untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional juga dirumuskan Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas sebagai landasan berkehidupan. Hal ini juga diwujudkan dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan serta tercapai target yang diinginkan. Berikut Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas pembangunan pada masa pemerintahan nasional periode 2015-2019:

VISI:

**"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"**

MISI:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA** yang rinciannya sebagai berikut:



1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sebagai sebuah agenda prioritas nasional, NAWA CITA akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari beberapa inovasi-inovasi kebijakan yang terangkum dalam agenda prioritas yang secara tidak langsung memberikan “perintah” bagi daerah untuk menaatinya. Inovasi yang cukup fenomenal bagi masyarakat Republik Indonesia adalah jargon “Revolusi Mental” yang diusung oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada setiap perumusan kebijakannya akan memberikan warna tersendiri bagi perencanaan pembangunan daerah.

Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan tahun 2017 akan mengakomodir setiap revisi dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang telah direvisi dan disesuaikan dengan kebijakan nasional. Hal ini dilakukan karena pada masa penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, masih menggunakan kebijakan



pembangunan nasional presiden terdahulu, sehingga untuk meng-up date setiap arahan pemerintah pusat perlu dilakukan revisi.

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mengimplementasikan kebijakan nasional, sehingga secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melaksanakan berbagai penyempurnaan dan revisi kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional di bawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo. Oleh karena itu, pada rumusan arah kebijakan (program dan prioritas) perencanaan pembangunan tahun 2017 telah dilakukan penajaman arah kebijakan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan nasional dengan tetap membawa karakteristik daerah sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Berikut penajaman arah kebijakan pembangunan tahun 2017 yang merupakan turunan dari penajaman arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1	Strategi 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya		
3	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya		
4	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	2	Strategi 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
5	Melakukan revolusi karakter bangsa		
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	3	Strategi 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		4	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	5	Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6	Strategi 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
		7	Strategi 7 : Pengembangan Agribisnis
		8	Strategi 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi
		9	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan
		10	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
9	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	11	Strategi 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		12	Strategi 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Penajaman arah kebijakan (prioritas dan sasaran) untuk tahun 2017 ini akan memberikan suatu sinkronisasi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus akan memberi percepatan pencapaian target jika dilaksanakan secara utuh dan optimal. Penajaman arah kebijakan ini juga harus diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memegang penyesuaian kebijakan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya review kembali terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah apakah masih layak untuk dilaksanakan, apakah perlu penambahan program dan kegiatan, atautkah perlu juga penghapusan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Tema RKP tahun 2017 (RPJMN 2015-2019): **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 - 6,6 persen.
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 9,5 - 10,5 persen.
3. Pencapaian target pengangguran sebesar 5,3 - 5,6 persen.
4. Laju Inflasi 4,0.



A. Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019

Keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Kalimantan.

Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas untuk penunjang pengembangan wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Kalimantan menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kalimantan Timur dalam kancah pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional dengan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar “Pembangunan Wilayah Kalimantan” adalah:



- 1) Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
- 2) Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
- 3) Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; serta
- 4) Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

C. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata



3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan;
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;
5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan



proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) Terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur); serta

8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pulau Kalimantan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai realisasi bentuk pencapaian visi dan misi pembangunan, maka disusunlah target prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur oleh Pemerintah Pusat pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Target Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

NO	SASARAN NASIONAL	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5	5,6	5,6	6,4	7,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,1	4,7	4,3	3,9	3,5
3	Tingkat Pengangguran (%)	8,4	8,0	7,6	7,2	6,9

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)



Jika menyandingkan target RPJM Nasional untuk regional Kalimantan pada tahun 2016 dengan target RKPD yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, maka terlihat perbedaan yang menjelaskan melalui fenomena maupun data dan informasi. Perbedaan tersebut sebagian besar karena karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada Pulau Kalimantan dimana sumber daya alam yang melimpah namun mengingat sumber daya alam tersebut tidak dapat terbaharui maka semakin lama pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal tersebut disebabkan karena dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur sehingga menurunnya produksi pertambangan dan penggalian akan berakibat signifikan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Poin penting dalam target sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah target pertumbuhan ekonomi dengan migas yang mengalami perubahan dikarenakan isu strategis terkait lingkungan hidup yang menurunkan permintaan ekspor batubara seperti dari Negara Tiongkok meskipun terjadi perluasan ekspor ke Negara India. Selain itu, menurunnya eksplorasi dan produksi sektor pertambangan dan batubara baik batubara, minyak bumi, maupun gas alam menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sektoral yang signifikan dan otomatis mempengaruhi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh. Berikut sasaran target nasional dan target Provinsi Kalimantan Timur yang telah direvisi pada tahun 2016 ini. Dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran	Target Tahun 2017	
		Nasional	Provinsi Kalimantan Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,6	0,5±1
2	Tingkat Kemiskinan	4,3	5,15
3	Tingkat Pengangguran	7,6	6,00

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)



4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018. Prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi baik dari eksternal (nasional dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang lain). Oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi penting. Hal ini mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Gubernur Kalimantan Timur, yaitu :

**MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN**

VISI :

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yaitu mewujudkan **Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan** yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada **pengembangan agroindustri dan berbasis energi ramah lingkungan**.

MISI :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.



Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dapat seoptimal mungkin mencapai target-target kinerja pembangunan khususnya indikator kinerja pembangunan sesuai yang telah disepakati. Secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung terkait dalam pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas.

Terkait hal tersebut, dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2017.
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro environment*.
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan provinsi.
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2017.
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam



rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan **penjabaran tahun ke empat dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**. Terkait hal tersebut, dengan memedomani dokumen RPJMD maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2017.

Tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- **Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim**

Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai peranan kunci dalam menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam meningkatkan kualiyas SDM melalui pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, dengan salah satunya memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan hal ini, kita diharapkan mampu meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Peningkatan SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan hal ini maka pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Dengan demikian, program pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin agar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan dan menikmati hasil pembangunan daerah dapat terwujud.



Guna mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,42;**
- 2. Meningkatnya angka melek huruf menjadi 98,80 persen;**
- 3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 11,50 tahun;**
- 4. Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 72,50 tahun; dan**
- 5. Meningkatnya pendapatan perkapita menjadi Rp. 52,65 juta.**

• **Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan menjadi komponen penting dalam pencapaian pembangunan daerah. Keberhasilan dalam berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat terlihat dengan sejahtera dan tidaknya masyarakat. Salah satu indikasi kesejahteraan adalah kesehatan, mutu kesehatan masyarakat yang baik atau tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Dengan hal ini, Provinsi Kalimantan Timur harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah pedalaman dapat menjangkau pelayanan kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Selain aspek kesehatan, penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan terutama dalam aspek sosial masyarakat. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.



Dengan peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri, jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:

- 1. Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 5,15 persen;**
- 2. Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 6,00 persen;**
- 3. Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli Rp.779.016 dengan tingkat inflasi sebesar 4 ± 1 ; dan**
- 4. Menurunnya Indeks Gini pada skala 0,32.**

- **Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau**

Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya. Hal ini dilakukan dengan melalui pemberdayaan pertanian dalam arti luas di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi Hijau dimaknai dengan pembangunan pada sector ekonomi yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Pembangunan perekonomian yang dimaksud adalah pembangunan yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan serta hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembangunan tetap dapat dilaksanakan akan tetapi kelestarian alam dan ekosistem alam dapat terjaga.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar:**
 - a. 4,2 - 4,8 persen (Laju pertumbuhan ekonomi migas),**
 - b. 8,0 -8,7 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas), dan**



- c. **7,8-8,4 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara);**
- 2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 9,00 persen;**
- 3. Tercapainya swasembada pangan (rasio pemenuhan beras) sebesar 86,00 persen;**
- 4. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebesar 2,12 persen;**

- **Tujuan 4: Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. Melihat pentingnya infrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Pembangunan infrastruktur seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu dalam perencanaan ke depan, tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran, **“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,80”**.

- **Tujuan 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan good governance diperlukan peran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan



pemerintahan daerah. Dengan masyarakat berpartisipasi aktif maka segala hal/tindakan yang berindikasi negative dapat dicegah atau diatasi.

Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,70 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;**
- 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 83 (sangat baik);**
- 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 78,00 (B+) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”;**

- **Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah diharapkan akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukungan lingkungannya. Sehingga berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral menjadi pendukung penuh dalam usaha sector kehutanan, sector perkebunan, sektor pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah. Namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 81,14; dan tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton CO₂/US \$juta PDRB (tahun 2013) menjadi 1.300 ton CO₂/US \$ juta PDRB (tahun 2017).**

Tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil atau target yang diharapkan dari suatu tujuan dengan formulasi terukur,



spesifik, mudah dicapai, serta rasional sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini juga memiliki sasaran yang harus dicapai pada tahun berkenaan. Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal (2013)	Realisasi 2015	Target 2017
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi					
1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	76,71	74,17	77,42
	2. Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf (%)	98,30	98,69	98,80
	3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,60	9,15	11,50
	4. Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	71,40	73,65	72,75
	5. Meningkatnya pendapatan perkapita	Pendapatan per kapita (juta rupiah)	44,65	50,63	52,65
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan					
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	6. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	6,23	5,15
	7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	8,90	7,50	6,00
	8. Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)*	9,65	4,89	5,90+1
		Paritas daya beli/PPP (Rp)	649.850	11.019	779.1016
	9. Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,36	0,32	0,32



Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal (2013)	Realisasi 2015	Target 2017
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	4,59	-1,28	4,2-4,8
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,17	-1,48	8,0-8,7
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	7,47	3,45	7,8-8,4
	11. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	6,50	7,62	9,00
	12. Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	70,17	86,00
	13. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	1,01	2,12
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata					
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	6,21	6,80
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik					
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	15. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	5,20	5,58	6,70
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP
	16. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 (baik)	75,65 (baik)	83 (sangat baik)
	17. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	75,14 (B+)	78,00 (B+)
		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi



Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal (2013)	Realisasi 2015	Target 2017
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim					
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	18. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,07	81,97	81,14
	19. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US \$ juta)	1.500	1.738	1.300

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

Optimisme pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan efek positif pada pelaksanaan hierarki pembangunan daerah tingkat II (kabupaten/kota). Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan akan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan dari pemerintah provinsi (termasuk SKPD) dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018, serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2017 untuk beberapa indikator utama pembangunan daerah. Dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Target Peningkatan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Kabupaten/Kota	IPM	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran	Tingkat Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Samarinda	79,15	6,29	6,29	3,05
2. Balikpapan	81,31	6,06	6,92	2,17
3. Bontang	78,29	5,90	9,48	5,16
4. Berau	75,77	7,95	4,98	4,41
5. Paser	76,60	9,13	7,75	7,01
6. PPU	74,87		6,67	7,88
7. Kutai Barat	76,78	6,95	7,04	5,65
8. Kutai Timur	74,66	10,55	5,26	8,20
9. Kutai Kartanegara	77,20	20,85	5,81	3,35

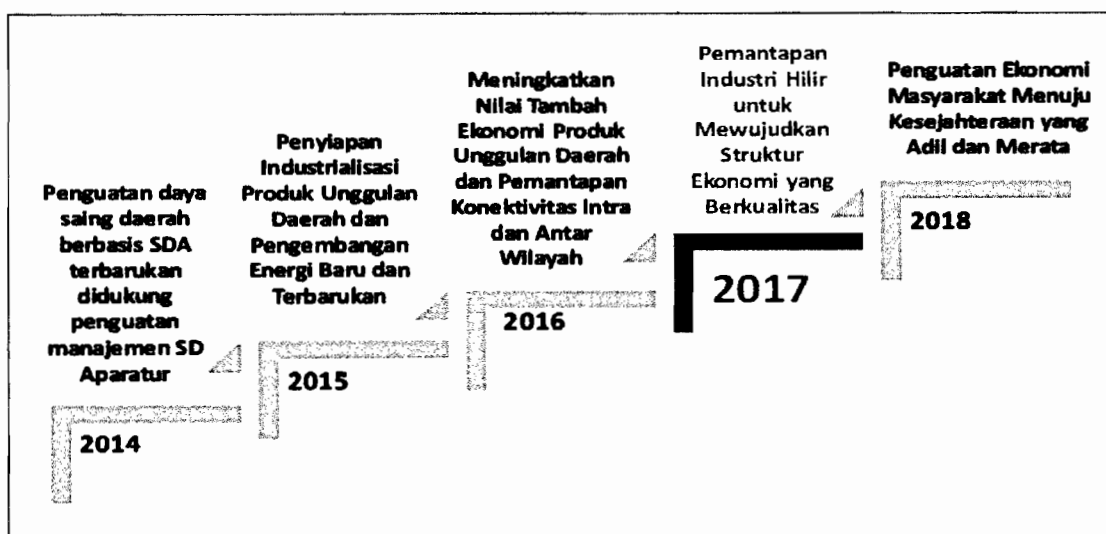
Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)



Prioritas pembangunan Kaltim pada tahun 2017 di fokuskan kepada daerah kabupaten/kota yang memiliki indikator Makro 3 (tiga) terbawah, fokus kewilayahan terhadap kabupaten/kota yang masih memiliki indikator yang masih rendah diharapkan kabupaten/kota tersebut nantinya tidak semakin tertinggal di banding kabupaten/kota lainnya se-Kalimantan Timur. Pemerataan pembangunan dan peran serta provinsi akan semakin nyata di rasakan oleh Kabupaten/kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari RPJMD 2013-2018 yang memiliki skala prioritas pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat (RPJM Nasional yang dijabarkan kembali dalam RKP). Proses ini akan meningkatkan keselarasan dan integrasi dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pada intinya, dokumen RKPD merupakan tahapan/langkah pelaksanaan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah. Dengan memedomani pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018, maka RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017. Dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1.
Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018





Dari gambar di atas tampak jelas bahwa agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2017 adalah **"Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas"** sebagai bagian dari tahapan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Selanjutnya, agar dokumen RKPD tahun 2017 sinkron dan selaras dengan RPJMD 2013-2018 serta RKPD tahun-tahun sebelumnya, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2017 perlu memperhatikan:

- Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2013-2018 yang belum tercapai;
- Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2017;
- Identifikasi target-target pembangunan RKPD tahun 2016 yang belum tercapai;
- Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP Tahun 2017); dan
- Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Prioritas pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1	Strategi 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1	Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya			2	Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
3	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya			3	Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
4	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	2	Strategi 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	4	Peningkatan kesempatan belajar anak
5	Melakukan revolusi karakter bangsa				
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	3	Strategi 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	5	Peningkatan mutu di bidang kesehatan
		4	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	6	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
				7	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	5	Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	8	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6	Strategi 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	9	Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang
				10	Peningkatan investasi sektor UMKM
				11	Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga
		7	Strategi 7 : Pengembangan Agribisnis	12	Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah
				13	Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis
				14	Penerapan Inovasi Teknologi agribisnis
				15	Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah
		8	Strategi 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi	16	Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
				17	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
					Hulu Hilir)
				18	Peningkatan ekspor produk olahan
				19	Pengembangan ekowisata
		9	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan	20	Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan
				21	Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian
				22	Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi
				23	Peningkatan infrastruktur pertanian
				24	Peningkatan produktivitas pertanian
				25	Perbaikan tata niaga produk pangan
		10	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	26	Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan
				27	Peningkatan rasio elektrifikasi
		11	Strategi 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	28	Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi
				29	Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan
				30	Penegakan hukum lingkungan
				31	Penurunan emisi gas rumah kaca
				32	Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah
9	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	12	Strategi 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	33	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
				34	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan



Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017	
					industri lainnya dan pusat pertumbuhan
				35	Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

Peningkatan kinerja pembangunan lintas bidang/sektor maupun lintas wilayah secara kompleks dan menyeluruh memiliki tujuan dalam perwujudan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Sebagai wilayah yang memiliki cukup banyak daerah sulit/tertinggal, aksesibilitas intra dan antar wilayah merupakan “harga mati” bagi pengembangan perekonomian daerah secara adil dan merata. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam meningkatkan distribusi orang, barang, maupun jasa.

Selain itu, pembangunan daerah yang optimal, efektif, dan efisien dapat dilakukan dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Terlebih lagi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dengan keanekaragaman tipologi wilayah. Hal inilah yang menjadikan tantangan sekaligus permasalahan pokok pembangunan yang harus diantisipasi dan diselesaikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, maka akan diupayakan pelaksanaan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal* secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dari keempat aspek tersebut, aspek *rethinking* merupakan aspek dominan dalam pencapaian reformasi birokrasi karena terkait dengan paradigma aparatur pemerintahan selama ini.



Aspek *rethinking* sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan perumusan perencanaan pembangunan mengingat pemerintahlah yang memiliki kewenangan dalam menyusunnya. Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi segala kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya perhatian pemerintah akan dokumen perencanaan kerja tahunan lebih ditingkatkan melalui reformasi birokrasi.

Dalam tahapan RPJMD tahun 2013-2018, RKPD tahun 2017 merupakan fase pertengahan yang memiliki keterkaitan antara awal dan akhir dari pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, segala kebijakan yang akan dirumuskan pada tahun 2017 ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode RPJMD karena jangka waktunya yang sudah mendekati 2018. Dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun 2017 akan memberikan fondasi dan dukungan yang positif pada pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sesuai dengan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, maka tema untuk RKPD 2017 telah ditetapkan, yakni: **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”** yang selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam Program Prioritas Pembangunan. Dapat dilihat pada table 4.7.



Tabel 4.7
Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
1	Strategi 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	98.69	98.80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2	Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	APK PAUD	49.77	70.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	97.00	97.90	DINAS PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
				Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	112.61	113.95	
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	79.60	91.00	
				Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	97.90	98.50	
		4	Program pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	67.78	77.50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	90.31	88.90	
		5	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	25.91	18.20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	65.30	65	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)	1/3	1/6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH		
8	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Proporsi anak yang kembali bersekolah	5	37	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	Strategi 2: Peningkatan kualitas layanan kesehatan	9	Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9.18	10	DINAS KESEHATAN



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM	Angka Kesakitan (Morbidity)	9.18	10	DINAS KESEHATAN, RS ATMA HUSADA, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
		11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kesakitan (Morbidity)	9.18	10	DINAS KESEHATAN, RS ATMA HUSADA
		12	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih(%)	89	93	DINAS KESEHATAN
		13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV/AIDS	0.09	<1	DINAS KESEHATAN
				Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	63.81	98.7	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
				Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	0,20	1.20	DINAS KESEHATAN
				Tingkat kematian akibat malaria	0	4.50	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
				Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	56.00	217	DINAS KESEHATAN
				Persentase keberhasilan pengobatan TB	56.70	91	DINAS KESEHATAN
				Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	19.80	48	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
		14	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	21.00	18	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN
				Angka Kematian Balita per 1000 KH	31.00	27	DINAS KESEHATAN
				Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	57	118	DINAS KESEHATAN, RSUD AWS, RSUD KANUJOSO, RSUD TARAKAN



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	100	80	DINAS KESEHATAN
3	Strategi 6: Percepatan Transformasi Ekonomi	16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran UMP	UMP = KHL	UMP = KHL	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		17	Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	78.41	80	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IPG	62.75	62.90	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	Strategi 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan	19	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	16.00	0.60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	2.87	1.25	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	26.64	23	
		20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	Proporsi Penduduk Miskin Yang Memiliki Akses Pelayanan Kesehatan (%)	0	80	DINAS KESEHATAN
		21	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan)	0.904	1	DINAS SOSIAL
		22	Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum (%)	76.71	100	BIRO EKONOMI



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
	23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya & melakukan usaha ekonomi melalui agrobisnis TTG, penguatan kelembagaan masyarakat & pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM pedesaan (jiwa)	3.888	3.888	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
	24	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	46.05	55.34	DINAS SOSIAL
	25	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	9,00	16,60	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
	26	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan Jumlah Penduduk miskin yang terserap di dunia kerja	9.907	600	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu	7	28	DINAS KEHUTANAN
	28	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan Demplot kawasan usaha Agribisnis Terpadu	5	40	DINAS PANGAN , TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	29	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan Jumlah KK yang dilatih budidaya peternakan	75	225	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	30	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam (%)	4,11	68,30	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		31	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat	27,50	42,50	DINAS PU, PENETAAN RUANG DAN PERA
5	Strategi 4: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja	32	Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)	Jumlah tenaga terampil bidang jasa kontruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)	0	600	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		33	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	55	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		34	Program pengembangan sistem pendukungbagi usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil danmenengah (unit usaha)	245	280	DISPERINDAGKOP DAN UKM
		35	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah	jumlahwirausaha baru (WUB)	1000	4.000	DISPERINDAGKOP DAN UKM
		36	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unggulan (koperasi)	17	30	DISPERINDAGKOP DAN UKM
		37	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	0.03	0.04	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		38	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru (%)	2	20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	23,83	33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		40	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri	2,00	25	DINAS SOSIAL
6	Strategi 5: Pengembangan ekonomi kerakyatan	41	Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)	87.86	97.26	BAPPEDA



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
	42 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	rasio pasar per 10.000 penduduk	0,98	0,99	DISPERINDAGKOP DAN UKM
	43 Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya	3,39	5	BIRO EKONOMI
	44 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	39,38	40	DINAS PPMD
	45 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	21,34	51,59	DINAS PPMD
	46 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	3	2	DINAS PPMD
	47 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah	0	8	DISPERINDAGKOP DAN UKM
	48 Program Penataan Struktur Industri Hulu – Hilir	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)	19	160	DISPERINDAGKOP DAN UKM
	49 Program Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,19	1,8	DINAS PERKEBUNAN
	50 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	20	10 IKM	DISPERINDAGKOP DAN UKM
	51 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	4	92	DINAS PERTENAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	52 Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah	Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	5	4	DINAS PERKEBUNAN
	53 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	2	16	DISPERINDAGKOP DAN UKM
	54 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara	4	12 Juta US\$	DISPERINDAGKOP DAN UKM
	55 Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)	45.865	90.000	DISPAR
	56 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan (juta orang)	2.186	1.226	DISPAR



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
7	Strategi 7: Pengembangan agribisnis	57	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas) (Ha)	160.139	150.156	DINAS PERKEBUNAN
		58	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan	6	20	DINAS PERTENAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		59	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)	15.11	20	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
		60	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB (Triliun)	33	35	DISPERINDAGKOP & UKM , DIS PANGAN, TANPAN &HOLTIKOLTURA, DISBUN
8	Strategi 8: Peningkatan Produksi Pangan	61	Program Peningkatan Produksi pertanian	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	463,070	617.2	DINAS PANGAN, TANPAN DAN HOLTIKOLTURA
		62	Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	4.75	4,9	DINAS PANGAN, TANPAN DAN HOLTIKOLTURA
		63	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas	803.00	1.039	DINAS PANGAN, TANPAN DAN HOLTIKOLTURA
		64	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL Perikanan Berkualitas	33	111	DINAS PANGAN, TANPAN DAN HOLTIKOLTURA
		65	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah BPP	88	125	DINAS PANGAN, TANPAN DAN HOLTIKOLTURA
		66	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi	0	4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		67	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	4.922	5.987	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		68	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Daerah(%)	80.66	95.59	DINAS PANGAN, TANPAN DAN HOLTIKOLTURA
		69	Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan	jumlah produksi daging (ton)	52.915.05	55.251,50	DINAS PERTENAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		70	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	194.192	257.743	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
		71	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	98.659	157.743	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
		72	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian	42	75	DINAS PANGAN, TANPAN DAN HOLTIKOLTURA
		73	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) (peserta)	98.54	115	DINAS PANGAN, TANPAN DAN HOLTIKOLTURA
9	Strategi 9: Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan	74	Program Diversifikasi Energi	Prosentase Bauran Energi Baru Terbarukan (%)	0.65	2	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL & PLN DAN SWASTA
		75	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Instalasi Biogas (unit)	105.00	530	DINAS PERTENAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		76	Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	78.75	78	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		77	Program pengembangan listrik pedesaan	Persentase desa berlistrik (%)	95.50	97	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
10	Strategi 10: Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	78	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)	4.11	34,6	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		79	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	57.20	86.01	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		80	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	34.11	98.58	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		81	Program pembangunan jalan tol	Ketersediaan jalan tol (%)	0	40	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		82	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas (ton)	699.580.433 ton dan 833.731 Orang	332.200.000 ton dan 15.500.000 Org	DINAS PERHUBUNGAN
Kuantitas Penumpang (orang)							



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		83	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi (kecamatan)	13	7	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		84	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan (kecamatan)	10	7	DINAS PERHUBUNGAN
		85	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara (kecamatan)	2	2	DINAS PERHUBUNGAN
		86	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomuni kasi (%)	100	75	DISKOMINFO
		87	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (l/detik)	0	1.040	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		88	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	Cakupan Layanan Air Minum (%)	42	47	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		89	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	0	30	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		90	Program pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	450	410	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		91	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis (DAS)	35	32	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
11	Strategi 11: Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	92	Program penguatan kelembagaan PTSP	Menurunnya tingkat korupsi	5.50	6,7	BIRO ORGANISASI
		93	Program pengembangan zona integritas	jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	2	4	INSPEKTORAT
		94	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Menurunnya kasus KKN	0	3	INSPEKTORAT



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
		95	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini laporan keuangan pemerintah provinsi	WTP	WTP	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		96	Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP (%)	20	80%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		97	Program peningkatan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	76.65	82	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		98	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur (%)	48.07	97%	BKD
		99	Program integrasi aplikasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	0	15	DISKOMINFO
		100	Pengembangan data statistik dan spasial	Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan (%)	84.00	90	BAPPEDA
		101	Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	BB (75.14)	A (78)	BIRO ORGANISASI
		102	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi	BIRO PEMERINTAHAN, PERBATASAN DAN OTONOMI DAERAH
				% Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan	55	70	INSPEKTORAT
103	Program Pendidikan politik masyarakat	Indeks demokrasi	68.13	73	KESBANGPOL		
12	Strategi 12: Peningkatan kualitas lingkungan hidup	104	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH (unit)	8	14	DINAS KEHUTANAN
		105	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	181.125	161.250	DINAS KEHUTANAN
		106	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggaraan tata ruang	61.17	76.83	DINAS PU. PENATAAN RUANG DAN PERA
		107	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman mangrove (Ha)	20	320	DINAS KEHUTANAN



Prioritas Pembangunan		Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian 2015	Target 2017	SKPD
	108	Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Jumlah HCV dikawasan hutan (kawasan HCV)	0	5	DINAS KEHUTANAN
	109	Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang	% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu (%)	44.30	38	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	110	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi yang diturunkan	250	312,50 CO2E	DISBUN
	111	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	193	250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	112	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	81.97	81,14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapat adipura	4	8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	114	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata (sekolah)	285	336	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	115	Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH	PPLHD dan PPNS (orang)	PPNS = 24, PPLHD = 76	PPNS = 28, PPLHD = 82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	116	Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Perda/Pergub	3	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	117	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/ kota)	1	4	BAPPEDA
	118	Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim	Intensitas emisi (ton/1 jt US\$)	1.738	1.317	DIS LING. HIDUP, DISHUT, DISBUN, DIS. ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL,
	119	Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Ketersediaan dan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di verifikasi (Kali PEP /tahun)	2	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sumber : Evaluasi hasil RKPD 2015 dan RPJMD 2013-2018 (diolah)



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam tiap pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk pada pelaksanaannya yang dilakukan pada tiap tahun mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dengan hal ini diharapkan pembangunan mampu dilaksanakan dengan optimal dan maksimal. Pada hakikatnya pada tiap fokus pembangunan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni pencapaian visi Gubernur terpilih selaku kepala daerah. Pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2017 ini, tema yang diusung adalah **“Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”**. Meskipun fokus pembangunan periode ini adalah peningkatan kegiatan industri hilir dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi yang lebih berkualitas. Namun berbagai aspek prioritas lain tetap merupakan unsur penentu pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam menindaklanjuti langkah-langkah tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi Gubernur, dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), hingga penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya program dan kegiatan maka jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, maka pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD 2017 harus merujuk pada program dan prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Sehingga alur kedua dokumen perencanaan tersebut mampu selaras dan tidak saling



tumpang tindih. Sesuai dengan peruntukannya, perencanaan pada dokumen Perubahan RKPD 2017 dirancang sesuai dengan perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam SKPD provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan melihat beberapa hal penting diatas maka yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah pendanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Perioritas Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta penunjang lainnya, yang dibagi menjadi urusan .

1. 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- 6) Sosial

2. 19 (Sembilan belas) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

- 1) Tenaga Kerja
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3) Pangan
- 4) Pertanahan
- 5) Lingkungan Hidup
- 6) Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



- 9) Perhubungan
- 10) Komunikasi dan Informatika
- 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 12) Penanaman Modal Daerah
- 13) Kebudayaan
- 14) Kepemudaan dan Olahraga
- 15) Statistik
- 16) Persandian
- 17) Kebudayaan
- 18) Perpustakaan
- 19) Kearsipan

3. 8 (delapan) Urusan Pilihan

- 1) Kelautan Dan Perikanan
- 2) Parawisata
- 3) Pertanian
- 4) Kehutanan
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6) Perdagangan
- 7) Perindustrian
- 8) Transmigrasi

4. 5 (lima) Penunjang Urusan Pemerintah

- 1) Perencanaan
- 2) Keuangan
- 3) Kepegawaian
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
- 5) Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

Adapun program dan kegiatan prioritas pembangunan RKPD tahun 2017 sebagai berikut :



I. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Program pendidikan non formal
- 2) Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
- 3) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- 4) Program pendidikan menengah
- 5) Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
- 6) Program peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan

2. Badan Perpustakaan Daerah

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3. Badan Peberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

- 1) Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak

II. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

1. Dinas Kesehatan

- 1) Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- 2) Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
- 3) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 6) Program standarisasi pelayanan kesehatan
- 7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

III. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan

3. Dinas Sosial

- 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur indeks kedalaman kemiskinan



- 2) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
4. Biro Perekonomian
 - 1) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
6. Dinas Kependudukan , Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan
8. Dinas Kehutanan
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan
9. Dinas Pangan , Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
11. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana

IV. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1. Dinas Perindakop dan UKM
 - 1) Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1) Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa konstruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif



- 3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Dinas Sosial
 - 1) Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
4. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - 1) Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

V. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 2) Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
 - 1) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
3. BAPPEDA
 - 1) Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan daerah
4. Dinas Perindakop dan UKM
 - 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5. Biro Perekonomi
 - 1) Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

VI. Percepatan Transformasi Ekonomi

1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 - 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 3) Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan
2. Dinas Perindakop dan UKM
 - 1) Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
 - 2) Program Penataan Struktur Industri Hulu Hilir
 - 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - 4) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional



- 5) Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor
- 3. Dinas Perkebunan
 - 1) Program Perluasan Kebun Sawit
 - 2) Program Pengembangan Produk-produk Perkebunan Unggulan daerah
- 4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 5. Dinas Parawisata
 - 1) Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan
 - 2) Program Pengembangan Distinasi Pariwisata

VII. Pengembangan Agrobisnis

- 1. Dinas Perkebunan
 - 1) Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non sawit
- 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 1) Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
- 3. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 4. Dinas Perindakop dan UKM
 - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri olahan non migas

VIII. Peningkatan Produksi Pangan

- 1. Dinas Pangan , Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - 2) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - 3) Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian
 - 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan
 - 6) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas
 - 7) Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan
 - 8) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan)
- 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi



4. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air tawar
 - 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6. Dinas Pekerjaan Umum
 - 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

IX. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Program diversifikasi energi
 - 2) Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - 3) Program pengembangan listrik pedesaan
2. PLN / Swasta
 - 1) Program diversifikasi energi
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Ketenagalistrikan

X. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
 - 1) Program Pembangunan jalan dan Jembatan
 - 2) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan
 - 3) Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
 - 4) Program pembangunan jalan tol
 - 5) Program pembukaan keterisolising wilayah sektor jalan dan jembatan
 - 6) Program penyediaan dan pengelohan air baku
 - 7) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum & air limbah
 - 8) Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air
 - 9) Program Pengendalian Banjir



- 10) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
2. Dinas Perhubungan
 - 1) Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
 - 2) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan
 - 3) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program sarana dan prasarana telekomunikasi

XI. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

1. Inspektorat
 - 1) Program Pengembangan Zona Integritas
 - 2) Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN
 - 3) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Biro Hukum
 - 1) Program Penguatan Kelembagaan PTSP
 - 2) Program peningkatan pelayanan publik
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Manajemen berbasis kinerja
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah
 - 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6. Dinas Komunikasi Dan Informatika
 - 1) Program Integrasi Aplikasi
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Program Pendidikan politik masyarakat
8. Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
 - 1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah



XII. Peningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Dinas Kehutanan
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan KPH
 - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 3) Rehabilitasi Hutan Mangrove
 - 4) Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
 - 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang
4. Dinas Perkebunan
 - 1) Program Pembinaan Perkebunan ramah lingkungan
5. Dinas Lingkungan Hidup
 - 1) Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - 2) Program pengendalian pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup
 - 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 4) Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - 5) Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan lingkungan hidup
 - 6) Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
 - 7) Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim
 - 8) Investasi emisi gasrumah kaca
6. BAPPEDA
 - 1) Program Pengaruh pengaruh perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program kegiatan, sasaran program, Instansi Penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rancangan Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Tahun 2017. Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.677.527.145.000,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 3.033.372.855.000,-.



BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 memiliki posisi strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP No 18 Th 2016 tentang Perangkat Daerah Point Kedua segera melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, Perubahan RKPD Tahun 2017 mengemban amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tema, **"Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas"**. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perekonomian utamanya dalam mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor dominan.

Hal ini sejalan dengan rumusan Visi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2030 nanti dimana pada periode 2015-2020 merupakan fase **"Peningkatan Nilai Tambah"** dengan strategi yang digunakan dan dikembangkan yakni:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas,
2. Pembatasan alih fungsi lahan dan pembatasan ekspor sektor primer (batubara dan migas);
3. Persiapan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); dan
4. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri migas, batubara dan pertanian, serta sektor jasa dan perdagangan.

Pada perumusan Perubahan RKPD Tahun 2017 ini juga memperhatikan kebijakan nasional presiden dan wakil presiden terpilih yakni Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan berupa agenda prioritas yang dikenal dengan sebutan



NAWA CITA telah diimplementasikan dalam rumusan RKPD Tahun 2017 sebagai bagian dari integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional.

Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang secara otentik dirumuskan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah selama tahun 2017. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaran pemerintah daerah wajib mempedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 utamanya program dan kegiatan untuk SKPD/Dinas/Instansiterkait agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah.

Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Berikut beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD 2017 yang perlu untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan maupun subyek pelaksana pembangunan lainnya.

1. Seluruh SKPD/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2013-2018.
2. Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan langkah awal dalam penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur).



3. Dalam upaya menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah, maka setiap SKPD/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2017 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya).
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Tahun 2017 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengendalian dan pengawasan akan mengoptimalkan berbagai capaian kinerja pembangunan karena akan merevisi setiap kekurangan dan mengakselerasi capaian positif pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan.
6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017.
7. Pada akhir tahun 2017, setiap kepala SKPD/Dinas/Instansi wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2017.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahun ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018.



9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
-

Samarinda, 1 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006